

# ANALISIS MODEL PENANGGULANGAN MASALAH KELAPARAN PADA MASYARAKAT SUMATERA UTARA

Erli Mutiara  
Ikeu Tanziha



UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
2009

**ANALISIS MODEL PENANGGULANGAN  
MASALAH KELAPARAN PADA  
MASYARAKAT SUMATRA UTARA**

**Peneliti**

**Dr. Dra. Erli Mutiara, M.Si  
Dr. Ir. Ikeu Tanziha, MS**



**UNIVERSITAS MEDAN  
2009**

# RINGKASAN

**K**elaparan dan kerawanan pangan merupakan masalah serius yang dihadapi bangsa-bangsa di didunia terutama pada negara berkembang. Berdirinya PBB, salah satunya bertujuan untu mengelimasi kerawanan pangan dan kelaparan dunia. Penanggulangan kelaparan bukan hanya sekedar moralitas, tetapi juga berdampak positif pada pembangunan.

Tujuan umum penelitian adalah menganalisis model penanggulangan kelaparan pada masyarakat di Sumatera Utara. Adapun tujuan khususnya: 1) menganalisis prevalensi kelaparan pada rumahtangga, 2) menganalisis determinan kelaparan, 3) menganalisis fungsi kelembagaan lokal untuk menanggulangi kelaparan, dan 4) menyusun model penanggulangan masalah kelaparan pada rumahtangga.

Penelitian dilakukan di Kelurahan Tegalsari Mandala I Kecamatan Medan Denai dan Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota. Jumlah sampel sebanyak 120 rumahtangga yaitu rumahtangga Pra Keluarga Sejahtera (Pra KS), Keluarga Sejahtera 1, 2 dan 3 (KS 1,2 dan 3), diambil secara *stratified random sampling*. Data yang akan dianalisis berupa data primer yaitu *food coping strategy*, pola nafkah keluarga dan akses terhadap permodalan atau program pemerintah, modal sosial masyarakat, kelembagaan dan pola hubungan kerja serta data sekunder berupa data kebijakan serta program yang berkaitan dengan penanggulangan /kelaparan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif digunakan analisis kebijakan (evaluasi program), analisis kelembagaan, analisis potensi dan penentuan prioritas masalah tingkat komunitas. Analisis data kualitatif dilakukan melalui proses penyaringan data, penggolongan/ pengakategorian, penyimpulan serta uji ulang. Dalam proses analisis data kualitatif, setiap interpretasi logis atas data, akan dilengkapi dengan data-data kuantitatif sepanjang data tersebut dapat mendukung, mempertajam dan memperjelas interpretasi.

Analisis data kuantitatif digunakan analisis statistik inferensia, untuk menguji hubungan antar variabel, uji beda, dan analisis determinan. Uji man-whitney dan uji t digunakan untuk menganalisis perbedaan sosial ekonomi dan dinamika sosial pada daerah pedesaan dan perkotaan serta pada rumahtangga lapar dan tidak lapar. Regresi logistik digunakan untuk menganalisis determinan kelaparan atau faktor risiko kejadian kelaparan rumahtangga. Dan analisis goal programming digunakan untuk membuat optimalisasi gizi balita dari rumahtangga miskin yang disesuaikan dengan kecukupan gizi balita, sesuai dengan kebiasaan makan balita setempat serta sesuai dengan daya beli rumahtangga miskin.

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden yang terdiri dari pejabat kabupaten, kecamatan, perangkat desa serta tokoh masyarakat merupakan laki-laki. Baik pejabat desa dan di kota masing-masing sebanyak 88.9 persen dan 91.7 persen berprofesi sebagai PNS, dan sebanyak 44.4 persen dan 33.3 persen mengenyam pendidikan SMA. Tidak semua pejabat atau tokoh masyarakat mengetahui ketahanan pangan, yang mengetahui ketahanan pangan pada tingkat individu, rumahtangga maupun wilayah masing-masing hanya 61.9 persen. Hampir seluruh atau sebagian besar responden mengetahui adanya program-program pemerintah berada di provinsi mereka seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Raskin, BOS dan Askeskin. Program-Program ini umumnya dinilai berhasil oleh pejabat dan tokoh masyarakat karena membantu masyarakat terhadap masalah yang mereka hadapi, membantu perekonomian.

Prevalensi kelaparan sebesar 20.8 persen. Rataan usia KK dari seluruh responden berkisar  $43.08 \pm 11.62$  tahun dan rata-rata usia ibu dari seluruh responden berkisar  $36.03 \pm 10.87$  tahun. Rataan pendidikan KK dari seluruh responden berkisar  $7.59 \pm 3.84$  tahun dan rata-rata pendidikan ibu dari seluruh responden berkisar  $6.90 \pm 3.55$  tahun. Jenis pekerjaan KK pada keluarga kelaparan sebagai buruh dan jasa angkutan, sedangkan pada keluarga tidak kelaparan lebih bervariasi yaitu sebagai pedagang, PNS, karyawan dan wiraswasta. Rataan jumlah anggota keluarga pada keluarga kelaparan  $5.80 \pm 1.96$  orang, sedangkan pada keluarga tidak kelaparan

5.18±2.04 orang. Rataan pengeluaran perkapita perbulan pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan masing-masing Rp 227.438,- dan Rp 281.878,- per bulan. Dukungan sosial pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan tergolong kategori sedang.

Pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan, sebanyak (100.0% dan 62.1%) pernah mengalami kekurangan pangan, (100% dan 61.0 %) kekurangan pangan terjadi hampir setiap bulan, dengan alasan karena pendapatan menurun (100.0% dan 96.6 %). Pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan (100.0% dan 32.6%) tidak mempunyai persediaan pangan, namun demikian ada juga sebesar (67.4 %) yang mempunyai persediaan pangan pada keluarga tidak kelaparan. Dari (67.4 %) keluarga tidak kelaparan yang mempunyai persediaan pangan, (53.1 %) hanya untuk sehari saja. Persediaan pangan yang dimiliki keluarga tidak kelaparan sebanyak (73.4 %) cukup sampai punya uang berikutnya. Bentuk persediaan pangan keluarga tidak kelaparan (51.6 %) dalam bentuk uang dan (48.4 %) yang persediaannya dalam bentuk pangan (beras).

Strategi *food coping* yang dilakukan oleh keluarga terdiri dari 3 taraf yaitu taraf 1, meningkatkan pendapatan (mencari pekerjaan sampingan), perubahan konsumsi pangan, penyegeraan akses terhadap pangan. Taraf 2, penyegeraan akses terhadap pembelian tunai, perubahan distribusi dan frekuensi makan, serta melewati hari-hari tanpa makan. Taraf 3, langkah drastis. Strategi *food coping* yang dilakukan keluarga pada taraf 1 adalah pada keluarga kelaparan sering mencari pekerjaan sampingan (44.0%), sedangkan tidak kelaparan tidak pernah (44.2%). Keluarga kelaparan selalu membeli makanan yang lebih murah harganya (92.0 %), sedangkan tidak kelaparan tidak pernah (30.5%). Baik keluarga kelaparan dan tidak kelaparan selalu mengurangi jenis pangan yang dikonsumsi (92.0% dan 33.7%). Keluarga kelaparan selalu mengubah prioritas pembelian pangan (88.0%), sedangkan tidak kelaparan tidak pernah (44.2%). Keluarga kelaparan dan tidak kelaparan tidak pernah membeli makanan yang nilainya lebih rendah (68.0% dan 100.0%). Pada keluarga kelaparan selalu mengurangi porsi makan (72.0%), sedangkan tidak kelaparan tidak pernah mengurangi porsi makan (72.6%). Pada

keluarga kelaparan kadang-kadang menerima bantuan pangan dari pemerintah (BLT) (40.0%), sedangkan tidak kelaparan tidak pernah (70.5%). Keluarga kelaparan sering menerima bantuan pangan dari saudara (44.0%), sedangkan keluarga tidak kelaparan kadang-kadang menerima bantuan pangan dari saudara (46.3%). Keluarga kelaparan kadang-kadang menerima kupon raskin (48.0%), sedangkan tidak kelaparan tidak pernah (64.2%).

Strategi selanjutnya yaitu taraf 2. Pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan tidak pernah menggadaikan aset untuk membeli kebutuhan pangan (72.0% dan 89.5%). Keluarga kelaparan sering menjual aset yang tidak produktif (piring, gelas, lemari, pakaian) (76.0%), sedangkan tidak kelaparan tidak pernah (64.2%). Baik keluarga kelaparan maupun tidak kelaparan tidak pernah menjual aset yang produktif (hewan peliharaan, tanah sepeda dll) (96.0% dan 91.6%). Keluarga kelaparan dan tidak kelaparan kadang-kadang meminjam uang (60.0% dan 32.6%). Keluarga kelaparan sering membeli pangan dengan berhutang (48.6%), sedangkan tidak kelaparan tidak pernah (48.4%). Keluarga kelaparan selalu merubah distribusi makan (prioritas ibu untuk anak-anak) (84.0%), sedangkan tidak kelaparan tidak pernah (60.0 %). Baik keluarga kelaparan dan tidak kelaparan selalu mengurangi frekuensi makan per hari (100.0% dan 56.8%). Keluarga kelaparan sering melewati hari-hari tanpa makan (40.0%), sedangkan tidak kelaparan tidak pernah melewati hari-hari tanpa makan (100.0%).

Berdasarkan hasil pengkategorian dari taraf strategi *food coping* yang dilakukan oleh keluarga, baik keluarga kelaparan maupun tidak kelaparan melakukan strategi *food coping* baru sampai taraf 1, 2, masing-masing (100.0 % dan 48.2%), namun demikian pada keluarga tidak kelaparan ada juga yang tidak melakukan strategi *food coping* sebesar 44.7% karena mereka tidak kekurangan pangan. Hasil uji korelasi *Spearman* menunjukkan terdapat hubungan nyata antara strategi *food coping* dengan pengeluaran per kapita ( $r=-0.609$ ;  $p<0.01$ ), pendidikan kepala keluarga ( $r=-0.347$ ;  $p<0.01$ ), pendidikan ibu ( $r=-0.315$ ;  $p<0.01$ ), jumlah anggota keluarga ( $r=0.3$ ;  $p<0.01$ ), umur KK ( $r=0.244$ ;  $p<0.01$ ),

dan umur ibu ( $r=0.257$ ;  $p<0.01$ ). Hal ini berarti semakin rendah pengeluaran per kapita, pendidikan kepala keluarga, pendidikan ibu dan semakin besar jumlah anggota keluarga, umur KK, umur ibu, maka banyak tindakan dan kedalaman strategi *food coping* yang mereka lakukan.

Berdasarkan hasil analisis baik di desa dan di kota (53.3%) contoh mengikuti satu organisasi. Pada rumahtangga lapar dan tidak lapar (53.3%) contoh mengikuti hanya satu organisasi. Baik di desa maupun di kota (57.5%) contoh berperan sebagai anggota dalam organisasi. Rumahtangga lapar dan tidak lapar (57.5%) hanya berperan sebagai anggota. Keterlibatan masyarakat dalam organisasi baik di desa maupun di kota berkurang (45.8%). Baik rumahtangga lapar dan tidak lapar keterlibatan masyarakat dalam organisasi berkurang sebesar (45.8%). Lebih dari setengah contoh (65%) di desa dan di kota aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Rumahtangga lapar dan tidak lapar (65%) aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Baik di desa dan kota (53.3%) contoh mencurahkan waktunya kurang dari 10 jam per bulan. Baik rumahtangga lapar dan tidak lapar (53.3%) contoh mencurahkan waktunya kurang dari 10 jam per bulan. Sebagian besar contoh baik dari desa dan kota (79.2%) meminta bantuan kepada tetangga. Baik rumahtangga lapar dan tidak lapar (79.2%) meminta bantuan kepada tetangga. Dalam membuat APBdes baik dari desa dan kota sangat rendah, secara keseluruhan yang pernah ikut berpartisipasi. Pada rumahtangga lapar dan tidak lapar, yang ikut berpartisipasi dalam membuat APBdes walaupun hanya satu kali adalah sebanyak (4.2%). Partisipasi contoh dalam membicarakan masalah warga secara keseluruhan di desa dan di kota, pada rumahtangga lapar dan tidak lapar masih rendah, (14.2%) menyatakan ikut berpartisipasi dalam beberapa kesempatan. Partisipasi contoh secara keseluruhan di desa dan di kota, dalam bergotong royong sudah cukup baik, yaitu sekitar (58.3 %) beberapa kali menyatakan ikut bergotong royong. Pada rumahtangga lapar dan tidak lapar dalam bergotong royong sudah cukup baik, yaitu sekitar (8.3 %) sering menyatakan ikut bergotong royong. Di desa dan kota persentase contoh yang tidak keberatan bertetangga dengan

tetangga yang berbeda suku sebanyak (66.7% dan 60%). Di desa dan kota sebagian besar contoh (55% dan 70%) menyatakan tidak keberatan memiliki tetangga rumahtangga manula. Pada rumahtangga lapar dan tidak lapar persentase contoh yang tidak keberatan bertetangga dengan tetangga yang berbeda suku sebanyak (72% dan 61.1 %). Pada rumahtangga lapar dan tidak lapar, sebagian besar contoh (56% dan 64.2%) menyatakan tidak keberatan memiliki tetangga rumahtangga manula. Untuk tipe tetangga rumahtangga miskin, secara keseluruhan sebagian besar contoh menyatakan tidak keberatan. Baik di desa dan kota, rumahtangga lapar dan tidak lapar (60%) menyatakan bahwa tidak ada organisasi atau perusahaan yang membantu di wilayah tempat tinggal mereka. Partisipasi contoh dalam kegiatan bantuan perusahaan secara umum sangat rendah baik di desa dan kota, maupun pada rumahtangga lapar dan tidak lapar. Secara keseluruhan baik di desa dan kota, sebanyak (57.5%) contoh menyatakan bahwa pemerintah memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan organisasi atau perusahaan lain. Pada rumahtangga lapar dan tidak lapar secara keseluruhan, sebanyak (48.3%) menyatakan bahwa pemerintah lebih mampu memberikan bantuan kepada masyarakat dibandingkan dengan organisasi atau perusahaan lain.

Determinan utama kelaparan adalah pengeluaran rumahtangga per cápita. Risiko dengan pengeluaran perkapita dibawah garis kemiskinan mempunyai peluang 3.5 kali untuk mengalami kelaparan (OR= 3.5) dibandingkan rumahtangga dengan pengeluaran perkapita diatas garis kemiskinan.

Solusi model goal programming menghasilkan sasaran didalam batas yang diperbolehkan, yaitu Energi dan protein antara 90-110% dan untuk vitamin dan mineral > 77% , dengan biaya sesuai daya beli yaitu Rp 4427.9,-.

Saran dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengurangi prevalensi kelaparan di Sumatera Utara aiknya pemerintah memberikan intervensi khusus kepada keluarga yang menderita kelaparan, baik dalam jangka pendek berupa bantuan pangan, dan dalam jangka menengah



berupa pemberdayaan ekonomi dengan mempertimbangkan keberlanjutan mata pencaharian mereka (peningkatan keterampilan, motivasi usaha dan modal), karena kemiskinan masih merupakan determinan utama kejadian kelaparan; 2) Berdasarkan hasil penelitian program-program pemerintah umumnya dinilai berhasil oleh pejabat dan tokoh masyarakat oleh karena itu sebaiknya pemerintah tetap melanjutkan program yang sudah dilaksanakan dan terus meningkatkan kinerja untuk hasil yang lebih baik lagi; 3) Solusi model optimalisasi gizi yang dihasilkan sudah mempertimbangkan daya beli khususnya daya beli dari keluarga miskin serta kebiasaan makan dan kecukupan gizi balita pada masyarakat Sumatera Utara, oleh karenanya model ini dapat di terapkan dalam kehidupan masyarakat terutama untuk anak balita dari keluarga miskin, untuk pencegahan dan pencegahan kelaparan serta perbaikan status gizi balita, dan 4) Perlu dioptimalkan kelembagaan masyarakat setempat agar dapat meningkatkan dukungan sosial terhadap keluarga miskin, rawan pangan dan kelaparan.

# KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tulisan yang berjudul “Analisis Model Penanggulangan Masalah Kelaparan pada Masyarakat di Sumatera Utara” dapat di selesaikan.

Kelaparan sampai saat ini masih merupakan masalah yang belum terselesaikan, bahkan ada kecenderungan meningkat akibat dari krisis ekonomi dan global warming yang dihadapi hampir seluruh bangsa didunia. Berbagai upaya baik pemerintah maupun masyarakat dalam menanggulangi kelaparan telah dilakukan, namun cenderung kurang efektif karena kurang mengena pada akar masalahnya. Model Penanggulangan Masalah Kelaparan pada Masyarakat di Sumatera Utara yang disajikan dalam buku ini diharapkan dapat memberikan masukan yang tepat dalam peningkatan ketahanan pangan dan penanggulangan kelaparan khususnya di Sumatra Utara. Dalam buku ini digambarkan akar masalah terjadinya kelaparan, coping strategy yang dilakukan rumahtangga, modal sosial serta persepsi tentang sukses gagalnya program ketahanan pangan dan penanggulangan kelaparan.

Diakhir tulisan juga disampaikan salah satu model penanggulangan kelaparan yang dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Oleh karena itu harapan penulis, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi perbaikan kualitas bangsa. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih pada semua pihak yang telah berpartisipasi sampai terwujudnya buku ini.

Medan, November 2009

Tim Penulis

# DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	i
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Umum .....	2
1.3 Tujuan Khusus .....	2
BAB II. STUDI PUSTAKA .....	3
2.1 Konsep, Dimensi dan Pengukuran Kelaparan .....	3
2.2 Konsumsi Pangan .....	4
2.3 Perencanaan Pangan dengan Model Linear Programming....	5
2.4 Modal Sosial .....	7
2.4.1 Konsep dan Ukuran .....	7
2.4.2. Modal Sosial sebagai Aset dalam Mengatasi Kelaparan .....	10
2.5 Pengembangan Masyarakat.....	12
2.6 Pembangunan Masyarakat Desa.....	15
BAB III. KERANGKA KONSEPTUAL .....	23
BAB IV. METODE PENELITIAN .....	25
4.1 Waktu dan Tempat.....	25
4.2 Teknik Penarikan Sampel .....	25
4.3 Jenis dan Cara Pengumpulan Data .....	25
4.4 Pengelolaan dan Pengendalian kualitas data .....	27
4.5 Pengolahan dan Analisis Data .....	27
4.6 Analisis Data Identitas Keluarga .....	27
4.7 Analisis strategi Food Coping .....	28
4.8 Analisis Data dengan Metode Goal Programming .....	29
BAB V. PERSEPSI KETAHANAN PANGAN DAN KELAPARAN .....	33

5.1 Gambaran Umum Lokasi .....	33
5.1.1 Kelurahan Tegalsari Mandala I .....	33
5.1.2 Desa Sitirejo I .....	33
5.2 Persepsi Pejabat dan Tokoh Masyarakat tentang Ketahanan Pangan dan Kelaparan .....	34
5.2.1 Karakteristik Contoh Pejabat dan Tokoh Masyarakat .....	34
5.2.2 Pengetahuan dan Persepsi Ketahanan Pangan dan Kelaparan .....	36
5.2.3 Persepsi Pejabat dan Tokoh tentang Sukses - Gagal Program Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kelaparan .....	37
<b>BAB VI PREVALENSI DAN DETERMINAN KELAPARAN .....</b>	<b>39</b>
6.1 Prevalensi Kelaparan .....	39
6.2 Strategi Food Coping .....	68
6.2.1 Pelaku Strategi Food Coping Keluarga .....	79
6.2.2 Skor Strategi Food Coping .....	84
6.3 Konsumsi Pangan .....	85
6.3.1 Frekuensi Konsumsi Pangan .....	85
6.3.2 Berat Pangan yang Dikonsumsi .....	89
6.4 Peran Modal Sosial dalam Pencegahan Kejadian Kelaparan .....	92
6.4.1 Partisipasi, Aksi Kolektif dan Kerjasama Warga ...	100
6.4.2 Norma Sosio-Kultural .....	104
6.4.3 Bantuan Kepada Warga .....	107
6.5 Determinan Kelaparan .....	111
<b>BAB VII MODEL OPTIMALISASI GIZI BALITA UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KELAPARAN .....</b>	<b>113</b>
7.1 Gambaran Umum Balita .....	113
7.2 Pengeluaran Konsumsi .....	116
7.3 Rancangan Menu Makan Harian Selama Dua Hari .....	116
<b>BAB VIII. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>125</b>
8.1 Kesimpulan .....	125
8.2 Saran .....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>127</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
1 Jenis data dan cara pengambilannya .....	26
2 Karakteristik responden pejabat dan tokoh.....	35
3 Persepsi pejabat tentang ketahanan pangan.....	36
4 Persepsi Pejabat dan tokoh tentang sukses-gagal kebijakan program ketahanan pangan.....	38
5 Sebaran responden berdasarkan jawaban ukuran kelaparan kualitatif .....	40
6 Sebaran responden berdasarkan prevalensi kelaparan kualitatif .	42
7 Sebaran keluarga menurut kelompok usia kepala keluarga .....	42
8 Sebaran keluarga menurut kelompok usia ibu .....	43
9 Sebaran keluarga menurut tingkat pendidikan KK.....	44
10 Sebaran keluarga menurut tingkat pendidikan ibu .....	45
11 Sebaran keluarga berdasarkan jenis pekerjaan kepala keluarga..	46
12 Sebaran keluarga menurut kategori jumlah anggota keluarga .....	47
13 Sebaran keluarga menurut dukungan sosial.....	49
14 Sebaran keluarga menurut kepemilikan rumah .....	53
15 Sebaran keluarga menurut rata-rata dan Sd luas bangunan dan tanah yang dimiliki .....	54
16 Sebaran keluarga menurut kepemilikan elektronik.....	54
17 Sebaran keluarga menurut garis kemiskinan BPS (2005) .....	56
18 Sebaran keluarga menurut garis kemiskinan Bank Dunia .....	57
19 Sebaran keluarga menurut rata-rata (Rp) dan standar deviasi pengeluaran perkapita perbulan .....	58
20 Sebaran keluarga menurut rata-rata persentase dan standar deviasi jenis pengeluaran pangan dan non pangan.....	60
21 Sebaran keluarga menurut pengambil keputusan.....	64
22 Sebaran keluarga menurut kontrol keuangan .....	65
23 Sebaran keluarga menurut kekurangan pangan.....	66
24 Sebaran keluarga menurut peningkatan pendapatan, perubahan konsumsi pangan .....	70

25	Sebaran keluarga menurut penyegeraan akses terhadap pangan	73
26	Sebaran keluarga menurut penyegeraan akses terhadap pembelian tunai, perubahan distribusi dan frekuensi makan serta melewati hari-hari tanpa makan .....	76
27	Sebaran keluarga menurut pelaku food coping.....	81
28	Sebaran taraf strategi food coping keluarga .....	84
29	Sebaran keluarga menurut rata-rata dan standar deviasi frekuensi konsumsi pangan (kali/minggu) .....	86
30	Rata-rata dan Sd berat pangan (g) per hari yang dikonsumsi pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan .....	89
31	Sebaran Contoh menurut jumlah organisasi yang diikuti berdasarkan desa dan kota.....	92
32	Sebaran Contoh menurut jumlah organisasi yang diikuti berdasarkan status ketahanan pangan .....	93
33	Sebaran contoh menurut peran dalam organisasi berdasarkan desa dan kota.....	94
34	Sebaran Contoh menurut peran dalam organisasi yang diikuti berdasarkan status ketahanan pangan .....	94
35	Sebaran contoh menurut bentuk perubahan keterlibatan dalam organisasi berdasarkan desa dan kota .....	95
36	Sebaran contoh menurut bentuk perubahan keterlibatan dalam organisasi berdasarkan status ketahanan pangan .....	96
37	Sebaran contoh menurut keaktifan memberi bantuan kepada masyarakat berdasarkan desa dan kota.....	96
38	Sebaran contoh menurut keaktifan memberi bantuan kepada masyarakat berdasarkan status ketahanan pangan.....	97
39	Sebaran contoh menurut curahan waktu untuk membantu masyarakat berdasarkan desa dan kota.....	97
40	Sebaran contoh menurut curahan waktu untuk membantu masyarakat berdasarkan status ketahanan pangan.....	98
41	Sebaran contoh menurut tempat meminta bantuan berdasarkan desa dan kota.....	99

42	Sebaran contoh menurut tempat meminta bantuan berdasarkan status ketahanan pangan.....	99
43	Sebaran contoh menurut partisipasi dalam membuat APBdes berdasarkan desa dan kota.....	100
44	Sebaran contoh menurut partisipasi dalam membuat APBdes berdasarkan status ketahanan pangan.....	101
45	Sebaran contoh menurut partisipasi dalam membicarakan masalah warga berdasarkan desa dan kota.....	101
46	Sebaran contoh menurut partisipasi dalam membicarakan masalah warga berdasarkan status ketahanan pangan .....	102
47	Sebaran contoh menurut partisipasi dalam gotong royong berdasarkan desa dan kota.....	103
48	Sebaran contoh menurut partisipasi dalam gotong royong berdasarkan status ketahanan pangan.....	104
49	Sebaran contoh menurut tipe tetangga yang diinginkan berdasarkan desa dan kota.....	105
50	Sebaran contoh menurut tipe tetangga yang diinginkan berdasarkan status ketahanan pangan.....	107
51	Sebaran contoh menurut ada tidaknya organisasi/perusahaan yang membantu berdasarkan desa dan kota .....	108
52	Sebaran contoh menurut ada tidaknya organisasi/perusahaan yang membantu berdasarkan status ketahanan pangan .....	108
53	Sebaran contoh menurut partisipasi dalam kegiatan bantuan perusahaan berdasarkan desa dan kota.....	109
54	Sebaran contoh menurut partisipasi dalam kegiatan bantuan perusahaan berdasarkan status ketahanan pangan.....	110
55	Sebaran contoh menurut organisasi pemberi pelayanan yang lebih baik berdasarkan desa dan kota .....	110
56	Sebaran contoh menurut organisasi yang dianggap lebih mampu membantu berdasarakan desa dan kota.....	111
57	Sebaran balita menurut kelompok umur.....	113
58	Status gizi balita di medan berdasarkan kelompok umur (BB//U)	114

59	Alokasi pengeluaran pangan keluarga anak balita tiap jenis kelompok pangan .....	115
60	Contoh rancangan menu makanan satu hari untuk anak balita ketiga kelompok usia .....	117
61	Rata-rata biaya dan kontribusi kandungan zat gizi tiap menu makanan .....	123



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
1 Bagan Alur Penelitian .....	24
2 Sebaran keluarga menurut kategori skor dukungan sosial.....	52

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1

#### Latar Belakang

Kelaparan dan kemiskinan merupakan salah satu masalah kemanusiaan yang mendasar. Berdasarkan data *World Food Summit* (WFS) pada tahun 2002, sebanyak 815 juta manusia di negara berkembang masih menghadapi kelaparan, 300 juta diantaranya adalah anak-anak (Witoto 2003). Berdasarkan hasil perhitungan FAO (2005) di Indonesia terdapat sekitar 6% penduduk menderita kelaparan yaitu sekitar 12 juta 600 ribu orang, atau satu diantara 20 orang penduduk Indonesia menderita kelaparan. Apabila pemerintah Indonesia ingin menurunkan setengah jumlah kelaparan sampai dengan tahun 2015, maka pemerintah harus mampu menurunkan kelaparan 600 000 jiwa setiap tahunnya. Suatu hal yang sulit dicapai apabila tidak ada kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat. Tingginya kasus kelaparan ini di Indonesia apabila tidak segera ditangani dengan serius, maka hal ini akan menimbulkan masalah yang serius bagi kualitas sumberdaya manusia di masa depan. Menurut Alfiasari (2007) anak balita yang mengalami kelaparan apalagi sampai mengalami gizi buruk meskipun mereka terselamatkan dari kematian, namun dalam tingkatan tertentu menyebabkan berat otak, jumlah sel, ukuran besar sel, dan zat-zat biokimia lainnya lebih rendah daripada anak-anak normal, bahkan IQ anak yang menderita gizi buruk lebih rendah 13,7 poin dibandingkan dengan anak yang normal.

Penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara masih cukup banyak. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2008 menunjukkan jumlah penduduk miskin sebesar 12,55 persen terhadap jumlah penduduk seluruhnya (BPS Sumatera Utara 2008). Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kekurangan pangan melalui

program pengentasan kemiskinan seperti Raskin dan BLT, secara empiris terbukti tidak efektif dan banyak kasus menemui kegagalan. Kondisi ini terjadi terutama disebabkan oleh implementasi program yang tidak mempertimbangkan pendekatan keberlanjutan (*Sustainable Livelihoods Approach*) (Farrington *et al.* 1999). Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan program penanggulangan kekurangan pangan/kelaparan adalah: 1) seringkali mengabaikan kemandirian dan peningkatan kapasitas diri dari penerima bantuan, dan 2) tidak diintegrasikan dengan modal sosial atau energi sosial lokal (sumberdaya manusia, kelembagaan dan jaringan sosial).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian pengembangan model penanggulangan kelaparan pada masyarakat di Sumatera Utara melalui kemandirian keluarga dengan model optimalisasi gizi, serta penguatan modal sosial melalui penguatan kelembagaan dan jaringan sosial.

## **1.2 Tujuan Umum**

Menganalisis model penanggulangan masalah kelaparan pada masyarakat di Sumatera Utara.

## **1.3 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khususnya adalah :

1. menganalisis prevalensi kelaparan pada rumah tangga,
2. menganalisis determinan kelaparan,
3. menganalisis fungsi kelembagaan lokal untuk menanggulangi kelaparan, dan
4. menyusun model penanggulangan masalah kelaparan pada rumah tangga.

## BAB II

# STUDI PUSTAKA

### 2.1

#### Konsep, Dimensi dan Pengukuran Kelaparan

Konsep kelaparan sebagai terjemahan dari *hunger* belum banyak dikenal di Indonesia. Pemahaman akan konsep kelaparan pada tingkat pimpinan instansi terkaitpun masih lemah, ditambah dengan ketidakmauan pemerintah terutama pemerintah daerah untuk memasukkan program evaluasi kelaparan dalam program pembangunan daerah, karena apabila ada kelaparan didaerahnya akan mencoreng eksistensi kepemimpinannya. Kondisi inilah yang menyebabkan sampai saat ini belum ada program yang nyata dalam pemantauan kelaparan.

Kelaparan merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam jangka waktu tertentu karena kurangnya ketersediaan pangan dan ekonomi. Definisi yang hampir sama juga dihasilkan dari kesepakatan Pertemuan 27 November 2002 (BBKP DEPTAN) yaitu kelaparan merupakan ketidak mampuan seseorang memenuhi kebutuhan pangan minimal untuk hidup sehat, cerdas dan produktif, selama dua bulan berturut-turut karena masalah daya beli dan/atau ketersediaan pangan serta nilai-nilai masyarakat. Secara operasional kelaparan merupakan ketidakmampuan seseorang memenuhi 70% kebutuhan energi yang disertai penurunan berat badan karena masalah daya beli dan/atau ketersediaan pangan.

Ada 4 dimensi kelaparan yaitu: 1) efek terhadap kesehatan: dengan melihat fisik dari malnutrisi yang ditunjukkan oleh wasting (BB/TB yang rendah), underweight (BB/U yang rendah), dan stunting (TB/U yang rendah), 2) penderitaan (*suffering*): tidak nyaman dan stress karena kurang pangan, kekhawatiran anak tidak tercukupi pangannya, 3) perubahan perilaku (*behaviour*), *short-term survival*/mekanisme coping,

dan 4) Dampak ekonomi: penurunan produktifitas karena kurangnya energi yang tersedia untuk bekerja (Mason 2003).

Berdasarkan keempat dimensi tersebut, maka kelaparan dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif kelaparan diukur dengan menilai ketidak-tahanan pangan atau kelaparan pada tingkat keluarga maupun individu, melalui 4 jenis keadaan, yang dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Keadaan tersebut adalah: 1) ketidakcukupan energi keluarga, 2) tingkat ketidakcukupan energi, 3) keanekaragaman makanan (*dietary diversity*), dan 4) persen pengeluaran untuk makanan (*% food expenditure*) (Smith 2003).

Secara kualitatif, kelaparan diukur melalui persepsi kelaparan dari individu atau keluarga yang mengalami kelaparan. Pengukuran kualitatif ini bertujuan untuk mengembangkan pengukuran standar bagi pengukuran kelaparan yang lebih sederhana. Meskipun pengukuran ini dilakukan secara kualitatif, tetapi tidak subyektif, karena pengukuran ini dikorelasikan dengan pengukuran kelaparan lainnya yang bersifat kuantitatif. Pada kenyataannya pengukuran kualitatif ini yang sudah dilaksanakan di Amerika dari mulai tahun 1995, sangat bermanfaat bagi kepentingan advokasi, serta analisis kebijakan dan penelitian (Mason 2003).

## 2.3 Konsumsi Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Oleh karena itu pangan harus selalu tersedia pada setiap saat dan tempat dengan mutu yang memadai. Pangan dengan nilai gizi yang cukup dan seimbang, merupakan pilihan terbaik untuk dikonsumsi guna mencapai kesehatan yang optimal. Bagi tubuh, nilai suatu bahan pangan ditentukan oleh zat gizi tentang apa yang dikandungnya. Zat gizi yang terkandung dalam bahan pangan digunakan untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh yang telah rusak serta mengatur proses dalam tubuh. Jadi nilai gizi pangan menyangkut ketersediaannya secara biologis atau dapat tidaknya

zat gizi tersebut digunakan tubuh. Tinggi rendahnya nilai gizi suatu pangan merupakan suatu kriteria yang dapat digunakan untuk menilai mutu pangan tersebut. Selain nilai gizi mutu pangan juga ditentukan oleh keadaan fisik, mikrobiologis serta penerimaan secara indrawi (Rimbawan 1999).

Konsumsi pangan adalah jumlah pangan (tunggal atau beragam) yang dimakan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan tertentu. Tujuan konsumsi pangan adalah untuk mendapatkan zat gizi yang diperlukan tubuh (Hardinsyah dan Martianto, 1989). Kebiasaan mengkonsumsi pangan yang baik akan menyebabkan status gizi yang baik pula, dan keadaan ini akan terlaksana apabila telah tercipta keseimbangan antara banyaknya jenis-jenis zat gizi yang dikonsumsi dengan banyaknya zat gizi yang dibutuhkan tubuh (Suharjo 1990).

Penilaian konsumsi pangan dapat dilakukan secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Pada penilaian secara kualitatif, data yang dikumpulkan lebih menitik beratkan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan kebiasaan makan, seperti frekuensi makan, frekuensi menurut jenis makanan yang dikonsumsi maupun cara memperoleh makanan. Penilaian secara kuantitatif lebih menitik beratkan pada jumlah pangan yang dikonsumsi. Penilaian konsumsi secara kuantitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti cara inventaris (*inventori method*), cara pendaftaran (*food list method*), cara mengingat-mengingat (*food recall*) dan cara penimbangan (*weighing method*).

### **2.3 Perencanaan Pangan Menggunakan Model Linear Programming**

Penelitian-penelitian pernah dilakukan untuk perencanaan pangan menggunakan model linear programming. Stigler pada tahun 1939 mencoba mencari anggaran pengeluaran untuk pangan yang minimum akan tetapi memenuhi 9 unsur gizi dengan melibatkan 77 jenis pangan sebagai peubah. Hasil akhirnya benar-benar menghasilkan solusi yang minimum, akan tetapi hanya 9 pangan yang memenuhi kendala yaitu:

gandum, jagung, susu, mentega, lemak, hati sapi, kol, kentang dan buncis dengan biaya \$39.67. Stigler menyatakan tidak akan merekomendasikan hasil ini karena meskipun biaya minimum tapi jarang ada orang yang mampu makan hanya 9 jenis pangan dalam satu tahun (Gass 1969). Disini terlihat bahwa solusi benar tapi daya terima pasti akan rendah. Penelitian selanjutnya dilakukan Sukandar pada tahun 1990 di kota San Pablo Filipina untuk meminimumkan pengeluaran pangan keluarga menggunakan linear programming stokastik. Pada penelitian ini kecukupan unsur gizi dan kebiasaan pangan penduduk harus terpenuhi. Kebiasaan pangan diperhatikan terlihat dengan dimasukkannya batas minimum dan maksimum konsumsi pangan yang dapat dikonsumsi sebagai kendala, datanya diambil dengan metode *recall* 24 jam. Hasil penelitian berupa rekomendasi jenis pangan yang sebaiknya dikonsumsi berdasarkan golongan umur dan jenis kelamin setiap hari oleh suatu keluarga.

Sumarwan *et al.* (1997) melakukan penelitian untuk menemukan biaya pengeluaran pangan minimum keluarga yang memenuhi kecukupan zat gizi dan kebiasaan pangan menggunakan model linear programming stokastik. Penelitian dilakukan di kelurahan Tegallega, kecamatan Bogor Tengah, kotamadya Bogor; dan di desa Cibitung Kulon, kecamatan Pamijahan, kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penelitian ini menghasilkan kuantitas pangan yang sebaiknya disiapkan setiap bulannya oleh keluarga yang tinggal di kota dan di desa dengan karakteristik yang serupa dengan kelurahan Tegallega dan desa Cibitung Kulon.

Selanjutnya, Akmal (2003) telah menggunakan model goal programming untuk optimasi pemenuhan kecukupan gizi keluarga berdasarkan ketersediaan pangan sebelum dan sesudah krisis ekonomi di Lampung. Ketersediaan pangan diperhatikan dengan cara penetapan batas bawah jenis pangan harus lebih besar atau sama dengan setengah dari ketersediaan sedangkan batas atas ditetapkan lebih kecil atau sama dengan jumlah ketersediaan pangan di propinsi Lampung.

## 2.4 Modal Sosial

### 2.4.1 Konsep dan Ukuran

Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai keseluruhan sumberdaya baik yang aktual maupun potensial yang dimiliki seseorang berkat adanya jaringan hubungan secara kelembagaan yang terpelihara dengan baik, yang mana setiap anggota dalam kelembagaan tersebut memperoleh keuntungan dari modal yang dimiliki secara kolektif (Syahra *et al.* 2000, Winter 2000, [http://www.viet-studies.org/Bourdieu\\_capital.htm](http://www.viet-studies.org/Bourdieu_capital.htm)).

Bourdieu juga menyebutkan bahwa modal sosial yang dibentuk oleh adanya jaringan-jaringan ini, pada kondisi tertentu dapat diubah menjadi modal ekonomi dan biasanya secara kelembagaan terlihat pada kelompok komunitas yang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi dalam suatu masyarakat. Bourdieu menekankan bahwa modal sosial yang dibentuk oleh jaringan hubungan, tidak begitu saja ada secara alami (*natural given*) atau begitu saja ada dalam suatu masyarakat (*social given*). Modal sosial merupakan hasil dari investasi strategi-strategi baik dari tindakan individu maupun kolektif dalam waktu sesaat ataupun berkelanjutan yang bertujuan untuk menstabilkan atau menghasilkan hubungan-hubungan sosial yang secara langsung berguna, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Winter 2000).

World Bank pun telah banyak menghasilkan hasil-hasil penelitian tentang modal sosial. Menurut World Bank, modal sosial mencakup kelembagaan-kelembagaan, hubungan, perilaku, dan nilai yang membangun interaksi antar manusia dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Modal sosial bukan hanya sekedar sekumpulan norma dan nilai yang membangun sebuah masyarakat tapi juga merupakan perekat yang menyatukan masyarakat (Productivity Commission 2003). Berdasarkan konsep modal sosial Putnam maka modal sosial mempunyai tiga pilar utama, yaitu :



## **1. Kepercayaan (trust).**

Dalam membangun ikatan sosialnya, modal sosial dilandasi oleh "trust" (kepercayaan) sehingga modal sosial akan menjadi infrastruktur komunitas yang dibentuk secara sengaja (Fukuyama 2001). Fedderke et al. (1999) menjelaskan bahwa modal sosial mencakup kepercayaan sosial yang memfasilitasi adanya koordinasi dan komunikasi. Koordinasi dan komunikasi yang terjalin ini akan mempengaruhi terhadap tindakan kolektif yang dilakukan dalam rangka mencapai keuntungan kolektif juga. Menurutnya, "trust" dapat mengurangi adanya insentif dalam memanfaatkan kesempatan/peluang ekonomi yang ada. Mollering dalam Dharmawan (2002a, 2002b) menyebutkan bahwa modal sosial mempunyai enam fungsi penting yaitu : (1) kepercayaan dalam arti confidence yang merupakan ranah psikologis individual sebagai sikap yang akan mendorong seseorang dalam mengambil keputusan setelah menimbang resiko yang akan diterima.; (2) kerja sama yang menempatkan trust sebagai dasar hubungan antar individu tanpa rasa saling curiga; (3) penyederhanaan pekerjaan yang memfungsikan trust sebagai sumber untuk membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja kelembagaan-kelembagaan sosial; (4) ketertiban dimana trust sebagai inducing behaviour setiap individu untuk menciptakan kedamaian dan meredam kekacauan sosial; (5) pemelihara kohesivitas sosial yang membantu merekatkan setiap komponen sosial yang hidup dalam komunitas menjadi kesatuan; (6) trust sebagai modal sosial yang menjamin struktur sosial berdiri secara utuh dan berfungsi secara operasional serta efisien.

## **2. Jaringan sosial (networks).**

Productivity Commission (2003), menyebutkan bahwa jaringan sosial merujuk pada kesalinghubungan di dalam kelompok yang biasanya mempunyai atribut tertentu sebagai ciri kebersamaan. Coleman sebagai salah seorang penggagas konsep modal sosial, melihat bahwa jaringan (networks) dalam modal sosial merupakan konsekuensi yang telah ada ketika kepercayaan diterapkan secara meluas dan di dalamnya terdapat

hubungan timbal balik yang terjalin dalam masyarakat dengan adanya harapan-harapan dalam masyarakat (Winter 2000).

Menurut Winter (2000), modal sosial mempunyai dua ukuran utama yaitu : (1) jaringan sosial (*networks*) dan (2) karakteristik jaringan sosial (*networks characteristics*). Jaringan sosial dilihat dengan menggunakan beberapa ukuran yaitu: (a) ikatan informal yang dikarakteristikan dengan adanya kepercayaan dan hubungan timbal balik yang lebih familiar dan bersifat personal seperti pada ikatan pada keluarga, pertemanan, pertetangga; (b) ikatan yang sifatnya lebih umum seperti ikatan pada masyarakat setempat, masyarakat umum, masyarakat dalam kesatuan kewarganegaraan. Ikatan ini dikarakteristikan dengan adanya kepercayaan dan hubungan timbal balik yang sifatnya umum; dan (c) ikatan kelembagaan yang dikarakteristikan dengan adanya kepercayaan dalam kelembagaan yang ada, misalnya pada ikatan dalam sistem kelembagaan dan hubungan kekuasaan. Sementara itu, karakteristik jaringan sosial (*network characteristics*) dapat dilihat dari tiga karakteristik yaitu : bentuk dan luas (*size and extensiveness*), kerapatan dan ketertutupan (*density and closure*), dan keragaman (*diversity*). Karakteristik bentuk dan luas misalnya mengenai jumlah hubungan informal yang terdapat dalam sebuah interaksi sosial, jumlah tetangga mengetahui pribadi seseorang dalam sebuah sistem sosial, dan jumlah kontak kerja. Kerapatan dan ketertutupan sebuah jaringan sosial dapat dilihat misalnya dengan seberapa besar sesama anggota keluarga saling mengetahui teman-teman dekatnya, diantara teman saling mengetahui satu sama lainnya, masyarakat setempat saling mengetahui satu sama lainnya. Keragaman, jaringan sosial dikarakteristikan misalnya dari keragaman etnik teman, dari perbedaan pendidikan dalam sebuah group atau dari pencampuran budaya dalam wilayah setempat.

### **3. Norma Sosial.**

Norma-norma yang membentuk modal sosial dapat bervariasi dari hubungan timbal balik antara dua teman sampai pada hubungan kompleks dan kemudian terelaborasi menjadi doktrin. Selain dibentuk

oleh aturan-aturan tertulis misalnya dalam organisasi sosial, dalam menjalin kerja sama dalam sebuah interaksi sosial juga terkait dengan nilai-nilai tradisional. Nilai-nilai yang dimaksud misalnya kejujuran, sikap menjaga komitmen, pemenuhan kewajiban, ikatan timbal balik dan yang lainnya. Nilai-nilai sosial seperti ini sebenarnya merupakan aturan tidak tertulis dalam sebuah sistem sosial yang mengatur masyarakat untuk berperilaku dalam interaksinya dengan orang lain (Fukuyama 2001). Productivity Commission (2003) mendefinisikan norma sosial dalam kerangka modal sosial sebagai sekumpulan aturan informal seperti nilai-nilai toleransi dan kejujuran secara timbal balik dari pihak-pihak yang berinteraksi. Norma sebagai elemen penting dalam pembentukan modal sosial juga diutarakan oleh Fedderke et al. (1999) yang menyatakan bahwa sebuah asosiasi sosial (organisasi sosial) di dalamnya mengandung norma-norma berupa aturan-aturan informal dan nilai-nilai yang memfasilitasi adanya koordinasi di antara anggota dalam sebuah sistem sosial. Hal ini menurutnya memungkinkan adanya tindakan-tindakan kerja sama dalam memudahkan pekerjaan guna mencapai keuntungan kolektif yang dirasakan bersama.

#### **2.4.2 Modal Sosial sebagai Aset dalam Mengatasi Kelaparan**

Dalam mengatasi kemiskinan, komunitas dapat menjadi aset penting untuk mengurangi kerawanan/kelaparan yang diakibatkan oleh kemiskinan. Aset pada tingkat komunitas ini tergantung pada keberadaan simpanan modal sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama guna mencapai keuntungan kolektif. Sebuah penelitian di Filipina tentang respon rumah tangga terhadap kemiskinan dan kerawanan, dilaporkan bahwa terdapat tiga isu penting dalam menganalisis keberadaan simpanan modal sosial pada tingkat rumah tangga dan komunitas daerah perkotaan, yaitu : (1) kekuatan jaringan sosial yang bersifat timbal balik antar rumah tangga di dalam komunitas; (2) kekuatan hubungan (linkages) antara rumah tangga di desa dan kota sebagai komponen penting dalam jaringan sosialnya; dan (3) peningkatan ketidakefektifan

kekerasan dan perusakan hubungan timbal balik dalam level komunitas (Moser dan McIlwaine 1997).

Modal sosial menjadi penting dalam mengatasi kemiskinan dan mengurangi kerawanan yang diakibatkan oleh kemiskinan tersebut. Meskipun begitu, perlu dipahami bahwa rumah tangga dan kelompok sosial yang berbeda di dalam komunitas mempunyai beragam simpanan modal sosial untuk dimanfaatkan. Modal sosial akan meningkat dalam suatu komunitas miskin bila rumah tangga dalam komunitas tersebut yakin bahwa simpanan modal sosial yang ada di antara mereka apabila dimanfaatkan akan mendatangkan keuntungan bagi rumah tangganya dalam mengatasi kemiskinan. Namun, bila dalam sebuah komunitas terjadi tingkat kekerasan tinggi sehingga anggota komunitas merasa tidak aman, maka kepercayaan di dalam komunitas pun akan menghilang dan bergeser dengan tingkat kerawanan yang lebih besar dan kemungkinan simpanan modal sosial pun akan menurun (Moser dan McIlwaine 1997). Oleh karenanya, berkurangnya simpanan modal sosial dalam komunitas akibat hilangnya rasa kepercayaan dan kerja sama antar anggota komunitas maupun antara komunitas dengan lingkungannya (pemerintah, masyarakat lebih luas) dalam krisis ekonomi yang terjadi, dapat merusak sistem berbasis komunitas untuk memanfaatkan dan memelihara infrastruktur sosial dan fisik (Moser dan McIlwaine 1997).

Di Indonesia, tradisi-tradisi yang bersifat lokalitas seperti gotong royong merupakan sebuah potensi modal sosial yang dapat dijadikan sebagai aset menguntungkan dalam mengatasi krisis ekonomi yang terjadi akibat kemiskinan, termasuk kerawanan pangan. Salah satu contohnya adalah tradisi rereongan sarupi yang terdapat di Propinsi Jawa Barat (Hikmat 2001). Dalam tradisi ini, falsafah yang mendasari adalah silih asih, silih asuh, dan silih asah. Bentuk-bentuk aktivitas sosial sebagai manifestasi nilai-nilai tersebut berupa kerja sama dan gotong royong dalam pembangunan sosial, musyawarah dalam memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan dalam forum rapat maupun pengajian, saling menolong antar tetangga, dan saling mengingatkan apabila ada tetangga

yang berbuat hal-hal yang merugikan masyarakat. Aktivitas-aktivitas tersebut merupakan sebuah modal sosial yang apabila dikembangkan mampu menjadi aset komunitas yang penting untuk mengatasi kemiskinan dan kerawanan pangan yang dialami rumah tangga anggotanya. Falsafah nilai budaya tersebut tentu saja bukan hanya milik masyarakat Jawa Barat saja, namun pada dasarnya berlaku univesal bagi masyarakat Indonesia secara umum.

## 2.5 Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat dapat didefinisikan sebagai pendekatan yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya. Proses tersebut juga dilakukan untuk memperbaiki komunitasnya melalui tindakan kolektif. Pendekatan ini berfokus pada upaya menolong anggota masyarakat (khususnya golongan yang tidak beruntung/tertindas baik oleh kemiskinan maupun diskriminsi kelas sosial, gender) yang memiliki kesamaan minat untuk bekerjasama, mengidentifikasi kebutuhan bersama, dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Suharto, 2005) dalam Sumarti (2007).

Sebagai sebuah proses, pengembangan masyarakat merupakan metode atau pendekatan pembangunan yang menekankan adanya partisipasi dan keterlibatan langsung penduduk dalam proses pembangunan, dimana semua usaha swadaya masyarakat diintegrasikan dengan usaha-usaha pemerintah setempat dan stakeholders lainnya untuk meningkatkan taraf hidup, dengan sebesar mungkin ketergantungan pada inisiatif penduduk sendiri, serta pelayanan teknis sehingga proses pembangunan berjalan efektif (Tonny, 2006). Dengan kata lain pendekatan alternatif ini memperkenalkan berbagai istilah seperti: partisipasi, pemberdayaan, kearifan lokal dan sebagainya. Pendekatan baru ini beranjak dari asumsi bahwa masyarakat pintar di dunianya; merekalah yang paling tahu kebutuhannya, pembangunan apa

yang harus dilakukan untuk memperbaiki kehidupannya. Asumsi lainnya adalah bahwa masyarakat tidak miskin dan lemah, mereka memiliki banyak "daya" yang siap dikembangkan untuk kesejahteraannya.

Dengan demikian pendekatan pembangunan ini bertumpu pada dua elemen pokok, yaitu **kemandirian** dan **partisipasi**. Masyarakat mandiri (karena mereka memiliki daya) menentukan pembangunannya, dan berpartisipasi senyatanya pada seluruh prosesnya. Karena itulah dikatakan bahwa pemberdayaan adalah jalan menuju partisipasi. Tanpa pemberdayaan, masyarakat selalu tergantung; dan tanpa pemberdayaan, yang ada hanyalah partisipasi semu. Kemandirian dalam hal ini menyangkut tiga segi, yaitu kemandirian material (tidak selalu berarti sanggup mencukupi kebutuhan sendiri, tetapi kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan dasar serta cadangan dan mekanisme bertahan pada saat krisis), kemandirian intelektual (pembentukan dasar yang memungkinkan masyarakat menghindari dominasi pihak luar), dan kemandirian manajemen (kemampuan otonom untuk membina diri sendiri, menjalani serta mengelola kegiatan kolektif agar ada perubahan dalam situasi kehidupan). Partisipasi senyatanya merupakan proses aktif, di mana masyarakat berinisiatif, berfikir sendiri, dan menggunakan sarana dan proses yang dapat mereka kontrol sendiri (Lubis, 2007) dalam Sumarti (2007).

Tentu situasi dan perkembangan komunitas akan sangat menentukan bagaimana pendekatan pengembangan masyarakat dilakukan. Artinya, situasi komunitas yang didampingi akan menentukan bagaimana program yang akan diluncurkan. Secara umum, ada tiga bentuk pendekatan yang dilakukan, yaitu: a) **Komunitas sebagai penerima**. Tentu tidak semua komunitas langsung dapat mengorganisir partisipasi untuk mengembangkan dirinya. Dalam banyak situasi, misalnya karena bencana dan keadaan kritis lainnya, komunitas hanya mampu menjadi penerima program yang ditawarkan pihak luar. Tentu, tugas pengembangan masyarakat, sembari meluncurkan program bantuannya, adalah mengorganisasikan masyarakat agar mampu

memasuki tahap kedua; b) **Komunitas sebagai mitra setara**. Pada tahap ini komunitas tidak lagi berada dalam keadaan darurat, dan sudah mampu mengorganisasikan dirinya menghadapi pihak luar. Secara terbatas, komunitas sudah dapat mengelola sumberdaya yang dimilikinya. Namun komunitas ini masih memerlukan dampingan dari pihak luar untuk mengefektifkan pengorganisasian diri; c) **Komunitas sebagai pengelola**. Pada tahapan ini, komunitas sudah mandiri mengelola kegiatan pembangunan dirinya. Tahapan inilah yang dikenal dengan komunitas mandiri di atas.

Ada pelbagai strategi yang dilakukan dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Sedikitnya ada lima komponen kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan masyarakat. Sebenarnya, kelima komponen ini tak dapat dipisahkan, karena saling mempengaruhi. Namun, pada umumnya kegiatan pengembangan masyarakat memilih satu di antara kelima komponen ini (Lubis 2007) dalam Sumarti (2007) : a) **Advokasi (*Advocacy*)**, yaitu upaya untuk mengubah atau mempengaruhi perilaku penentu kebijaksanaan agar berpihak pada kepentingan publik melalui penyampaian pesan-pesan yang didasarkan pada argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, legal, dan moral. Melalui kegiatan advokasi dilakukan identifikasi dan melibatkan semua sektor di berbagai level untuk mendukung program; b) **Pengorganisasian Komunitas (*Community Organizing*)**, agar masyarakat mempunyai arena untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan atas masalah di sekitarnya. Bila terorganisir, masyarakat juga akan mampu menemukan sumberdaya yang dapat mereka manfaatkan. Biasanya, dalam pengembangan masyarakat, dibentuk kelompok-kelompok sebagai wadah refleksi dan aksi bersama anggota komunitas. Pengorganisasian ini bisa dibentuk berjenjang: di tingkat komunitas, antar komunitas di tingkat desa, antar desa di tingkat kecamatan dan seterusnya sampai ke tingkat nasional bahkan regional; c) **Pengembangan Jaringan (*Networking atau Alliance Building*)**, artinya menjalin kerjasama dengan pihak lain (individu, kelompok, dan atau organisasi) agar bersama-sama saling mendukung

untuk mencapai tujuan. Jaringan dan saling percaya (*trust*) merupakan salah satu unsur penting dari modal sosial, sehingga menjadi komponen penting dalam pengembangan masyarakat.

Pada komunitas yang mempunyai jaringan yang baik, sumber daya yang ada pada seluruh komponen komunitas dan komponen lain yang terbangun dalam jaringan akan dapat dimanfaatkan bersama-sama; **d) Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*)**, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat di segala bidang (termasuk untuk advokasi, mengorganisir diri sendiri, dan mengembangkan jaringan). Sumpeno (tt) mengartikan pengembangan kapasitas sebagai peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi, dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Peningkatan kemampuan individu mencakup perubahan dalam hal pengetahuan, sikap, dan keterampilan; peningkatan kemampuan kelembagaan meliputi perbaikan organisasi dan manajemen, keuangan, dan budaya organisasi; peningkatan kemampuan masyarakat mencakup kemandirian, keswadayaan, dan kemampuan mengantisipasi perubahan; **e) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi**, menyangkut proses pengelolaan informasi, pendidikan masyarakat, dan penyebaran informasi untuk mendukung keempat komponen di atas. Pengelolaan informasi juga menyangkut mencari dan mendokumentasikan informasi agar informasi selalu tersedia bagi masyarakat yang memerlukannya. Kegiatan edukasi perlu dilakukan agar kemampuan masyarakat dalam segala hal meningkat, sehingga masyarakat mampu mengatasi masalahnya sendiri setiap saat. Untuk mendukung proses komunikasi, berbagai media komunikasi (modern – tradisional; massa – individu – kelompok) perlu dimanfaatkan dengan kreatif.

## 1. Pembangunan Masyarakat Desa

Pendekatan pembangunan di negara-negara berkembang dan termasuk di Indonesia (terutama di masa Orde Baru) pada kenyataannya cenderung menggunakan pendekatan modernisasi dengan indikator



keberhasilannya diukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sebagaimana dikemukakan oleh Korten dan Syahrir (1988), walaupun tujuan dasarnya untuk mensejahterakan rakyat, namun karena strategi, metodologi dan implementasinya berpusat pada produksi, maka pada akhirnya kurang memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Hal ini terjadi karena tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak secara otomatis menjamin tercapainya pemerataan hasil atau manfaatnya secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mulai disadari oleh para pengambil keputusan kebijaksanaan pembangunan di era reformasi dan otonomi daerah ini, dimana pendekatan pembangunan nasional mulai bergeser pada "ekonomi kerakyatan". Sebagaimana dikemukakan oleh Mubyarto (2002), ekonomi kerakyatan itu merujuk pada sila ke-4 Pancasila, yang menekankan pada sifat demokratis sistem ekonomi Indonesia. Dalam demokrasi ekonomi Indonesia, produksi tidak hanya dikerjakan oleh sebagian warga, tetapi oleh semua warga masyarakat dan hasilnya dibagikan kepada semua anggota masyarakat secara adil dan merata (penjelasan pasal 33 UUD 1945).

#### **a. Pendekatan Pembangunan di Indonesia**

Berbagai masalah yang terkait atau bahkan ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan di Indonesia merupakan sebuah fakta yang tidak dapat dibantah tentang kemungkinan adanya kesalahan dalam *ideologi*, *strategi* dan juga *implementasi* pembangunan. Sebagaimana dikemukakan Juliantara (2000), terdapat pemahaman di kalangan pemerintah dan pihak-pihak lain terkait bahwa pembangunan diartikan sebagai serangkaian upaya untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, melalui langkah pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan dukungan stabilitas politik yang tinggi (mantap).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dalam pemahaman tentang pembangunan seperti ini, terdapat asumsi : (1) bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dengan sendirinya membawa perbaikan hidup masyarakat kebanyakan, terutama bagi kaum miskin; (2) bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi berarti roda produksi telah membuka lapangan kerja dan menggairahkan pasar sehingga bisa menjawab kebutuhan masyarakat; (3) asumsi bahwa politik atau dinamika politik merupakan hambatan bagi gerak ekonomi. Asumsi ini didasarkan apa yang disebut

Pandangan seperti di atas adalah pandangan yang lahir dari dan didasari oleh paradigma *positivisme* yang melekat pada perspektif modernisasi. Proses modernisasi meliputi proses transformasi model *struktur, kultur, pengetahuan, modal* dan juga *teknologi* dari luar (negara maju) ke dalam sebuah masyarakat di negara-negara Dunia Ketiga. Proses transformasi ini dapat berjalan dengan baik, jika individu-individu di dalam masyarakat juga mengalami *transformasi kepribadian*.<sup>2</sup> Dan nampaknya, untuk kasus proses modernisasi di Indonesia, transformasi kepribadian ini tidak terjadi, karena upaya-upaya pembangunan (modernisasi) lebih ditekankan pada aspek-aspek fisik (perangkat keras) seperti fasilitas transportasi, fasilitas komunikasi, gedung sekolah, dll. Padahal sebagaimana dikemukakan oleh Ogburn dalam Strasser (1981) dengan teorinya "*Cultural Lag*", bahwa proses laju perubahan dalam kebudayaan material lebih cepat dibandingkan dengan perubahan-perubahan dalam kebudayaan non-material (kultural), seperti kelembagaan (adat, kepercayaan, filsafat, hukum dan pemerintahan). Adanya kelambatan (*lag*) tersebut akan menyebabkan terjadinya kegagalan menyesuaikan (*maladjustment*) di dalam masyarakat yang mengarah pada terjadinya perubahan sosial dalam struktur yang adaptif (seperti gegar budaya, keresahan atau bahkan konflik sosial).

Menurut Israel (1990), timbulnya kecenderungan penekanan pembangunan terhadap aspek-aspek fisik disebabkan oleh dua alasan pokok yaitu ; *pertama*, teori pembangunan dan praktek telah begitu lama berada di tangan para ahli ekonomi, mengikuti tradisi yang memfokuskan

---

kemacetan ekonomi di masa rezim Soekarno, dan masyarakat dipandang terlalu sibuk berpolitik ; serta (4) bahwa realitas kebudayaan masyarakat, dipandang sebagai satu kendala kemajuan, oleh sebab itu, gerak ekonomi diharapkan dapat mengubah kebudayaan lama (tradisional) dan menggantikan dengan kebudayaan baru (modern). Dalam hal ini gerak masyarakat dianggap sebagai suatu gerak linier (Juliantara, 2000).

<sup>2</sup> Transformasi kepribadian menuju ke arah kepribadian dan sikap yang *rasional* seperti halnya sikap ; empati (*emphaty*), mobilitas dan partisipasi yang tinggi (*mobility and high participation*). Transformasi ini di promosikan dan di langgengkan oleh sebuah struktur kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Modernisasi kepribadian mengarahkan pergaulan sosial dan kultural masyarakat kepada budaya berprestasi (*achievement*), terwujudnya sikap atau jiwa universal (*universalistic*) dan berorientasi pada tujuan (*orientation*) (Dube, 1988).

Pandangan seperti di atas adalah pandangan yang lahir dari dan didasari oleh paradigma *positivisme* yang melekat pada perspektif modernisasi. Proses modernisasi meliputi proses transformasi model *struktur, kultur, pengetahuan, modal* dan juga *teknologi* dari luar (negara maju) ke dalam sebuah masyarakat di negara-negara Dunia Ketiga. Proses transformasi ini dapat berjalan dengan baik, jika individu-individu di dalam masyarakat juga mengalami *transformasi kepribadian*.<sup>2</sup> Dan nampaknya, untuk kasus proses modernisasi di Indonesia, transformasi kepribadian ini tidak terjadi, karena upaya-upaya pembangunan (modernisasi) lebih ditekankan pada aspek-aspek fisik (perangkat keras) seperti fasilitas transportasi, fasilitas komunikasi, gedung sekolah, dll. Padahal sebagaimana dikemukakan oleh Ogburn dalam Strasser (1981) dengan teorinya "*Cultural Lag*", bahwa proses laju perubahan dalam kebudayaan material lebih cepat dibandingkan dengan perubahan-perubahan dalam kebudayaan non-material (kultural), seperti kelembagaan (adat, kepercayaan, filsafat, hukum dan pemerintahan). Adanya kelambatan (*lag*) tersebut akan menyebabkan terjadinya kegagalan menyesuaikan (*maladjustment*) di dalam masyarakat yang mengarah pada terjadinya perubahan sosial dalam struktur yang adaptif (seperti gegar budaya, keresahan atau bahkan konflik sosial).

Menurut Israel (1990), timbulnya kecenderungan penekanan pembangunan terhadap aspek-aspek fisik disebabkan oleh dua alasan pokok yaitu ; *pertama*, teori pembangunan dan praktek telah begitu lama berada di tangan para ahli ekonomi, mengikuti tradisi yang memfokuskan

---

kemacetan ekonomi di masa rezim Soekarno, dan masyarakat dipandang terlalu sibuk berpolitik ; serta (4) bahwa realitas kebudayaan masyarakat, dipandang sebagai satu kendala kemajuan, oleh sebab itu, gerak ekonomi diharapkan dapat mengubah kebudayaan lama (tradisional) dan menggantikannya dengan kebudayaan baru (modern). Dalam hal ini gerak masyarakat dianggap sebagai suatu gerak linier (Juliantara, 2000).

<sup>2</sup> Transformasi kepribadian menuju ke arah kepribadian dan sikap yang *rasional* seperti halnya sikap ; empati (*emphaty*), mobilitas dan partisipasi yang tinggi (*mobility and high participation*). Transformasi ini di promosikan dan di langgengkan oleh sebuah struktur kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Modernisasi kepribadian mengarahkan pergaulan sosial dan kultural masyarakat kepada budaya berprestasi (*achievement*), terwujudnya sikap atau jiwa universal (*universalistic*) dan berorientasi pada tujuan (*orientation*) (Dube, 1988).

pada alokasi sumberdaya dan alokasi yang berdasarkan pada *efisiensi*, bukan pada cara-cara yang paling *efektif* dalam menggunakan sumberdaya yang sudah dialokasikan. Strategi pembangunan penekanannya masih pada *perencanaan* dan *penaksiran* bukan pada *pelaksanaan*, lebih kepada *investasi* serta *kebijakan* bukannya pada *operasi*. Selain itu kecondongan kuantitatif dalam ilmu ekonomi dan pembangunan ekonomi selama dekade belakangan ini lebih menguntungkan masalah analisa lokasi sumberdaya, seperti perencanaan dan prakiraan dibandingkan dengan masalah pelaksanaan, yang memang kurang dapat dikuantifikasi. Kedua, terbaikannya masalah-masalah kelembagaan karena hal ini merupakan bidang yang rumit. Bidang-bidang seperti ilmu manajemen dan administrasi pembangunan belum cukup berhasil dalam mengatasi masalah di negara-negara sedang berkembang. Tujuan utama ilmu manajemen telah terlanjur mengarah pada masalah-masalah sektor swasta di negara maju, dan telah menemui kesulitan dalam mengadaptasikannya ke dalam kegiatan publik atau campuran dari lingkungan yang lebih buruk dan lebih politis.

Kegandrungan yang berlebihan terhadap ekonomi makro juga terjadi pada sarjana-sarjana ilmu ekonomi di Indonesia.<sup>3</sup> Ketika teori dan praktek pembangunan berada di tangan para sarjana (ahli) ekonomi,

---

<sup>3</sup> Menurut Sri Edi Swasono (2003), ilmu ekonomi yang diajarkan di fakultas-fakultas ekonomi masih menganut faham kompetitivisme belaka. Di samping hal ini berarti banyak mengabaikan faham kooperativisme, ilmu ekonomi yang diajarkan itupun bersifat neo-klasikal (*free competition-based economy*) berdasarkan inisiatif dan kebebasan individu (*individualisme/liberalisme*). Dari sinilah paham dan sistem ekonomi kapitalis mendapat tempat dan pembenaran dengan mudahnya di ruang-ruang kelas. Kepentingan pribadi mencapai *equilibrium*-nya dalam wujud tercapainya kepuasan maksimal dan laba maksimal, atau pun biaya minimal dan kerugian minimal dalam dimensi mono-utilitas. Dari paham kompetitivisme itu maka lahirlah persaingan-bebas sempurna dan pasar-bebas sebagai konsekuensi logisnya. Setiap tindakan ekonomi arahnya adalah mencapai nilai-tambah ekonomi. Dari sini lahirlah konsepsi dan orientasi pertumbuhan ekonomi (*growth*), yaitu ketika ekonomi mikro mentransformasi diri menjadi ekonomi makro. Dari sini pula maka kapitalisme global (*globalisasi*) mudah diterima di ruang-ruang kelas tanpa pencermatan (*scrutiny*) dan kewaspadaan (*alertness*).”

maka secara otomatis perencanaan pembangunan cenderung menggunakan pendekatan ekonomi makro. Padahal, sebagaimana dikemukakan Uphoff (1997), rekomendasi-rekomendasi makro ekonomi yang biasanya tergabung (*incorporated*) dalam paket “penyesuaian struktural” (*structural adjustment*) hanya memberi dampak yang sangat kecil terhadap masyarakat miskin di pedesaan, dan sedikit (bahkan tidak sama sekali) membangun kemampuan organisasi lokal dan menengah untuk *merencanakan*, *memonitor* dan *mengelola* berbagai perbaikan-perbaikan tarap hidup masyarakat dan mata pencahariannya. Berbagai studi kasus menunjukkan bahwa ketika masyarakat lokal diberi kapasitas (kesempatan) yang sangat besar untuk mengelola (sumberdaya) yang ada disekitar mereka, ternyata mereka mampu untuk memasukan inovasi-inovasi baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan mempertinggi kualitas hidupnya. Ketika pihak luar memberikan banyak investasi terhadap kapasitas kelembagaan (*organizational capability*), maka hal itu akan memberikan keuntungan yang berlipat. Pendekatan-pendekatan ekonomi makro, nyata-nyata kurang mampu menjangkau dan menyelesaikan masalah masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan. Ketika kebijakan pembangunan ekonomi tidak dapat menyelesaikan masalah kemiskinan di pedesaan, maka dapat dikatakan secara umum kebijakan pembangunan tersebut telah gagal.

Aktivitas pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk modernisasi maka indikator keberhasilannya dilihat melalui ukuran-ukuran kuantitatif seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan negara (GDP) atau tingkat produktivitas. Model-model indikator keberhasilan pembangunan ekonomi seperti itu tidak dapat menggambarkan realitas (kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat) yang sebenarnya. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu negara, tidak serta merta berarti pula telah tercapai upaya-upaya pemerataan bagi masyarakat dalam menikmati hasil-hasil pertumbuhan ekonomi secara adil. Jika sarana-sarana atau modal produksi tidak dimiliki secara “merata” dan adil oleh seluruh lapisan masyarakat, maka bisa jadi

angka-angka tersebut bersifat semu karena manfaat atau keuntungan dari surplus produksi sebagian besar terkonsentrasi pada sekelompok kecil masyarakat. Sedangkan sebagian besar dari masyarakat hanya menikmati sedikit dari hasil-hasil pertumbuhan ekonomi, bahkan ada diantaranya yang tidak menikmati sama sekali. Fakta yang paling mudah ditemui di Indonesia saat ini yaitu adanya fenomena munculnya wabah busung kekaparan (*marasmus*) di wilayah yang memiliki infrastruktur yang baik serta kekayaan sumberdaya alam yang melimpah, seperti kasus *marasmus* di Desa Mulyaharja (Kotamadya Bogor) pada tahun 1999 (Sonaji, 2000). Satu-satunya jawaban mendasar untuk masalah tersebut adalah segera membenahi berbagai ketimpangan dan kemiskinan struktural yang ada di dalam masyarakat tersebut, baik itu di bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi. Jika tidak demikian, maka berbagai upaya penyelesaian masalah tersebut hanya mampu menyelesaikan masalah pada tataran gejala atau permukaan (*symptom*) dan tidak pada akar masalah.

#### **b. Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat Desa**

Kebijakan pembangunan (modernisasi) pedesaan di negara-negara berkembang yang cenderung bertumpu pada pertumbuhan ekonomi terbukti belum berhasil mengurangi kemiskinan di negara berkembang (Kasryno dan Stepanek, 1985). Demikian pula halnya dengan pembangunan pertanian di pedesaan Indonesia, meskipun berhasil meningkatkan produktivitas pertanian, namun tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas diri petani (terutama petani gurem) untuk menolong dirinya sendiri. Sebagaimana dikemukakan Sajogjo (1982), petani kecil masih dihadapkan pada resiko-resiko seperti lemahnya akses mereka pada kredit murah yang disediakan pemerintah dan mereka tidak mampu membebaskan dirinya dari ketergantungan dan lilitan hutang dari petani kaya dan tengkulak. Meskipun modernisasi pertanian di pedesaan telah memulai membimbing petani untuk mengorganisasikan dirinya agar dapat menolong dirinya sendiri, seperti melalui penyuluhan dan pembentukan koperasi petani (KUD), namun terbukti upaya tersebut belum memberi hasil yang memuaskan.

Kondisi masyarakat miskin di pedesaan Indonesia tidak mengalami banyak perubahan dan bahkan kondisinya semakin memburuk sebagai dampak krisis ekonomi di tahun 1997. Kondisi perekonomian masyarakat pedesaan di negara berkembang, sebagaimana dikemukakan oleh Boeke (1953) masih dicirikan dengan adanya dualisme ekonomi. Masyarakat pedesaan di Indonesia (terutama Jawa) memang tidak sepenuhnya persis sebagaimana tesis yang dikemukakan oleh Geertz (1974) tentang involusi pertanian, karena pada dasarnya petani itu selain pekerja keras juga kreatif dalam mensiasati kerasnya kehidupan. Breman dan Gunardi (2004) menunjukkan bahwa keterbatasan sektor pertanian dipedesaan untuk menutupi kebutuhan hidup telah mendorong masyarakat desa untuk mencari mata pencaharian ganda. Bahkan pada perkembangan lebih lanjut, kecenderungan ini meluas dan melintasi batas-batas geografis desa, yaitu hingga ke perkotaan, dan bahkan hingga ke manca negara untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW). Satu hal yang menjadi ciri dasar, bahwa posisi petani sebagai strata bawah juga terbawa pada jenis-jenis pekerjaan di perkotaan dan di manca negara, dimana karakteristik pekerjaan mereka didominasi oleh pekerjaan-pekerjaan kelas bawah dan rentan terhadap pengusiran, eksploitasi, penindasan dan bahkan perkosaan. Kondisi ini membuktikan bahwa posisi petani kecil dan keluarganya masih termarginalkan baik dalam tataran lokal, nasional, maupun global.

Kondisi keterpurukan mayoritas petani kecil di pedesaan ini membutuhkan perhatian serius dari semua kalangan terutama pemerintah. Sebagaimana dikemukakan Tjondronegoro dalam kata pengantarnya untuk buku karya Breman dan Wiradi (2004), pasar tenaga kerja untuk petani kecil dan keluarga miskin di pedesaan tidak mempunyai kelenturan. Dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah, sulit bagi mereka untuk melakukan mobilitas horisontal apalagi vertikal, pun untuk jenis-jenis pekerjaan di sektor informal. Posisi terdesak dari mayoritas petani ini sangat membahayakan bagi keamanan dan ketahanan nasional. Dalam tataran lokal dan daerah, kondisi ini akan

mendorong maraknya tindak kejahatan. Namun jika kondisi ini terus berlangsung, hingga melampaui batas-batas kesabaran dan kesadaran, maka bukan tidak mungkin akan menimbulkan pembangkangan dan bahkan hingga pemberontakan, yang cakupannya tidak hanya meliputi geografis lokal kedaerahan, bahkan nasional.<sup>4</sup> Tentunya kondisi tersebut tidaklah kita harapkan terjadi, oleh karena itu bagi pemerintahan sekarang, sebagaimana dikemukakan oleh Tjondronegoro tantangan yang terberat adalah masalah kemiskinan di pedesaan sebagai akibat pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung. Sehingga dibutuhkan model pembangunan baru, yang mampu memecahkan masalah pengangguran dan kemiskinan struktural dalam kurun waktu yang sependek mungkin.

---

<sup>4</sup> Seperti telah dikemukakan oleh Kartodirdjo (1984), untuk membangkitkan kekuatan revolusioner petani yang tengah tertindas ini, yang dibutuhkan hanyalah seseorang pemimpin kharismatik yang mampu menyatukan dan membangkitkan kesadaran mereka bahwa mereka sedang tertindas dan selanjutnya mennggerakan mereka untuk bertindak.



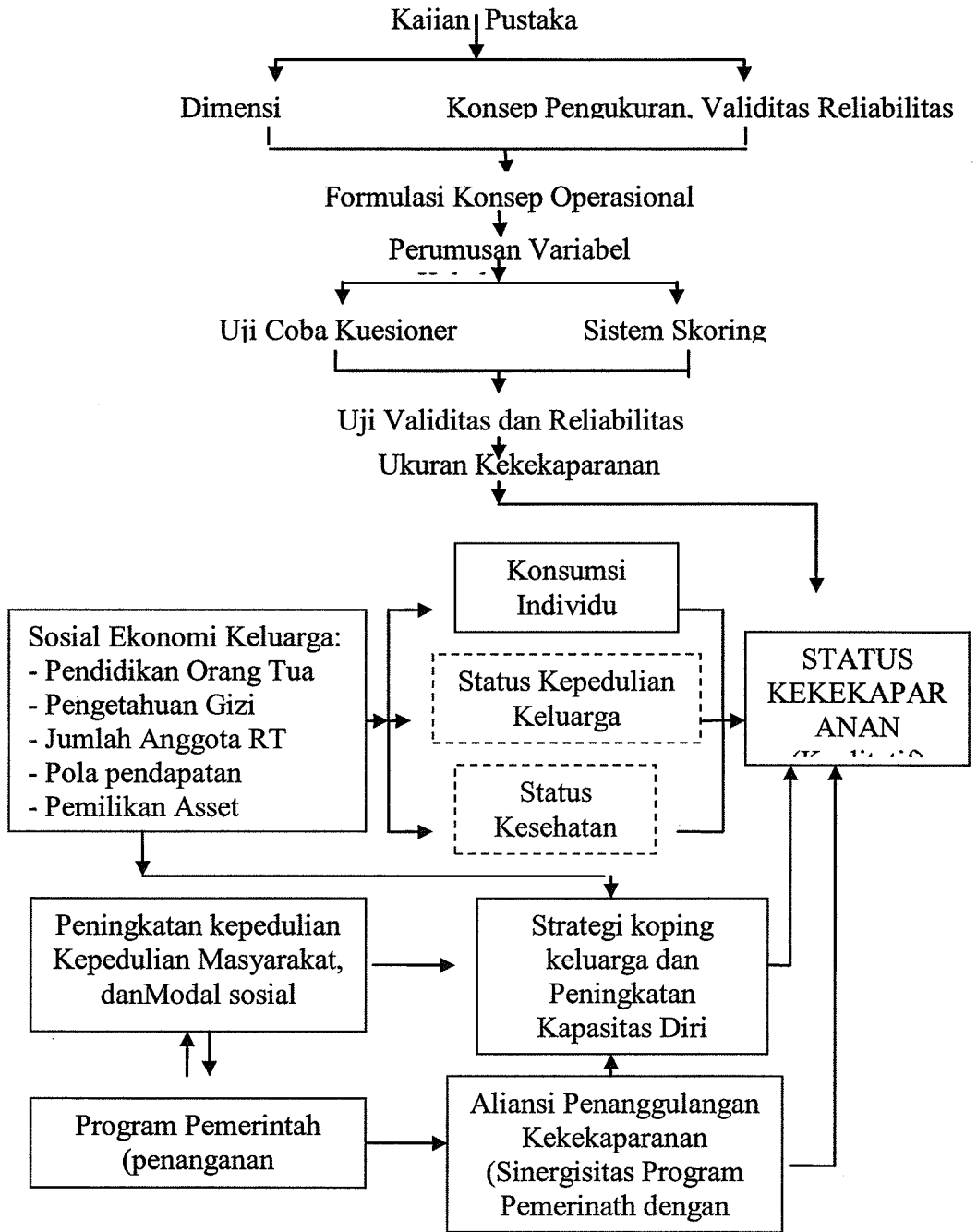
## BAB III

### KERANGKA KONSEPTUAL

**P**enelitian ini akan merumuskan alternatif model penanggulangan masalah kelaparan (Gambar 1). Dari gambar 1 terlihat bahwa penelitian ini menghasilkan rumusan ukuran kelaparan kualitatif. Ukuran kelaparan kualitatif dikembangkan dengan maksud penyederhanaan dalam pengukuran kelaparan dibandingkan ukuran kuantitatif. Pada awal penelitian diperoleh hasil indikator dan determinan kelaparan spesifik keluarga.

Selanjutnya penelitian ini, berdasarkan determinan yang telah dirumuskan, data konsumsi dan data sosial ekonomi, dan pengambilan data modal sosial, pola hubungan kerja dan kelembagaan setempat maka akan dikembangkan model optimalisasi gizi dan penguatan modal sosial untuk penanggulangan kelaparan. Model optimalisasi gizi dibuat dengan menggunakan model Goal Programming berdasar pada data konsumsi dan pendapatan yang diperoleh pada awal penelitian. Kemudian model tersebut akan diterapkan pada masyarakat tersebut, kemudian di monitor dan dievaluasi, yang pada akhirnya akan menyempurnakan model yang dibangun.

Untuk penguatan modal sosial /kelembagaan, metode yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif (data yang digunakan data kuantitatif dan data kualitatif) dengan studi kasus, pendekatan partisipatif serta analisis stakeholder dan musyawarah. Pendekatan kualitatif (diskusi dan wawancara mendalam) untuk mengkaji dinamika masyarakat dan menganalisis kelembagaan lokal. Pendekatan partisipatif untuk menemukan model penanggulangan kelaparan yang dirumuskan oleh komunitas itu sendiri.



**Gambar 1. Bagan Alur Penelitian**

# BAB IV

## METODE PENELITIAN

### 4.1

#### Waktu dan Tempat

Penelitian akan dilakukan pada bulan Desember 2008 sampai dengan bulan November 2009. Penelitian akan dilakukan di daerah Kota Medan yaitu di Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota dan Kelurahan Tegalsari Mandala I Kecamatan Medan Denai. Lokasi penelitian diambil secara purposif berdasarkan berdasarkan tingkat kemiskinan sedang (15 - 20%).

#### 4.2 Teknik Penarikan Sampel

Dari desa terpilih telah dipilih secara stratified random sampling sebanyak 120 keluarga miskin yang meliputi pra KS dan KS 1,2,3. jumlah keluarga pra KS dan KS 1,2,3 dengan jumlah masing-masing kategori proporsional.

#### 4.3 Jenis dan Cara Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data dan strategi yang digunakan dalam melakukan penelitian ini meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

##### a. Pengumpulan data penunjang

Data penunjang dipergunakan untuk mereview laporan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan/kerawanan pangan/kelaparan dan mengetahui gambaran tentang karakteristik sosial, budaya dan ekonomi masyarakat setempat. Data tersebut diperoleh dari berbagai dokumen (buku-buku laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan/kerawanan pangan/kelaparan, laporan penelitian, arsip-arsip) seperti potensi desa, laporan kecamatan dan kabupaten dalam angka, serta laporan dari berbagai instansi terkait.

b. Pengumpulan data kuantitatif

Untuk mendapatkan data kuantitatif dilakukan survai terhadap 120 keluarga di di Kecamatan Medan Kota dan Kecamatan Medan Denai. Data kuantitatif sangat diperlukan terutama untuk menggambarkan Food coping dari keluarga pada saat kekurangan pangan.

c. Pengumpulan data kualitatif

Data kualitatif diperlukan untuk mengungkap fenomena sosial secara lebih mendalam berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan/kerawanan pangan/kelaparan, kelembagaan lokal, dan pola hubungan kerja. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan pendekatan kualitatif seperti : wawancara mendalam, pengamatan berpartisipasi dan *Focus Group Discussion* (FGD). Dalam penyusunan model penanggulangan kelaparan dilakukan dengan teknik perencanaan partisipatif, mencakup: analisis prioritas masalah, analisis stakeholders, dan penyusunan kerangka logis. Jenis dan cara pengumpulan data dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis data dan cara pengambilannya

No	Jenis	Sumber dan Cara Pengambilan Data
1	Data Strategi <i>coping survival</i> rumah tangga	Wawancara dengan menggunakan kuesioner
2	Pola nafkah keluarga dan akses terhadap permodalan atau program pemerintah	Wawancara dengan menggunakan kuesioner
3	Modal sosial masyarakat, kelembagaan dan Pola hubungan kerja	Wawancara dan FGD
4	Data kebijakan serta program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan/kelaparan	Laporan-laporan penelitian dan dari laporan instansi terkait

#### 4.4 Pengelolaan dan pengendalian kualitas Data

Pengelolaan dan pengendalian kualitas data dilakukan melalui beberapa langkah, sebagai berikut:

1. Melaksanakan standarisasi enumerator yang akan mengambil data dilapangan, melalui pelatihan intensif. Pelatihan dilakukan selama dua hari di Departemen GMSK-Faperta, IPB, oleh tim peneliti baik dari IPB, Deptan dan BPS.
2. Melakukan uji coba kuesioner pada keluarga yang sesuai dengan kriteria penelitian, di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Hasil uji coba didiskusikan kembali untuk penyempurnaan kuesioner.
3. Melakukan pemantauan terhadap kerja enumerator di lapangan selama pengumpulan data, oleh tim peneliti. Selama pemantauan kuesioner diperiksa, bila ada kesalahan pengisian maka diperbaiki dan diminta untuk didata ulang pada responden yang bersangkutan.
4. Melakukan pengawasan mutu data selama entri dan pengolahan data melalui pengecekan data kuesioner, hasil entri data dan hasil olah data.

#### 4.4 Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dan kuantitatif. Secara umum analisis data kualitatif yang digunakan adalah analisis kebijakan (evaluasi program), analisis kelembagaan, analisis potensi dan penentuan prioritas masalah tingkat komunitas. Analisis data kualitatif dilakukan melalui proses penyaringan data, penggolongan/pengkategorian, penyimpulan serta uji ulang. Dalam proses analisis data kualitatif, setiap interpretasi logis atas data, akan dilengkapi dengan data-data kuantitatif sepanjang data tersebut dapat mendukung, mempertajam dan memperjelas interpretasi.

Analisis data kuantitatif dilakukan secara deskriptif melalui tabulasi silang. Data kuantitatif yang dikumpulkan dianalisis dengan metode SEM (*Structural Equation Model*) yang sesuai dengan asumsi bahwa semua variabel tersebut adalah variabel yang tidak memiliki nilai sendiri, dan hanya dapat diukur dari keterkaitan antar variabelnya.

## 4.5 Analisis Data Identitas keluarga

Data identitas keluarga meliputi data kelompok umur, golongan indeks massa tubuh (IMT), penghasilan keluarga, biaya hidup untuk pangan, biaya hidup untuk nonpangan, serta jenis pengeluaran nonpangan.

Kelompok umur dibagi menjadi 6 kelompok yaitu bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa dan lansia. Selanjutnya dari informasi yang tersedia dibuat tabel dua arah untuk melihat gambaran jumlah responden (n), persentase (%), dan persentase kumulatif masing-masing keluarga.

Nilai peubah penghasilan keluarga, alokasi biaya hidup untuk pangan, alokasi biaya hidup untuk nonpangan per bulan, dibuat tabel dua arah dengan maksud untuk melihat n dan % tiap kelompok masing-masing peubah dari keluarga. Lalu dicari hubungan diantara peubah-peubah ini dengan menggunakan korelasi Spearman.

## 4.6 Analisis Strategi *Food Coping*

Strategi *Food Coping*. Pengolahan data strategi *food coping* dilakukan dengan mengelompokkan jawaban dari responden kedalam tiga kelompok strategi yaitu :

- Kelompok I : Mencari pekerjaan sampingan, membeli makanan yang lebih murah harganya, mengurangi jenis pangan yang dikonsumsi (misalnya dari 3 menjadi 2 jenis), mengubah prioritas pembelian pangan, membeli makanan yang nilainya lebih rendah (tadinya nasi, menjadi singkong), perubahan distribusi makan (prioritas ibu untuk anak-anak), mengurangi porsi makan, mengurangi frekuensi makan per hari dan melewati hari-hari tanpa makan.
- Kelompok II : Penambahan akses dengan segera pada pangan yaitu : menerima bantuan pangan dari pemerintah, menerima makanan dari saudara, menerima kupon untuk raskin.
- Kelompok III : Penambahan akses segera untuk beli pangan yaitu : menggadaikan aset untuk membeli kebutuhan pangan, menjual

aset yang tidak produktif, meminjam uang, membeli pangan dengan hutang.

Strategi yang dilakukan kemudian dirating ke dalam tiga skala dari usaha yang paling rendah (skala 1) sampai usaha yang paling ekstrim (skala 3). Skala ini juga merupakan pembobotan, dimana skala 1 mencerminkan bobot 1 dan seterusnya.

Skala 1 : Mencari pekerjaan sampingan, perubahan pola kebiasaan makan.

Skala 2 : Penambahan akses dengan segera pada pangan.

Skala 3 : Penambahan akses segera untuk membeli pangan.

*Coping* selanjutnya diskor dengan menjumlahkan jawaban pada tiap skala dan kemudian dikalikan dengan bobot dan selanjutnya dijumlahkan ketiga skala tersebut. Jumlah terbesar yang diperoleh menunjukkan kelaparan.

$$\text{Skor koping} = (k1 \times 1) + (k2 \times 2) + (k3 \times 3)$$

Dimana:

k1 = jumlah tindakan yang dilakukan pada skala 1

k2 = jumlah tindakan yang dilakukan pada skala 2

k3 = jumlah tindakan yang dilakukan pada skala 3

#### 4.7 Analisis Data dengan Model Goal Programming

Data kebiasaan frekuensi konsumsi pangan diperoleh menggunakan kuesioner, data ini adalah informasi mengenai berapa kali anggota keluarga per hari, per minggu, per bulan, mengkonsumsi pangan tertentu. Kuesioner juga menggali informasi mengenai banyaknya pangan untuk satu kali konsumsi dan harga pangan dalam URT. Banyaknya pangan dalam URT dikonversi ke satuan berat dalam gram, hal ini dilakukan dengan penimbangan pangan atau informasi literatur.

Data konsumsi pangan (KP) dihitung dengan cara:

$$KP = \frac{F * BP}{100 * BB\_ideal}$$

Keterangan:

KP = konsumsi pangan (100 gram per kg berat badan per minggu)

F = frekuensi makan per minggu (... kali per minggu)

BP = berat pangan untuk satu kali makan dalam gram

$$BB\_ideal (Berat\ badan\ ideal[kg]) = 22 * TB^2 (meter)$$

Rancangan menu makanan didasarkan atas karakteristik, pola konsumsi pangan, AKG dan biaya konsumsi pangan. Rancangan menu dibangun dengan menggunakan *goal programming* sebagai berikut:

*Fungsi tujuan*

Minimumkan :

$$z = db_1^* + db_2^* + db_3^* + db_4^* + db_5^* + db_6^* + db_7^* + da_1^* + da_2^* + da_3^* + da_4^* + da_5^* + da_6^* + da_7^*$$

*Kendala-kendala (sasaran dan pembatas)*

1. Berdasarkan tingkat konsumsi zat gizi

Energi :

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1p}x_p + db_1^* - da_1^* = g_1$$

Protein :

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2p}x_p + db_2^* - da_2^* = g_2$$

Vitamin A :

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \dots + a_{3p}x_p + db_3^* - da_3^* = g_3$$

Vitamin C :

$$a_{41}x_1 + a_{42}x_2 + a_{43}x_3 + \dots + a_{4p}x_p + db_4^* - da_4^* = g_4$$

Kalsium :

$$a_{51}x_1 + a_{52}x_2 + a_{53}x_3 + \dots + a_{5p}x_p + db_5^* - da_5^* = g_5$$

Zat besi :

$$a_{61}x_1 + a_{62}x_2 + a_{63}x_3 + \dots + a_{6p}x_p + db_6^* - da_6^* = g_6$$

2. Berdasarkan kemampuan biaya untuk pangan dan harga masing-masing pangan

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \dots + a_px_p + db_7^* - da_7^* = y$$



3. Batasan kebiasaan kuantitas pangan yang dikonsumsi berdasarkan  $Q_1$  (kuartil bawah) dan  $Q_3$  (kuartil atas) :

$$b_{11} \leq x_1 \leq b_{21}, b_{12} \leq x_2 \leq b_{22}, b_{13} \leq x_3 \leq b_{23}, \dots, b_{1p} \leq x_p \leq b_{2p}$$

Selanjutnya agar sebanding, model diatas diubah sebagai berikut

*Fungsi tujuan*

Minimumkan :

$$z = db_1 + db_2 + db_3 + db_4 + db_5 + db_6 + db_7 + da_1 + da_2 + da_3 + da_4 + da_5 + da_6 + da_7$$

*Kendala-kendala (sasaran dan pembatas)*

1. Berdasarkan tingkat konsumsi zat gizi

Energi :

$$\frac{a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1p}x_p}{g_1} + db_1 - da_1 = 1$$

Protein :

$$\frac{a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2p}x_p}{g_2} + db_2 - da_2 = 1$$

Vitamin A :

$$\frac{a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \dots + a_{3p}x_p}{g_3} + db_3 - da_3 = 1$$

Vitamin C:

$$\frac{a_{41}x_1 + a_{42}x_2 + a_{43}x_3 + \dots + a_{4p}x_p}{g_4} + db_4 - da_4 = 1$$

Kalsium :

$$\frac{a_{51}x_1 + a_{52}x_2 + a_{53}x_3 + \dots + a_{5p}x_p}{g_5} + db_5 - da_5 = 1$$

Zat besi :

$$\frac{a_{61}x_1 + a_{62}x_2 + a_{63}x_3 + \dots + a_{6p}x_p}{g_6} + db_6 - da_6 = 1$$

2. Berdasarkan kemampuan biaya untuk pangan dan harga masing-masing pangan

$$\frac{a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \dots + a_px_p}{y} + db_7 - da_7 = 1$$

3. Batasan kebiasaan kuantitas pangan yang dikonsumsi berdasarkan  $Q_1$  (kuartil bawah) dan  $Q_3$  (kuartil atas) :

$$b_{11} \leq x_1 \leq b_{21}, b_{12} \leq x_2 \leq b_{22}, b_{13} \leq x_3 \leq b_{23}, \dots, b_{1p} \leq x_p \leq b_{2p}$$

Keterangan :

- z = total simpangan bawah dan simpangan atas
- $x_j$  = kuantitas pangan ke-j per 100 gram
- $a_{ij}$  = kandungan zat gizi ke i dalam 100 g jenis pangan  $x_j$
- i = kandungan zat gizi :1 (energi), 2 (protein), 3 (vitamin A), 4 (vitamin C), 5 (kalsium), 6 (zat besi), dan 7 (harga pangan)
- j = 1, 2, 3, ..., p
- p = banyaknya jenis pangan
- $g_i$  = angka kecukupan zat gizi ke-i yang dianjurkan (AKG 2004)
- y = besarnya biaya konsumsi pangan anak batita per hari
- $b_{1j}$  = kuartil bawah jenis pangan  $x_j$  ( $Q_1$ ) per 100 g
- $b_{2j}$  = kuartil atas jenis pangan  $x_j$  ( $Q_3$ ) per 100 g
- $da_i$  = simpangan atas unsur gizi i
- $db_i$  = simpangan bawah unsur gizi i
- $da_7$  = simpangan atas biaya pangan
- $db_7$  = simpangan bawah biaya pangan

# BAB V

## PERSEPSI KETAHANAN PANGAN DAN KELAPARAN

### 5.1

#### Gambaran Umum Lokasi

##### 5.1.1 Kelurahan Tegalsari Mandala I

Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai Kota Medan mempunyai luas wilayah 8.85 KM<sup>2</sup>. Jarak antara Kelurahan Tegal Sari Mandala I dengan Kantor Kecamatan sekitar 0.40 km. Secara geografis, Kelurahan Tegal Sari Mandala I bagian sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Medan Tembung, di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Medan Area, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Amplas. Ketinggian dari permukaan laut 8 m, dengan suhu udara rata-rata 27<sup>o</sup>C.

Penduduk Kelurahan Tegal Sari Mandala I berjumlah 11268 jiwa yang terdiri dari 5427 jiwa laki-laki dan 5841 jiwa perempuan dengan jumlah keluarga sebanyak 2251 KK. Fasilitas pendidikan yang ada diantaranya ada 7 TK Swasta, 5 SDN, 2 SLTP, 1 SMUN, 1 SMU Swasta (BPS 2008).

Pelayanan kesehatan yang terdapat di Kelurahan Tegal Sari Mandala I di tangani oleh 2 Orang dokter, 5 orang bidan praktek dan 12 posyandu. Tempat pelayanan kesehatan rumah sakit dan Klinik umum, sedangkan puskesmas terdekat terletak di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai (BPS 2008).

##### 5.1.2 Desa Sitirejo I

Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota Medan mempunyai luas wilayah 0,45 KM<sup>2</sup>. Jarak antara Kelurahan Sitirejo I dengan Kantor Kecamatan sekitar 1.5 km. Secara geografis, Kelurahan

Sitirejo I bagian sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sudi Rejo Kecamatan Medan Kota, di sebelah barat dan utara berbatasan dengan Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai. Ketinggian dari permukaan laut 30 m, dengan suhu udara rata-rata 27°C.

Penduduk Kelurahan Sitirejo I berjumlah 9525 jiwa yang terdiri dari 4576 jiwa laki-laki dan 4949 jiwa perempuan dengan jumlah keluarga sebanyak 2333. Fasilitas pendidikan yang ada diantaranya adalah 1 SDN, 1 SD Swasta, 1 SLTP Swasta, 1 SMK Swasta, 1 SMU Swasta (BPS 2008).

Pelayanan kesehatan yang terdapat di Kelurahan Sitirejo I ditangani oleh 3 orang dokter praktek, 2 orang bidan praktek dan 6 posyandu. Tempat pelayanan kesehatan (rumah sakit) dan puskesmas terdekat terletak di Kelurahan Siti Rejo II Kecamatan Medan Kota (BPS 2008).

## **5.2 Persepsi Pejabat dan Tokoh Masyarakat tentang Ketahanan Pangan Dan Kelaparan**

### **5.2.1 Karakteristik Reponden Pejabat dan Tokoh Masyarakat**

Kepedulian dan keterlibatan pejabat atau tokoh masyarakat dalam penanggulangan kerawanan pangan dan kelaparan sangatlah diharapkan, terutama oleh masyarakat yang berada dibawah kepemimpinannya. Pengetahuan dan persepsi pejabat atau tokoh masyarakat tentang ketahanan pangan, sebagai salah satu yang menentukan besarnya peran mereka dalam pembangunan ketahanan pangan. Karakteristik pejabat dan responden sebagai key persons dapat dilihat pada Tabel 2.

Dari Tabel 2 terlihat, bahwa sebagian besar responden yang terdiri dari pejabat kabupaten, kecamatan, perangkat desa serta tokoh masyarakat merupakan laki-laki. Sebanyak 88.9 persen pejabat di Desa berprofesi sebagai PNS (pegawai Dinas kabupaten, perangkat kecamatan dan desa) dan sisanya (11.1 persen) adalah ibu rumahtangga. Sedangkan di Desa sebanyak 91.7 persen berprofesi sebagai PNS (pegawai Dinas

kabupaten, perangkat kecamatan dan desa) dan 8.3 persen responden berprofesi sebagai ibu rumahtangga.

Tabel 2. Karakteristik responden pejabat dan tokoh

No	Peubah	Desa		Kota		Kabupaten	
		n	%	n	%	n	%
Jenis Kelamin							
1.	a. Laki-laki	6	66.7	8	66.7	14	66.7
	b. Perempuan	3	33.3	4	33.3	7	33.3
Pekerjaan							
2.	a. tidak bekerja	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	b. PNS/POLRI/ABRI/Perangkat Desa	8	88.9	11	91.7	19	90.5
	c. karyawan swasta	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	d. petani/peternak/nelayan	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	e. wirausaha	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	f. buruh/jasa	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	g. ibu rumahtangga	1	11.1	1	8.3	2	9.5
	h. pelajar/mahasiswa	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	i. lainnya	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Pendidikan							
3.	a. SMP	3	33.3	3	25.0	6	28.6
	b. SMA	4	44.4	4	33.3	8	38.1
	c. Diploma	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	d. S1	2	22.2	3	25.0	5	23.8
	e. S2/S3	0	0.0	2	16.7	2	9.5

Sebanyak 44.4 persen responden pada Desa mengenyam pendidikan SMA. Sisanya, sebanyak 33.3 persen hanya berpendidikan SMP dan hanya sebanyak 22.2 persen yang mengenyam pendidikan tinggi setingkat srata satu (S1). Responden yang mengenyam pendidikan tinggi pada Kota lebih banyak daripada Desa. Sebanyak 25.0 persen responden di Kota memiliki tingkat pendidikan tinggi yaitu strata satu (S1) dan yang mengenyam pendidikan dengan tingkat strata dua atau srata tiga (S2 atau S3) ada sebanyak 16.7 persen. Sisanya hanya pada tingkat SMP (25.0%) dan tingkat SMA (33.3%).

## 5.2.2 Pengetahuan dan Persepsi Tentang Ketahanan Pangan dan Kelaparan.

Pengetahuan dan persepsi pejabat atau tokoh masyarakat tentang ketahanan pangan dapat dilihat pada Tabel 3. Dari Tabel 3 terlihat bahwa tidak semua pejabat atau tokoh masyarakat mengetahui ketahanan pangan, yang mengetahui ketahanan pangan pada tingkat individu, rumahtangga maupun wilayah masing-masing hanya 61.9% yaitu 55.6% di Kota dan 66.7% di Kota. Dari jumlah tersebut yang betul-betul tahu makna ketahanan pangan pada tingkat individu, rumahtangga dan wilayah masing-masing hanya 33.3%, 38.1% dan 47.6%.

Persepsi pejabat atau tokoh masyarakat tentang ketahanan pangan pada tingkat individu, rumahtangga maupun wilayah ada yang berbeda dan menarik. Terlihat dari Tabel 3 bahwa ada perbedaan persepsi ketahanan pangan pada tingkat individu maupun rumahtangga dengan pada tingkat wilayah. Pada tingkat individu dan wilayah ada sekitar masing-masing 19% dan 14.3% baik pada tingkat individu maupun masyarakat dalam kondisi sangat tidak tahan dan tidak tahan, sedangkan pada tingkat wilayah tidak ada satupun yang mengatakan bahwa wilayah mereka sangat tidak tahan pangan dan tidak tahan pangan. Hal ini berarti terjadi gap antara ketahanan pangan wilayah dan ketahanan pangan pada tingkat individu dan rumahtangga.

Tabel 3. Persepsi pejabat tentang ketahanan pangan dan Kelaparan

No	Peubah	Desa		Kota		Kabupaten	
		n	%	n	%	n	%
1.	Makna Ketahanan Pangan dan kelaparan Individu	5	55.6	8	66.7	13	61.9
2.	Benar Makna Ketahanan Pangan dan Kelaparan Individu	2	22.2	5	41.7	7	33.3
	Persepsi terhadap Ketahanan Pangan dan Kelaparan individu						
3.	a. Sangat tidak tahan	2	22.2	2	16.7	4	19.0
	b. Tidak tahan	2	22.2	1	8.3	3	14.3
	c. Biasa saja	3	33.3	2	16.7	5	23.8
	d. Tahan	1	11.1	3	25.0	4	19.0
	e. Sangat tahan	1	11.1	4	33.3	5	23.8

No	Peubah	Desa		Kota		Kabupaten	
		n	%	n	%	n	%
4.	Tahu makna Ketahanan Pangan dan Kelaparan rumahtangga	5	55.6	8	66.7	13	61.9
5.	Benar makna Ketahanan Pangan dan Kelaparan rumahtangga	4	44.4	4	33.3	8	38.1
6.	Persepsi terhadap Ketahanan Pangan dan Kelaparan rumahtangga						
	a. Sangat tidak tahan	2	22.2	2	16.7	4	19.0
	b. Tidak tahan	2	22.2	1	8.3	3	14.3
	c. Biasa saja	3	33.3	2	16.7	5	23.8
	d. Tahan	1	11.1	3	25.0	4	19.0
	e. Sangat tahan	1	11.1	4	33.3	5	23.8
7.	Tahu makna Ketahanan Pangan dan Kelaparan daerah	5	55.6	8	66.7	13	61.9
8.	Benar makna Ketahanan Pangan dan Kelaparan daerah	4	44.4	6	50.0	10	47.6
9.	Persepsi terhadap Ketahanan Pangan dan Kelaparan daerah						
	a. Sangat tidak tahan	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	b. Tidak tahan	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	c. Biasa saja	7	77.8	9	75.0	16	41.7
	d. Tahan	2	22.2	3	25.0	5	23.8
	e. Sangat tahan	0	0.0	0	0.0	0	0.0

### 5.2.3 Persepsi Pejabat Dan Tokoh Tentang Sukses-Gagal Kebijakan Program Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kelaparan

Hampir seluruh atau sebagian besar responden mengetahui adanya program-program pemerintah berada di provinsi mereka seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Raskin, BOS dan Askeskin. Program-Program ini umumnya dinilai berhasil oleh pejabat dan tokoh masyarakat karena membantu masyarakat terhadap masalah yang mereka hadapi, membantu perekonomian. Dalam prakteknya, program-program ini juga dinilai berjalan dengan baik serta tepat sasaran. Program ini dinilai dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Khusus untuk program BLT,

beberapa responden menilai program ini tidak berhasil karena tidak mendidik masyarakat untuk mandiri. Program yang diberikan lebih baik berupa modal untuk peningkatan usaha sehingga masyarakat dapat meningkatkan perekonomian tanpa bergantung pada bantuan yang diberikan pemerintah.

Tabel 4. Persepsi pejabat dan tokoh tentang sukses-gagal kebijakan program ketahanan pangan dan Penanggulangan Kelaparan

No	Peubah	Desa		Kota		Kabupaten	
		n	%	n	%	n	%
1.	Program ketahanan pangan yang berhasil						
	a. BLT	6	66.7	7	58.3	13	61.9
	b. Raskin	6	66.7	7	58.3	13	61.9
	c. Askeskin	9	100.0	12	100.0	21	100.0
	d. Sembako murah	5	31.2	0	0.0	1	8.3
	e. BOS	6	66.7	9	75.0	15	71.4
	f. Keluarga harapan	3	18.8	1	7.1	0	0.0
	g. PMT	10	62.5	1	7.1	0	0.0
	h. Bantuan modal	7	43.8	0	0.0	0	0.0
	i. Bantuan teknologi	4	25.0	1	7.1	1	8.3
	j. Kredit	4	25.0	1	7.1	2	16.7
	k. Bantuan benih	2	12.5	3	21.4	0	0.0
	l. Desa mandiri pangan	1	6.2	1	7.1	0	0.0

Program lainnya yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah program BOS. Program yang diketahui oleh hampir seluruh responden ini dinilai sangat berguna untuk kelangsungan pendidikan masyarakat. Pejabat dan tokoh masyarakat pada kedua desa seluruhnya menganggap program Askeskin telah berhasil membantu masyarakat dalam bidang kesehatan. Menurut mereka dengan program ini masyarakat miskin terbantu saat hendak berobat.



## BAB VI

# PREVALENSI DAN DETERMINAN KELAPARAN

### 6.1 Prevalensi Kelaparan

Berdasarkan hasil penelitian ini pengukuran kelaparan dilakukan melalui pengukuran kualitatif. Berdasarkan jawaban dari ukuran kelaparan kualitatif (Tabel 2) terlihat bahwa, dalam setahun terakhir, 93.3 persen responden mempunyai frekuensi makan tiga kali sehari, diikuti responden dengan frekuensi makan dua kali sehari 6.7 persen. Dalam dua bulan terakhir, sebanyak 72.5 persen responden mempunyai frekuensi makan tiga kali sehari dan 27.5 persen yang mempunyai frekuensi makan dua kali sehari.

Dari data tersebut terlihat bahwa dalam dua bulan terakhir sebanyak 72.5 persen responden tidak mengalami penurunan frekuensi makan, dan 27.5 persen mengalami penurunan frekuensi makan. Dari 27.5 persen responden yang menurun frekuensi makannya, ada 20.8 persen responden terjadi penurunan frekuensi makan dengan alasan ketersediaan makanan dirumah berkurang. Sementara itu, sebanyak 2.5 persen dengan alasan sakit/nafsu makan berkurang, 2.5 persen beralasan diet, dan 1.7 persen beralasan tidak sempat/sibuk. Penurunan frekuensi makan yang dianggap sebagai salah satu penyebab kelaparan dengan alasan ekonomi yaitu keterbatasan pendapatan dalam membeli pangan yang cukup bagi anggota keluarga yang mengakibatkan ketersediaan makanan dirumah berkurang, sedangkan penurunan frekuensi makan karena alasan sakit/nafsu makan berkurang, dan diet, tidak dimasukkan sebagai penyebab kelaparan (Tabel 2).

Sebagian besar 72.5 persen responden tidak mengalami penurunan atau berkurang porsi makan dibandingkan biasanya dan sisanya sebanyak 27.5 persen responden mengalami penurunan porsi makan dalam dua bulan terakhir. Alasan utama yang dikemukakan

responden, yaitu alasan ekonomi (ketersediaan makanan dirumah berkurang atau jatah makannya berkurang) dan alasan non ekonomi yaitu sakit/nafsu makan berkurang dan diet. Dari 27.5 persen responden yang mengalami penurunan, sebanyak 20.8 persen mengurangi porsi makan karena alasan ketersediaan makanan dirumah berkurang dan sisanya sebanyak 2.5 persen karena diet, 2.5 persen karena sakit/ nafsu makan berkurang dan tidak sempat/sibuk 1.7 persen (Tabel 5).

Dalam mengantisipasi responden tidak pernah atau jarang menimbang berat badannya, maka dalam menanyakan penurunan berat badan pendekatannya dengan pertanyaan apakah baju atau celana dalam dua bulan terakhir ini semakin longgar. Berdasarkan hasil penelitian ini, dalam dua bulan terakhir sebanyak 72.5 persen responden tidak mengalami penurunan berat badan dan sebanyak 27.5 persen responden mengalami penurunan berat badan. Dari 27.5 persen responden yang mengalami penurunan berat badan, sebanyak 20.5 persen dengan alasan karena ketersediaan makanan dirumah berkurang dan sisanya sebanyak 2.5 persen karena diet, 2.5 persen karena sakit/ nafsu makan berkurang, 1,7 persen tidak sempat/sibuk (Tabel 5).

Tabel 5. Sebaran responden berdasarkan jawaban ukuran kelaparan kualitatif

No	Pertanyaan	Jawaban	n	%
1	Dalam setahun terakhir, berapa kali sehari biasanya ibu makan?	3x sehari	112	93.3
		2x sehari	8	6.7
2	Dalam dua bulan terakhir, berapa kali sehari biasanya ibu makan?	3x sehari	87	72.5
		2x sehari	33	27.5

No	Pertanyaan	Jawaban	n	%
3	Bila berkurang/menurun mengapa?	- Tidak	87	72.5
		- Ya	33	27.5
		- Ketersediaan makanan dirumah berkurang	25	20.8
		- Diet	3	2.5
		- Sakit/ Nafsu makan berkurang	3	2.5
		- Tidak sempat/Sibuk	2	1.7
4	Dalam dua bulan terakhir, apakah jumlah/porsi makan semakin berkurang dibanding biasanya?	Ya	33	27.5
		Tidak	87	72.5
5	Bila "ya" mengapa?	- Ketersediaan makanan dirumah berkurang	25	20.8
		- Diet	3	2.5
		- Sakit/ Nafsu makan berkurang	3	2.5
		- Tidak sempat/Sibuk	2	1.7
6	Dalam dua bulan terakhir apakah berat badan saudara semakin berkurang (baju atau celana semakin longgar)?	Ya	33	27.5
		Tidak	87	72.5
7	Bila terjadi penurunan berat badan, mengapa?	- Ketersediaan makanan dirumah berkurang	25	20.5
		- Diet	3	2.5
		- Sakit/ Nafsu makan berkurang	3	2.5
		- Tidak sempat/Sibuk	2	1.7

Berdasarkan hasil penelitian kelaparan kualitatif maka di peroleh prevalensi kelaparan sebesar 20.8 persen (Tabel 6). Bila dibandingkan dengan hasil penelitian Tanziha (2005) di empat kabupaten di Propinsi Jawa Barat yaitu prevalensi penderita kelaparan sebesar 9.8 persen, maka hasil penelitian ini jauh lebih besar yaitu 20.8 persen. Perbedaan ini

dimungkinkan karena daerah penelitian merupakan daerah miskin di Kota Medan, sedangkan pada penelitian Tanzaha (2005) penelitian dilakukan di daerah yang representatif Kota dan Kabupaten di Prvinsi Jawa Barat yaitu di Kabupaten Karawang, Pandeglang, Garut dan Kota Bogor. Bila dibandingkan dengan perhitungan FAO (2005) juga memeperlihatkan hasil yang jauh berbeda yaitu hanya 6%.

Tabel 6. Sebaran responden berdasarkan prevalensi kelaparan kualitatif

Kelaparan kualitatif	Jumlah	
	N	%
Kelaparan	25	20.8
Tidak Kelaparan	95	79.2
Total	120	100.0

### 6.1.1 Karakteristik Keluarga Kelaparan dan Tidak Kelaparan

Karakteristik keluarga dalam penelitian ini dilihat dari usia KK dan Ibu, pendidikan KK dan ibu, jenis pekerjaan KK, jumlah anggota keluarga, dukungan sosial, aset ekonomi dan pengeluaran pangan keluarga.

**Usia Kepala Keluarga (KK) dan Ibu.** Usia KK dari seluruh keluarga contoh berkisar antara 21-75 tahun dengan rataaan 43.08±11.62 tahun. Pada keluarga kelaparan usia KK berkisar antara 21-67 tahun dengan rataaan 42.36±11.60 tahun, dan pada keluarga tidak kelaparan berkisar antara 21-75 tahun dengan rataaan 43.27±11.68 tahun..

Tabel 7. Sebaran keluarga menurut kelompok usia kepala keluarga

Kategori Usia KK	Kelaparan		Tidak Kelaparan		Total	
	n	%	n	%	n	%
18-39 tahun	12	48.0	35	36.8	47	39.2
40-59 tahun	10	40.0	51	53.7	61	50.8
>60 tahun	3	12.0	9	9.5	12	10.0
Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Rataan±SD	42.36±11.60		43.27±11.68		43.08±11.62	
Minimum-maximum	21-67		21-75		21-75	
Analisis Uji Beda (Sig)	0.000 (Sangat nyata (p<0.01))					

Berdasarkan hasil uji beda t terdapat perbedaan sangat nyata ( $p < 0.01$ ) usia KK antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan (Tabel 7). Bila usia KK dikelompokkan berdasarkan pengelompokan usia yaitu usia dewasa awal (18-39 tahun), usia setengah baya (40-59 tahun) dan usia lanjut (>60 tahun), maka pada keluarga kelaparan proporsi terbesar KK masuk kelompok usia dewasa awal (18-39 tahun) 48 persen dan keluarga tidak kelaparan proporsi terbesar KK usia setengah baya (40-59 tahun) sebesar 53.7 pesen.

Bila dilihat dari usia ibu, dari seluruh keluarga responden berkisar antara 19-65 tahun dengan rata-rata  $36.03 \pm 10.87$  tahun. Pada keluarga kelaparan usia ibu berkisar antara 21-65 tahun dengan rata-rata  $36.24 \pm 10.80$  tahun. Pada keluarga tidak kelaparan berkisar antara 18-60 tahun dengan rata-rata  $36.03 \pm 10.86$  tahun. Berdasarkan hasil uji beda t terdapat perbedaan sangat nyata ( $p < 0.01$ ) usia ibu antara keluarga kelaparan dengan keluarga tidak kelaparan.

Bila usia ibu dikelompokkan berdasarkan pengelompokan usia yaitu usia dewasa awal (18-39 tahun), usia setengah baya (40-59 tahun) dan usia lanjut (>60 tahun), maka pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan proporsi terbesar ibu masuk kelompok usia dewasa awal (18-39 tahun) masing-masing 64.0 persen dan 61.1 pesen.

Tabel 8. Sebaran keluarga menurut kelompok usia ibu

Kategori usia ibu	Kelaparan		Tidak Kelaparan		Total	
	n	%	n	%	n	%
18-39 tahun	16	64.0	58	61.1	74	61.7
40-59 tahun	8	32.0	31	32.6	39	32.5
>60 tahun	1	4.0	6	6.3	7	5.8
Total	25	100.0	95	100.0	120	100
Rataan $\pm$ SD	36.24 $\pm$ 10.80		36.03 $\pm$ 10.86		36.03 $\pm$ 10.8	
Minimum-maximum	21-65		18-60		18-65	
Analisis Uji Beda (Sig)	0.000 (Sangat nyata ( $p < 0.01$ ))					

Bila dilihat dari usia minimal ibu rumahtangga, terlihat bahwa ada usia ibu berumur 18 tahun, hal ini menunjukkan bahwa adanya

perkawinan pada usia dini, yang akan memberikan dampak pada kurangnya kematangan berfikir dalam keluarga sehingga dapat menimbulkan kurangnya perhatian pada anggota keluarga. Sebaran keluarga menurut kelompok usia ibu dapat dilihat pada Tabel 8.

**Pendidikan KK dan Ibu.** Pendidikan diukur dengan jumlah tahun tanpa menghitung tinggal kelas. Pendidikan KK pada keluarga kelaparan berkisar antara 0-17 tahun dengan rata-rata  $7.53 \pm 3.95$  tahun, sedangkan pada keluarga tidak kelaparan lama pendidikan berkisar antara 0-12 tahun dengan rata-rata  $7.84 \pm 3.48$  tahun. Rata-rata lama pendidikan pada keluarga kelaparan lebih rendah daripada keluarga tidak kelaparan, hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga tidak kelaparan rata-rata menempuh pendidikan formal lebih lama dibandingkan kepala keluarga kelaparan. Selain itu, pada keluarga kelaparan tidak ada kepala keluarga yang menempuh pendidikan di atas dua belas tahun atau hanya sampai jenjang SMA. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan terdapat perbedaan yang sangat nyata ( $p < 0.01$ ) pada pendidikan KK antara keluarga kelaparan dengan keluarga tidak kelaparan.

Tabel 9. Sebaran keluarga menurut tingkat pendidikan KK

Kategori Pendidikan KK	Kelaparan		Tidak Kelaparan		Total	
	n	%	n	%	n	%
SD/tidak tamat SD(0-6 tahun)	14	56.0	51	53.7	65	54.2
SLTP/SLTA (7-12 tahun)	11	44.0	41	43.2	52	43.3
Akademi/PT(>12 tahun)	0	0	3	3.2	3	2.5
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>100.0</b>	<b>95</b>	<b>100.0</b>	<b>120</b>	<b>100.0</b>
<b>Rataan<math>\pm</math>SD</b>	<b><math>7.84 \pm 3.48</math></b>		<b><math>7.53 \pm 3.95</math></b>		<b><math>7.59 \pm 3.84</math></b>	
<b>Minimum-maximum</b>	<b>0-12</b>		<b>0-17</b>		<b>0-17</b>	
<b>Analisis Uji Beda (Sig)</b>	<b>0.000 (Sangat nyata (<math>p &lt; 0.01</math>))</b>					

Bila pendidikan KK dikelompokkan menjadi SD/tidak tamat SD (0-6 tahun), SLTP/SLTA (7-12 tahun), Akademi/PT (> 12 tahun), maka tingkat pendidikan KK pada keluarga kelaparan sebagian besar relatif rendah,

yaitu 56.0 persen berpendidikan SD/tidak tamat SD, 44.0 persen SLTP/SLTA (7-12 tahun), sedangkan pada keluarga tidak kelaparan 53.7 persen kepala keluarga berpendidikan SD/tidak tamat SD, 43.2 persen SLTP/SLTA (7-12 tahun) dan 3.2 persen akademi/PT (>12 tahun).

Pendidikan ibu pada seluruh responden berkisar antara 0-16 tahun, dengan rata-rata  $6.90 \pm 3.55$  tahun. Pendidikan ibu pada keluarga kelaparan berkisar antara 0-12 tahun dengan rata-rata  $6.96 \pm 3.03$  tahun, sedangkan pada keluarga tidak kelaparan berkisar antara 0-16 tahun dengan rata-rata  $6.88 \pm 3.69$  tahun. Berdasarkan hasil uji beda t terdapat perbedaan sangat nyata ( $0.000$ ;  $p < 0.01$ ) antara pendidikan ibu dengan kejadian kelaparan dan tidak kelaparan di keluarga. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pendidikan ibu, maka kemungkinan terjadi kelaparan akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan ibu, maka kemungkinan terjadinya kelaparan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa orang yang mempunyai pendidikan dan pengetahuan yang tinggi cenderung untuk memilih bahan pangan lebih baik daripada mereka yang berpendidikan rendah (Enoch 1980 diacu dalam Rejeki 2000). Rendahnya tingkat pendidikan ibu dapat berakibat pada rendahnya kondisi gizi dan kesehatan keluarga karena ibu merupakan orang yang menyediakan makanan dalam keluarga (Sediaoetama 2000).

Tabel 10. Sebaran keluarga menurut tingkat pendidikan ibu

Kategori Pendidikan Ibu	Kelaparan		Tidak Kelaparan		Total	
	n	%	n	%	n	%
SD/tidak tamat SD(0-6tahun)	15	60.0	54	56.8	69	57.5
SLTP/SLTA (7-12tahun)	10	40.0	39	41.1	49	40.8
Akademi/PT(>12 tahun)	0	0	2	2.1	2	1.7
Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Rataan $\pm$ SD	$6.96 \pm 3.03$		$6.88 \pm 3.69$		$6.90 \pm 3.55$	
Minimum-maximum	0-12		0-16		0-16	
Analisis Uji Beda (Sig)	0.000 (Sangat nyata)					

Bila pendidikan ibu dikelompokkan pada SD/tidak tamat SD, SLTP/SLTA, Akademi/PT, maka tidak jauh berbeda dengan tingkat pendidikan KK, pendidikan ibu pada keluarga kelaparan sebagian besar 60.0 persen hanya sampai SD/tidak tamat SD, dan 40.0 persen SLTP/SLTA (7-12 tahun), sedangkan pada keluarga tidak kelaparan pendidikan ibu sebanyak 56.8 persen berpendidikan sampai SD/tidak tamat SD, 41.1 persen berpendidikan SLTP/SLTA (7-12 tahun) dan sisanya 2.1 persen berpendidikan Akademi/PT (> 12 tahun) (Tabel 10).

**Jenis Pekerjaan Kepala Keluarga (KK).** Jenis pekerjaan utama KK cukup bervariasi, diantaranya PNS (Pegawai Negeri Sipil), pedagang, karyawan, buruh, wiraswasta, dan jasa angkutan (supir angkutan umum dan tukang becak) dan lainnya. Sebaran KK menurut jenis pekerjaan utama disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Sebaran keluarga berdasarkan jenis pekerjaan kepala keluarga

Jenis Pekerjaan	Kelaparan		Tidak Kelaparan		Total	
	n	%	n	%	n	%
Pedagang	0	0	21	100.0	21	100.0
PNS	0	0	5	100.0	5	100.0
Karyawan	0	0	10	100.0	10	100.0
Wiraswasta	0	0	10	100.0	10	100.0
Buruh	12	25.0	36	75.0	48	100.0
Jasa Angkutan	10	53.0	9	47.0	19	100.0
Lainnya	3	42.9	4	57.1	7	100.0
Total	25	20.8	95	79.2	120	100.0

Bila dilihat dari jenis pekerjaan maka kelompok yang mengalami kelaparan yaitu buruh (25.0%), jasa angkutan (53.0%) dan lainnya (42.9%), sedangkan kelompok yang tidak mengalami kelaparan adalah pedagang (100%), PNS (100%), karyawan (100%) dan wiraswasta (100.0%). Banyaknya yang tidak kelaparan pada keluarga dari kelompok PNS (Pegawai Negeri Sipil), pedagang, karyawan, dan wiraswasta umumnya dimungkinkan karena pendapatannya relatif tetap tiap bulannya.



**Jumlah Anggota Keluarga.** Keluarga adalah sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik rumah dan makan dari satu dapur. Orang yang dianggap anggota keluarga dalam penelitian ini adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan KK dan sudah tinggal minimal 6 bulan atau akan tinggal minimal 6 bulan (BKKBN 2002). Berdasarkan definisi tersebut, maka didalam satu keluarga dapat berupa keluarga inti maupun keluarga luas.

Jumlah anggota keluarga responden berkisar antara 2 hingga 11 orang dengan rata-rata  $5.31 \pm 2.03$  orang. Pada keluarga kelaparan jumlah anggota keluarga berkisar antara 3 hingga 11 dengan rata-rata  $5.80 \pm 1.96$  orang. Pada keluarga tidak kelaparan jumlah anggota keluarga berkisar antara 2 hingga 11 dengan rata-rata  $5.18 \pm 2.04$  orang. Bila jumlah anggota keluarga dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu keluarga kecil bila jumlah anggota keluarga  $\leq 4$  orang, keluarga sedang bila anggota keluarganya berkisar antara 5-6 orang dan keluarga besar bila anggotanya  $\geq 7$  orang, maka ditemukan pada keluarga kelaparan 32.0 persen keluarga kecil, menyusul keluarga sedang 44.0 persen, dan keluarga besar 24.0 persen, sedangkan pada keluarga tidak kelaparan 42.1 persen keluarga kecil, menyusul keluarga sedang 36.8 persen, dan keluarga besar 21.1 persen (Tabel 12).

Tabel 12. Sebaran keluarga menurut kategori jumlah anggota keluarga

Kategori jumlah anggota keluarga	Kelaparan		Tidak Kelaparan		Total	
	n	%	n	%	n	%
$\leq 4$ orang	8	32.0	40	42.1	48	40.0
5-6 orang	11	44.0	35	36.8	46	38.3
$\geq 7$ orang	6	24.0	20	21.1	26	21.7
Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Rataan $\pm$ SD	$5.80 \pm 1.96$		$5.18 \pm 2.04$		$5.31 \pm 2.03$	
Minimum-maximum	3-11		2-11		2-11	
Analisis Uji Beda (Sig)	0.000 (Sangat nyata pada $p < 0.01$ )					

Berdasarkan hasil uji beda t terdapat perbedaan sangat nyata (0.000;  $p < 0.01$ ) jumlah anggota keluarga antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Kigutha (1994) dalam den Hartog, dan Staveren (1995) yang menunjukkan bahwa peningkatan jumlah anggota keluarga berhubungan negatif dengan konsumsi pangan hewani dan makanan pokok, yang mengakibatkan menurunnya konsumsi energi dan protein.

**Dukungan Sosial.** Dukungan sosial adalah kesenangan, bantuan dan keterangan atau informasi yang diterima seseorang melalui hubungan formal dan informal dengan yang lain atau kelompok (Tati 2004). Dukungan sosial baik dari pemerintah, keluarga/ikatan kekerabatan serta dukungan dari masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan strategi *food coping* pada saat terjadi kekurangan pangan pada keluarga.

Pada Tabel 13 terlihat jenis dukungan sosial pada keluarga kelaparan bahwa bantuan makanan selalu mereka terima 80.0 persen, sedangkan keluarga tidak kelaparan 57.9 persen menyatakan tidak pernah menerima bantuan. Baik keluarga kelaparan maupun tidak kelaparan menyatakan anak-anak bisa sekolah tetapi harus membayar uang SPP dan biaya lainnya 51.4 persen dan 61.1 persen, namun ada juga yang menyatakan anak-anak bisa sekolah tanpa harus membayar uang SPP dan biaya lainnya sebesar 48.6 persen dan 38.9 persen. Berdasarkan pernyataan tersebut belum sepenuhnya responden mendapat dukungan sosial baik dari keluarga, pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden, anak-anak yang membayar uang SPP dan biaya lainnya karena sekolah tersebut tidak mendapatkan dana subsidi dari pemerintah.

Dukungan sosial lainnya yang diberikan pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan yaitu : sanak famili mau mendengarkan masalah-masalah mereka masing-masing 80.0 persen dan 75.8 persen, sanak famili berupaya untuk memperlihatkan perasaan cinta dan menunjukkan

kepeduliannya masing-masing 72.0 persen dan 73.3 persen, dan mencoba untuk berhubungan dengan sanak famili seakrab mungkin masing-masing 60.0 persen dan 84.2 persen. Sebagaimana diungkapkan oleh Herrick dan Witty (1992) diacu dalam Tati (2004) tentang bentuk dukungan emosional yang diberikan seseorang, yaitu si penerima dukungan dapat mencurahkan perasaan, kesedihan ataupun kekecewaan pada sanak familinya, sehingga membuat pihak penerima dukungan merasa adanya keterikatan, kedekatan, menimbulkan perasaan aman dan percaya (Tabel 13).

Tabel 13. Sebaran keluarga menurut dukungan sosial

No	Pernyataan Dukungan Sosial	Jawaban	Kelaparan		Tidak Kelaparan		Total	
			n	%	n	%	n	%
1.	Bantuan makanan selalu saya terima	Ya	20	80.0	40	42.1	60	50.0
		Tidak	5	20.0	55	57.9	60	50.0
2.	Petugas kesehatan selalu mengunjungi keluarga saya	Ya	0	0	5	5.3	5	4.1
		Tidak	25	100.0	90	94.7	115	95.8
3.	Ketua RT selalu memberikan semangat kepada saya	Ya	4	16.0	18	18.9	22	18.3
		Tidak	21	84.0	77	81.0	98	81.7
4.	Anak-anak saya bisa sekolah tanpa harus membayar uang SPP dan biaya lainnya	Ya	10	48.6	37	38.9	47	39.2
		Tidak	15	51.4	58	61.1	73	60.8
5.	Sanak famili saya mau mendengarkan masalah-masalah kami	Ya	20	80.0	72	75.8	92	76.7
		Tidak	5	20.0	23	19.2	28	23.3
6.	Sanak famili saya berupaya untuk memperlihatkan perasaan cinta dan menunjukkan kepeduliannya pada saya	Ya	18	72.0	70	73.7	88	73.3
		Tidak	7	28.0	25	26.3	32	26.7
7.	Saya mencoba untuk berhubungan dengan sanak famili saya seakrab mungkin	Ya	15	60.0	80	84.2	95	79.2
		Tidak	10	40.0	15	15.8	25	20.8

No	Pernyataan Dukungan Sosial	Jawaban	Kelaparan		Tidak Kelaparan		Total	
			n	%	n	%	n	%
8.	Diluar keluarga saya mempunyai beberapa teman karib yang saya yakini mereka juga sangat peduli dan mencintai saya	Ya	22	88.0	81	85.3	103	85.8
		Tidak	3	12.0	14	14.7	17	14.2
9.	Kehidupan dalam masyarakat ini memberi perasaan aman dalam diri saya	Ya	18	72.0	93	97.9	111	92.5
		Tidak	7	28.0	2	2.1	9	7.5
10.	Jika saya menghadapi masalah, tetangga saya selalu memberi pertolongan	Ya	23	92.0	73	76.8	96	80.0
		Tidak	2	8.0	31	32.6	33	27.5
11.	Saya selalu mendapat bantuan keuangan dari orang tua/sanak famili ketika saya mendapat kesulitan	Ya	19	76.0	68	71.6	87	72.5
		Tidak	6	24.0	27	28.4	33	27.5
12.	Tetangga saya mau membantu meminjamkan uang atau barang ketika saya menghadapi kesulitan	Ya	15	60.0	70	73.7	85	70.8
		Tidak	10	40.0	25	26.3	35	29.2
13.	Saya merasa tenang dengan lingkungan tempat tinggal saya yang sesuai sebagai tempat menumbuh kembangkan anak-anak	Ya	25	100.0	91	95.8	116	96.7
		Tidak	0	0.0	4	4.2	4	3.3
14.	Jika sedang dalam kesulitan saya selalu mendapatkan pertolongan dari masyarakat dimana saya tinggal	Ya	18	72.0	85	89.5	103	85.8
		Tidak	7	28.0	10	10.5	17	14.2

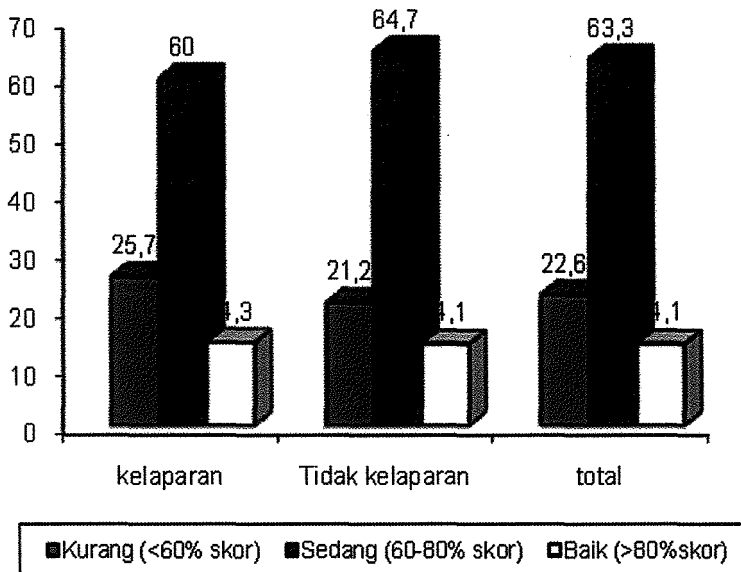
No	Pernyataan Dukungan Sosial	Jawaban	Kelaparan		Tidak Kelaparan		Total	
			n	%	n	%	n	%
15.	Saran yang diberikan tetangga sangat membantu dalam penyelesaian masalah yang dihadapi	Ya	16	64.0	83	87.4	99	82.5
		Tidak	9	36.0	12	12.6	21	17.5

Pada Tabel 13 disajikan dukungan sosial yang diterima dari teman karib/kerabat dekat pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan yaitu : diluar keluarga mempunyai beberapa teman karib yang diyakini sangat peduli dan mencintai mereka masing-masing 88.0 persen dan 85.3 persen, kehidupan dalam masyarakat ini memberi perasaan aman dalam diri mereka sebesar 72.0 persen dan 97.9 persen, dan jika mereka menghadapi masalah, tetangga selalu memberi pertolongan masing-masing 92.0 persen dan 76.8 persen. Teman yang dimaksud disini adalah para tetangga disekitar rumah responden. Menurut responden sebagian besar teman-teman memberikan dukungan dalam bentuk peduli, mencintai dan menghargai segala sesuatu yang dilakukan oleh responden dan memberikan pertolongan, saran jika responden menghadapi kesulitan.

Pada Tabel 13 terlihat sebaran dukungan sosial berupa bantuan pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan yaitu : selalu mendapat bantuan keuangan dari orang tua/sanak famili ketika mendapat kesulitan masing-masing 76.0 persen dan 71.6 persen, tetangga mau membantu meminjamkan uang atau barang ketika menghadapi kesulitan masing-masing 60.0 persen dan 73.7 persen, mereka merasa tenang dengan lingkungan tempat tinggal yang sesuai sebagai tempat menumbuh-kembangkan anak-anak masing-masing 100.0 persen dan 95.8 persen, jika sedang dalam kesulitan mereka selalu mendapatkan pertolongan dari masyarakat dimana mereka tinggal sebesar 72.0 persen dan 89.5 persen, dan saran yang diberikan tetangga sangat membantu dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masing-masing 64.0 persen dan 87.4 persen.

Dalam memperoleh dukungan finansial maupun bantuan yang diperlukan, menurut Sarafino (1996) dukungan sosial yang dapat diberikan langsung berupa bantuan finansial, bantuan dalam mengerjakan tugas-tugas keluarga, pinjaman barang dan tenaga. Dikaitkan dengan hasil penelitian ini terlihat bahwa belum semuanya responden memperoleh bantuan finansial langsung dari keluarga. Dukungan sosial yang diberikan tetangga belum sepenuhnya, tampak dari jawaban responden yang menyatakan tidak mendapat bantuan finansial baik berupa pinjaman uang atau barang ketika menghadapi kesulitan, padahal suatu pendapat mengatakan bahwa dukungan sosial dapat memberikan kekuatan dan dapat mengurangi kesulitan seseorang dalam menjalani kehidupannya, termasuk kesulitan finansial (Umberson 1996 diacu dalam Tati 2004).

Dukungan sosial yang kurang baik pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan yaitu : petugas kesehatan tidak pernah mengunjungi mereka masing-masing 100.0 persen dan 94.7 persen, Ketua RT tidak pernah memberikan semangat kepada mereka sebesar 84.0 persen dan 81.0 persen (Tabel 13).



Gambar 2 Sebaran keluarga menurut kategori skor dukungan sosial.

Pada gambar 2 terlihat bahwa keluarga kelaparan dan tidak kelaparan mendapat dukungan sosial yang tergolong kategori sedang yaitu masing-masing 60.0 persen dan 64.7 persen. Berdasarkan hasil uji t tidak ada perbedaan yang nyata ( $0.588; p>0.05$ ) dukungan sosial pada keluarga kelaparan maupun tidak kelaparan.

**Aset/Barang yang dimiliki.** Aset keluarga merupakan salah satu alat tukar yang dapat dipakai untuk mengakses pangan pada saat sebuah keluarga mengalami masa kekurangan pangan. Aset dapat berupa rumah, tanah, perhiasan, alat elektronik, alat dapur, kendaraan maupun ternak. Aset tersebut ada yang dapat dengan mudah diuangkan berupa perhiasan emas, jam tangan, alat-alat elektronik, alat-alat rumahtangga, maupun hewan ternak, serta aset yang memegang peranan untuk mendapatkan penghasilan berupa tanah, rumah, alat transportasi, maupun alat pertanian.

Tabel 14 memperlihatkan bahwa kepemilikan rumah pada sebagian besar 64.0 persen keluarga kelaparan adalah milik orang tua, 20.0 persen menyewa dan sisanya 16.0 persen milik sendiri, sedangkan pada keluarga tidak kelaparan, sebanyak 48.4 persen memiliki rumah sendiri, 38.9 persen milik orang tua dan 12.6 persen menyewa.

Tabel 14. Sebaran keluarga menurut kepemilikan rumah

Kepemilikan Rumah	Kelaparan		Tidak Kelaparan		Total	
	n	%	N	%	n	%
Milik Sendiri	4	16.0	46	48.4	50	41.7
Menyewa	5	20.0	12	12.6	17	14.2
Milik Orang Tua	16	64.0	37	38.9	53	44.2
Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0

Bila dilihat dari rata-rata aset yang dimiliki baik keluarga kelaparan dan tidak kelaparan mempunyai luas bangunan masing-masing dengan rata-rata  $51.36 \pm 29.51 \text{ m}^2$  dan  $114.76 \pm 88.85 \text{ m}^2$ , pekarangan rata-rata  $11.12 \pm 28.00 \text{ m}^2$  dan  $26.64 \pm 44.35 \text{ m}^2$ , sawah rata-rata  $4.00 \pm 20.00 \text{ m}^2$  dan  $26.32 \pm 123.09 \text{ m}^2$ , lahan kering rata-rata  $2.40 \pm 12.00 \text{ m}^2$ , dan  $30.37 \pm 145.18$

m<sup>2</sup> (Tabel 15). Terlihat dari Tabel 15, baik luas bangunan, pekarangan, sawah maupun lahan kering, pada rumahtangga kelaparan luasnya lebih kecil dibanding pada keluarga tidak kekaparan dan perbedaan ini signifikan ( $p = <0.005$ )

Tabel 15. Sebaran keluarga menurut rataan dan Sd luas bangunan dan tanah yang dimiliki

Aset	Kelaparan	Tidak Kelaparan	Total
Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	51.36±29.51	114.76±88.85	101.55±84.14
Luas Pekarangan (m <sup>2</sup> )	11.12±28.00	26.64±44.35	23.64±23.64
Luas Sawah (m <sup>2</sup> )	4.00±20.00	26.32±123.09	21.67±110.14
Luas Lahan kering (m <sup>2</sup> )	2.40±12.00	30.37±145.18	24.54±129.65

Aset elektronik yang dimiliki keluarga kelaparan, tidak jauh berbeda dengan yang dimiliki keluarga tidak kelaparan seperti televisi, radio, tape/compo, VCD dan *rice cooker* (Tabel 16).

Tabel 16. Sebaran keluarga menurut kepemilikan elektronik

Jenis Aset	Kepemilikan Aset	Kelaparan		Tidak Kelaparan		Total	
		n	%	n	%	n	%
Televisi	Tidak Ada	6	24.0	13	13.7	19	15.8
	Ada	19	76.0	82	86.3	101	84.2
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Radio	Tidak Ada	15	60.0	57	60.0	72	60.0
	Ada	10	40.0	38	40.0	48	40.0
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Tape/compo	Tidak Ada	18	72.0	69	72.6	87	72.5
	Ada	7	28.0	26	27.4	33	27.5
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
VCD	Tidak Ada	14	56.0	49	51.6	63	52.5
	Ada	11	44.0	46	48.4	57	47.5
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
<i>Rice cooker</i>	Tidak Ada	16	64.0	51	53.7	67	55.8
	Ada	9	36.0	44	46.3	53	44.2
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0



Terlihat dari Tabel 16 bahwa kepemilikan elektronik baik pada keluarga kelaparan maupun tidak kelaparan adalah : televisi 76.0 persen dan 86.3 persen, radio 40.0 persen dan 40.0 persen, tape/compo 40.0 persen dan 40.0 persen, VCD 44.0 persen dan VCD 48.4 persen dan *rice cooker* 36.0 persen dan 46.3 persen.

**Pengeluaran Keluarga.** Pengeluaran keluarga dihitung berdasarkan pengeluaran untuk pangan dan non pangan dalam satu tahun, kemudian dibagi 12 untuk mendapatkan pengeluaran per bulan. Pengeluaran keluarga perbulan pada keluarga kelaparan berkisar antara Rp 464.250,- dan Rp 1.761.233,- dengan rata-rata Rp 1.014.712 ± 304.089, sedangkan pengeluaran keluarga tidak kelaparan berkisar antara Rp 581.250,- dan Rp 2.186.983,- dengan rata-rata Rp 1.236.718 ± 400.606. Bila dilihat dari pengeluaran perkapita perbulan, maka rata-rata pengeluaran perkapita perbulan pada keluarga kelaparan berkisar antara Rp 64.154,- hingga Rp 566.722,- dengan rata-rata Rp 227.438,- ± 117.810, sedangkan pengeluaran perkapita perbulan pada keluarga tidak kelaparan berkisar antara Rp 72.007,- hingga Rp 741.706,- dengan rata-rata Rp 281.878,- ± 164.437. Berdasarkan hasil uji beda t terdapat perbedaan yang sangat nyata ( $p < 0.01$ ) pengeluaran perkapita antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan. Pada Tabel 17 dan 18 diuraikan pengeluaran perkapita perbulan menurut garis kemiskinan BPS (2005) dan Bank Dunia (1990).

Pada Tabel 17, terlihat bahwa tidak semua keluarga kelaparan berada dibawah garis kemiskinan, juga tidak semua keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan masuk dalam kategori kelaparan. Bila pengeluaran per kapita perbulan contoh digolongkan menurut kriteria kemiskinan BPS (2008), dengan pendekatan pengeluaran minimum untuk bahan pangan dan non pangan, yaitu garis kemiskinan untuk Provinsi Sumatera Utara daerah perkotaan yaitu Rp 234.712,- dan garis kemiskinan untuk daerah perdesaan yaitu Rp 189.306,- maka diperoleh persentase keluarga kelaparan yang berada dibawah garis kemiskinan adalah sebanyak 48.0 persen untuk daerah perkotaan dan 32.0 persen untuk daerah perdesaan, dan yang berada diatas garis kemiskinan adalah

sebanyak 8.0 persen untuk daerah perkotaan dan 12.0 persen untuk daerah perdesaan, sedangkan pada keluarga tidak kelaparan yang berada di bawah garis kemiskinan sebanyak 13.7 persen untuk daerah perkotaan dan 25.3 persen untuk daerah perdesaan, dan yang berada diatas garis kemiskinan dengan persentase terbanyak 34.7 persen untuk daerah perkotaan dan 26.3 persen untuk daerah perdesaan. Berdasarkan hasil analisis uji beda t terdapat perbedaan yang sangat nyata ( $p < 0.01$ ) pengeluaran keluarga kota dan desa antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan.

Tabel 17. Sebaran keluarga menurut garis kemiskinan BPS (2005)

Kategori Miskin menurut Pengeluaran	Kelaparan		Tidak Kelaparan		Total	
	n	%	n	%	n	%
Di bawah garis kemiskinan :						
Perkotaan $\leq$ Rp 234.712,- /kapita/bulan	12	48.0	13	13.7	25	20.8
Perdesaan $\leq$ Rp 189.306,- /kapita/bulan	8	32.0	24	25.3	32	26.7
Di atas garis kemiskinan						
Perkotaan $>$ Rp 234.712,- /kapita/bulan	2	8.0	33	34.7	35	29.2
Perdesaan $>$ Rp 189.306,- /kapita/bulan	3	12.0	25	26.3	28	23.3
Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0

Pada Tabel 18, terlihat bahwa semua keluarga kelaparan berada dibawah garis kemiskinan, namun tidak semua keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan masuk dalam kategori kelaparan. Bila dibandingkan dengan garis kemiskinan menurut Bank Dunia (1990) ([http://www.indonesiaMDG\\_BI\\_Goal1](http://www.indonesiaMDG_BI_Goal1)) yakni 1 dollar per kapita/hari, maka hasil penelitian mengindikasikan bahwa sebagian besar 73.3 persen keluarga berada di bawah garis kemiskinan dan sisanya yakni 26.7 persen berada sedikit diatas garis kemiskinan. Baik keluarga kelaparan dan tidak kelaparan masing-masing sebanyak 100.0 persen dan 66.3 persen berada

dibawah garis kemiskinan dan hanya 33.7 persen keluarga yang tidak kelaparan berada diatas garis kemiskinan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Rose (1999) yang menyimpulkan bahwa sebagian besar 86.9 persen penderita kelaparan hidup dibawah garis kemiskinan, hanya 13.1 persen penderita kelaparan hidup diatas garis kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis uji beda t terdapat perbedaan yang sangat nyata ( $p < 0.01$ ) pengeluaran keluarga menurut garis kemiskinan Bank Dunia (1990) antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan.

Tabel 18. Sebaran keluarga menurut garis kemiskinan Bank Dunia

Kategori miskin menurut pengeluaran	Kelaparan		Tidak Kelaparan		Total	
	n	%	n	%	n	%
Di bawah garis kemiskinan $\leq 1$ dollar per kapita/hari	25	100.0	63	66.3	88	73.3
Di atas garis kemiskinan $> 1$ dollar per kapita/hari	0	0.0	32	33.7	32	26.7
Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0

**Pengeluaran Pangan dan Non Pangan.** Pengeluaran per kapita per bulan merupakan jumlah dari pengeluaran pangan dan non pangan per kapita per bulan. Rataan pengeluaran pangan per kapita per bulan pada keluarga kelaparan adalah Rp 70.155,  $\pm 22983.9$  atau 59.33 persen dari total pengeluaran, dan pengeluaran non pangan adalah Rp 51.484  $\pm 29969.9$  atau 40.67 persen. Pada keluarga tidak kelaparan pengeluaran pangan sebesar Rp 117.012  $\pm 62193.5$  atau 56.54 persen dari total pengeluaran dan pengeluaran non pangan adalah Rp 101.881  $\pm 94890.9$  atau 43.46 persen (Tabel 19).

Tabel 19 menunjukkan bahwa secara proporsional pengeluaran pangan pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan lebih besar

dibandingkan dengan pengeluaran non pangan. Bila dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran pangan dan non pangan pada tingkat nasional (BPS 2006) adalah 53.86 persen dan 46.14 persen, maka hasil penelitian ini berada di atas rata-rata persentase pengeluaran pangan tingkat nasional, baik pada keluarga kelaparan maupun tidak kelaparan masing-masing 59.33 persen dan 56.54 persen, sedangkan untuk pengeluaran non pangan pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan berada di bawah persentase pengeluaran non pangan tingkat nasional yaitu 40.67 persen dan 43.46 persen.

Tabel 19. Sebaran keluarga menurut rata-rata (Rp) dan standar deviasi pengeluaran perkapita perbulan

Pengeluaran		Rumahtangga		Total
		Kelaparan	Tidak Kelaparan	
Pangan	Rataan ± Sd	70.155 ± 22983.9	117.012 ± 62193.5	103.345 ± 57781.7
	%	59.33	56.54	57.4
Non Pangan	Rataan ± Sd	51.484 ± 29969.9	101.881 ± 94890.9	87.182 ± 84508.7
	%	40.67	43.46	42.6

Berdasarkan hasil uji beda t terdapat perbedaan sangat nyata ( $p < 0.01$ ) pengeluaran pangan dan non pangan antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan. Komposisi pengeluaran keluarga dapat dijadikan salah satu ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan. Menurut den Hartog, van Staveren dan Broower (1995) dan Smith (2003) pada keluarga berpendapatan tinggi, proporsi pengeluaran pangan tidak lebih dari 30 persen dari total pengeluaran, sedangkan pada keluarga miskin pengeluaran untuk pangan dapat mencapai lebih dari 70 persen. Berdasarkan perbandingan pengeluaran pangan yang lebih besar dari non pangan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan keluarga relatif masih rendah, terutama pada keluarga yang kelaparan. Sesuai dengan pendapat Soekirman (1991) bahwa pada umumnya keluarga yang berpendapatan rendah di Indonesia mengalokasikan sekitar 60-80 persen dari total pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Jenis pengeluaran pangan adalah pengeluaran untuk pangan pokok (sumber karbohidrat), pangan hewani (daging sapi, ayam, telur, ikan segar, ikan asin dan susu), kacang-kacangan dan hasil olahannya (tempe, tahu, oncom), sayuran, buah-buahan, kudapan, makanan pendamping ASI, dan lainnya (gula, teh, bumbu). Adapun jenis pengeluaran non pangan berupa pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan, bahan bakar, dapur (sabun cuci), perumahan, pesta/selamatan dan lainnya (seperti cukur, arisan, pajak). Persentase pengeluaran untuk berbagai jenis pengeluaran disajikan pada Tabel 20.

Tabel 20 menunjukkan bahwa pada kelompok pengeluaran pangan, rata-rata persentase pengeluaran untuk pangan pokok pada keluarga kelaparan adalah  $29.23 \pm 9.72$  persen, sedangkan rata-rata pengeluaran untuk pangan pokok pada keluarga tidak kelaparan yakni  $20.83 \pm 10.70$  persen. Hasil uji beda t menunjukkan perbedaan yang sangat nyata ( $p < 0.01$ ) pengeluaran pangan pokok antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan. Di sisi lain, rata-rata persentase pengeluaran untuk pangan hewani pada keluarga kelaparan adalah  $14.65 \pm 6.81$  persen, sedangkan pada keluarga tidak kelaparan  $17.95 \pm 10.35$  persen. Berdasarkan hasil uji beda t terdapat perbedaan yang sangat nyata ( $p < 0.01$ ) pengeluaran pangan hewani antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan.

Bila dibandingkan antara pengeluaran pangan pokok pada keluarga kelaparan maupun tidak kelaparan dengan rata-rata persentase pengeluaran pangan pokok nasional yaitu sebesar 9.60 persen (BPS 2006), maka rata-rata pengeluaran untuk pangan pokok baik pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan, di atas rata-rata persentase pengeluaran nasional yaitu masing-masing sebesar 29.23 persen dan 20.83 persen. Rata-rata persentase pengeluaran untuk pangan hewani baik pada keluarga kelaparan dan keluarga tidak kelaparan masing-masing adalah 14.65 persen dan 17.95 persen di atas rata-rata pengeluaran nasional yaitu 11.3 persen (Tabel 20).



Keterangan : \*\* = Sangat nyata pada taraf 0.01

\* = Nyata pada taraf 0.05

Sumber protein dari pangan nabati memberikan kontribusi yang relatif sama pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan. Hal ini terlihat dari persentase pengeluaran untuk kacang-kacangan dan hasil olahannya pada keluarga kelaparan yaitu 6.41 persen, dan pada keluarga tidak kelaparan yakni 5.68 persen, persentase kedua kelompok tersebut berada diatas persentase pengeluaran nasional yaitu 1.77 persen (BPS 2006). Berdasarkan hasil uji beda t tidak terdapat perbedaan yang nyata ( $p < 0.05$ ) pengeluaran pangan kacang-kacangan dan hasil olahannya antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan (Tabel 20).

Persentase pengeluaran untuk sayuran pada keluarga kelaparan sebesar 4.92 persen, sedangkan pada keluarga tidak kelaparan yaitu 4.66 persen, berada diatas persentase pengeluaran nasional yaitu 4.26 persen (BPS 2006). Berdasarkan hasil uji beda t tidak terdapat perbedaan yang nyata ( $p < 0.05$ ) pengeluaran pangan sayuran antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan. Persentase pengeluaran buah-buahan pada keluarga kelaparan adalah sebesar 0.93 persen, sedangkan pada keluarga tidak kelaparan sebesar 2.71 persen. Bila dibandingkan dengan persentase pengeluaran nasional yaitu 2.76 persen (BPS 2006), maka pengeluaran pangan buah pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan berada di bawah rata-rata pengeluaran nasional yaitu 0.93 persen dan 2.71 persen. Berdasarkan hasil uji beda t terdapat perbedaan yang sangat nyata ( $p < 0.01$ ) pengeluaran pangan buah-buahan antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan (Tabel 20).

Persentase pengeluaran untuk kudapan atau makanan jajanan pada keluarga kelaparan dan keluarga tidak kelaparan yaitu masing-masing 3.09 persen dan 4.35 persen.

Jika dibandingkan dengan rata-rata persentase pengeluaran untuk kudapan nasional sebesar 9.7 persen (BPS 2006), maka pengeluaran untuk kudapan baik pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan masih dibawah rata-rata pengeluaran nasional. Hal ini disebabkan karena keluarga

kelaparan dan tidak kelaparan masih mengutamakan pengeluaran untuk pangan pokok dibanding untuk makanan jajanan. Berdasarkan hasil uji beda t tidak terdapat perbedaan yang nyata ( $p < 0.05$ ) pengeluaran pangan kudapan antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan. Pengeluaran pangan lainnya baik pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan masing-masing 0.03 persen dan 0.05 persen. Hasil uji beda t tidak menunjukkan perbedaan yang nyata ( $p < 0.05$ ) pengeluaran pangan lainnya antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan (Tabel 20).

Pada kelompok pengeluaran non pangan, persentase pengeluaran kesehatan pada keluarga kelaparan maupun tidak kelaparan adalah masing-masing 4.71 persen dan 5.28 persen. Berdasarkan hasil uji beda t tidak terdapat perbedaan yang nyata ( $p < 0.05$ ) pengeluaran non pangan kesehatan antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan. Persentase pengeluaran pendidikan baik pada keluarga kelaparan maupun tidak kelaparan adalah masing-masing 16.60 persen dan 16.30 persen. Hasil uji beda t tidak terdapat perbedaan yang nyata ( $p < 0.05$ ) pengeluaran untuk pendidikan antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan. Hal ini disebabkan oleh adanya keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka, walaupun pendidikan di Indonesia masih mahal. Dengan adanya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tidak menjamin bagi setiap keluarga pendidikan untuk SD dan SLTP mendapat biaya gratis. Namun para orangtua sudah sangat terbantu walaupun mereka masih harus membayar berbagai tagihan dari sekolah yang harus dikeluarkan pada setiap bulannya. (<http://www.Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.htm>).

Persentase pengeluaran bahan bakar dan peralatan dapur pada keluarga kelaparan masing-masing 10.97 persen dan 0.14 persen, sedangkan pada keluarga tidak kelaparan masing-masing 9.28 persen dan 0.23 persen. Berdasarkan hasil uji beda t tidak terdapat perbedaan yang nyata ( $p < 0.05$ ) pengeluaran bahan bakar dan peralatan dapur antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan (Tabel 20).



Persentase pengeluaran untuk perumahan pada ke keluarga kelaparan adalah 0.52 persen, sedangkan pada keluarga tidak kelaparan 2.45 persen. Berdasarkan hasil uji beda t terdapat perbedaan yang nyata ( $p < 0.05$ ) pengeluaran non pangan untuk perumahan antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan. Persentase pengeluaran non pangan seperti pakaian, pesta/sumbangan, tabungan dan lain-lain, pada keluarga kelaparan masing-masing 3.27 persen, 3.62 persen, 0.78 persen dan 0.07 persen, sedangkan pada keluarga tidak kelaparan masing-masing 3.89 persen, 4.31 persen, 1.61 persen, dan 0.11 persen. Berdasarkan hasil uji beda t tidak terdapat perbedaan yang nyata ( $p < 0.05$ ) pengeluaran non pangan untuk pakaian, pesta/sumbangan, tabungan dan lain-lain, antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan (Tabel 20).

**Pengambilan Keputusan.** Pengambilan keputusan merupakan perwujudan proses yang terjadi dalam keluarga dan hasil interaksi diantara para anggota keluarga untuk saling mempengaruhi, sekaligus menunjuk pada hasil/akibat dari struktur kekuasaan dalam keluarga tersebut serta siapa yang membuat/mengambil keputusan (Sajogjo 1993 dalam Tanzaha 2005). Ada tiga tipe pengambilan keputusan dalam keluarga yaitu : (1) *consensual decision* (keputusan yang melibatkan komunikasi atau diskusi yang diakhiri dengan persetujuan anggota keluarga); (2) *accomodation decision* (keputusan yang diambil seseorang yang dominan karena tidak ada kesepakatan anggota keluarga); dan (3) *de facto decision* (keputusan yang diambil berdasarkan kekurangefektifan komunikasi dan semua anggota keluarga pasif sehingga selalu menyetujui keputusan yang diambil).

Berdasarkan tiga tipe pengambilan keputusan tersebut, maka pengambilan keputusan pada keluarga dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu suami sendiri, suami dominan, suami dan istri setara atau bersama, istri dominan dan istri sendiri. Pengambilan keputusan dalam penelitian ini adalah pengambilan keputusan pada keluarga dalam memutuskan penggunaan sumberdaya untuk makanan, pendidikan,

kesehatan, perumahan, pakaian, peralatan keluarga, rekreasi dan tabungan (Tabel 21).

Tabel 21. Sebaran keluarga menurut pengambil keputusan

Pengambil Keputusan	Kelaparan		Tidak Kelaparan		Total	
	n	%	n	%	n	%
Suami Sendiri	1	4.0	6	6.3	7	5.8
Suami Dominan	2	8.0	6	6.3	8	6.7
Istri Sendiri	5	20.0	19	20.0	24	20.0
Istri Dominan	15	60.0	51	53.7	66	55.0
bersama Setara	2	8.0	13	13.7	15	12.5
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>100.0</b>	<b>95</b>	<b>100.0</b>	<b>120</b>	<b>100.0</b>

Pada Tabel 21 terlihat bahwa pengambilan keputusan di keluarga mengarah pada kewenangan istri. Proporsi pengambilan keputusan terbesar baik pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan dilakukan oleh istri dominan masing-masing 60.0 persen dan 53.7 persen, bersama setara 8.0 persen dan 13.7 persen, istri sendiri 14.3 persen dan 16.5 persen, suami dominan 5.9 persen dan 7.1 persen dan suami sendiri masing-masing 20.0persen. Berdasarkan uji beda t menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang nyata ( $p>0.05$ ) pengambilan keputusan antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Tanzaha (2005) bahwa pengambilan keputusan dalam rumahtangga tidak terdapat perbedaan antara rumahtangga kecaparan dan tidak kecaparan. Kemampuan istri untuk mengambil keputusan menjadi dasar pola pengasuhan yang tepat, termasuk pengasuhan gizi (Untoro 2004).

Pengambilan keputusan antara suami dan istri biasanya berbeda menurut jenis keputusan. Sebaran keluarga menurut kontrol keuangan dapat dilihat pada Tabel 22. Pada Tabel 22 terlihat bahwa persentase terbesar istri memutuskan sendiri adalah pada jenis keputusan untuk makanan 70.8 persen, menyusul untuk keputusan peralatan keluarga 52.5 persen dan pakaian 48.3 persen, sedangkan suami memutuskan sendiri lebih banyak pada perumahan 20.8 persen dan rekreasi 15.0 persen, sedangkan keputusan yang dilakukan bersama adalah terkait dengan

rekreasi 35.0 persen, pakaian 34.2, dan perumahan 33.3 persen. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Tanziha (2005) bahwa persentase terbesar istri memutuskan sendiri adalah jenis keputusan untuk makanan.

Tabel 22. Sebaran keluarga menurut kontrol keuangan

Jenis Keputusan	Suami Sendiri (%)	Suami Dominan (%)	Istri Sendiri (%)	Istri Dominan (%)	Bersama Setara (%)	Tidak Ada (%)	Total
Makanan	5.0	1.7	70.8	10.0	12.5	0.0	100.0
Pendidikan	10.8	3.3	44.2	2.5	30.0	9.2	100.0
Kesehatan	8.3	3.3	55.0	2.5	30.8	0.0	100.0
Perumahan	20.8	5.8	35.8	4.2	33.3	0.0	100.0
Pakaian	10.0	3.3	48.3	4.2	34.2	0.0	100.0
Peralatan RT	9.2	3.3	52.5	15.8	19.2	0.0	100.0
Rekreasi	15.0	4.2	30.0	2.5	35.0	13.3	100.0
Tabungan	6.7	4.2	22.5	3.3	30.0	33.3	100.0

Menurut Sajogyo (1994), perbedaan peran suami dan istri dalam pengambilan keputusan di keluarga didasarkan atas berbagai pertimbangan seperti umur, posisi ekonomi, perbedaan sosial dan budaya di lingkungan keluarga tersebut. Pada umumnya peranan wanita lebih banyak pada pekerjaan keluarga dibandingkan dengan pekerjaan laki-laki.

**Kekurangan Pangan.** Sebagian kebutuhan pangan keluarga dalam penelitian ini diperoleh dengan cara membeli, meskipun ada juga yang diperoleh dari hasil pemberian orang lain atau hasil panen dari kebun. Hal yang sama diungkapkan oleh Raharto dan Romdiati (2000), bahwa seluruh keluarga sampel di daerah perkotaan, kebutuhan dasar diperoleh dengan membeli sehingga akses terhadap pangan ditentukan oleh sumber pendapatan keluarganya. Dengan demikian, apabila sumber pendapatan terbatas maka keluarga akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan anggotanya. Sebaran keluarga menurut kekurangan pangan dapat dilihat pada Tabel 23.

Pada Tabel 23 terlihat dari seluruh responden, sebagian besar 70.0 persen keluarga pernah mengalami kekurangan pangan. Pada keluarga kelaparan semua keluarga 100.0 persen pernah mengalami

kekurangan pangan, sedangkan pada keluarga tidak kelaparan 62.1 persen pernah mengalami kekurangan pangan, dan 37.9 persen tidak pernah mengalami kekurangan pangan.

Tabel 23. Sebaran keluarga menurut kekurangan pangan

Kekurangan pangan	Jawaban	Kelaparan		Tidak Kelaparan		Total	
		n	%	n	%	n	%
Keluarga pernah kekurangan pangan setahun terakhir	Ya	25	100.0	59	62.1	84	70.0
	Tidak	0	0	36	37.9	36	30.0
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Kapan saja kekurangan pangan itu bisa terjadi	Hampir Setiap Bulan	25	100.0	36	61.0	61	72.6
	Hanya beberapa bulan tapi tidak setiap bulan	0	0	22	37.3	22	26.2
	Hanya 1 sampai 2 bulan	0	0	1	1.7	1	1.2
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Kenapa bisa terjadi kekurangan pangan	Pendapatan menurun	25	100.0	57	96.6	82	97.6
	Bertambahnya anggota keluarga	0	0.0	2	3.4	2	2.4
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Apakah keluarga ibu sekarang punya persediaan pangan?	Ya	0	0	64	67.4	64	53.3
	Tidak	25	100.0	31	32.6	56	46.7
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Jika punya persediaan, kira-kira untuk berapa lama?	Sehari ini saja	0	0	34	53.1	34	53.1
	Kurang dari seminggu	0	0	18	28.1	18	28.1
	Kurang dari sebulan	0	0	6	9.4	6	9.4
	Cukup sampai bulan depan	0	0	6	9.4	6	9.4
	Total	0	0	64	100.0	64	100.0
Jika punya persediaan pangan, apakah cukup sampai punya uang berikutnya?	Ya	0	0	47	73.4	47	73.4
	Tidak	0	0	17	26.6	17	26.6
	Total	0	0	64	100.0	64	100.0
Dalam bentuk apa persediaan pangannya?	Bahan pangan (beras)	0	0	31	48.4	31	48.4
	Uang, kapan saja bisa dibelikan	0	0	33	51.6	33	51.6
	Total	0	0	64	100.0	64	100.0

Frekuensi terjadinya kurang pangan dikategorikan kedalam tiga kategori yaitu hampir setiap bulan, hanya beberapa bulan tapi tidak setiap bulan, dan hanya 1 sampai 2 bulan. Frekuensi kejadian kekurangan

pangan pada keluarga kelaparan hampir setiap bulan 100.0 persen, sedangkan pada keluarga tidak kelaparan frekuensi kejadian kekurangan pangan hampir setiap bulan dialami oleh 61.0 persen keluarga, beberapa bulan tapi tidak setiap bulan 37.3 persen keluarga dan hanya 1-2 bulan dialami oleh 1.7 persen keluarga. Terdapat dua alasan kejadian kekurangan pangan, yaitu pendapatan menurun dan bertambahnya anggota keluarga. Baik pada keluarga kelaparan maupun tidak kelaparan masing-masing sebanyak 100.0 persen dan 96.6 persen dengan alasan pendapatan menurun, pada keluarga tidak kelaparan hanya 3.4 persen dengan alasan bertambahnya anggota keluarga.

Pada keluarga kelaparan sebesar 100 persen tidak mempunyai persediaan pangan, sedangkan pada keluarga tidak kelaparan sebesar 67.4 persen mempunyai persediaan pangan. Dari 67.4 persen keluarga tidak kelaparan yang mempunyai persediaan pangan, 53.1 persen hanya untuk sehari saja, 28.1 persen kurang dari seminggu dan 9.4 persen kurang dari sebulan. Persediaan pangan yang dimiliki keluarga tidak kelaparan sebanyak 73.4 persen cukup sampai punya uang berikutnya dan hanya 26.6 persen yang tidak cukup sampai punya uang berikutnya. Bentuk persediaan pangan keluarga tidak kelaparan 51.6 persen dalam bentuk uang dan hanya 48.4 persen yang persediaannya dalam bentuk pangan (beras) (Tabel 23). Hal ini merupakan kebiasaan setiap keluarga untuk membeli bahan pangan pokok setiap hari (terutama beras), dimana kenyataan ini sama dengan hasil penelitian mengenai dampak krisis ekonomi terhadap golongan miskin yang sebagian besar sampelnya juga tidak mempunyai kebiasaan menyimpan pangan pokok, tetapi membeli setiap hari. Ini berarti keluarga yang berpendapatan rendah tidak mempunyai cadangan pangan, sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan mereka sangat rentan terhadap perubahan harga beras (Ariani dan Sawit 2000).

## 6.2 Strategi *Food Coping*

Teori yang mendasari strategi *food coping* adalah teori perilaku. Perilaku merupakan seperangkat perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini (Sofa 2008). Ada beberapa faktor yang memotivasi terjadinya perilaku, antara lain : keadaan lingkungan, dorongan pribadi (keinginan, perasaan, emosi, naluri, kebutuhan, hasrat dan minat), dan tujuan yang ingin dicapai. Selain adanya motivasi yang mendorong terjadinya perilaku, ada dua faktor lain yang mendorong terjadinya perilaku yaitu : faktor internal yakni dari dalam individu yang bersangkutan, berdasarkan keturunan dan dorongan kebutuhan kecenderungan yang memotivasi. Yang kedua faktor eksternal yakni pengaruh lingkungan/ dari luar individu. Hal ini mempengaruhi individu sehingga timbul unsur-unsur dan dorongan (motivasi) untuk berbuat sesuatu. Perilaku manusia pada dasarnya terdiri dari komponen pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotor) atau tindakan. Perilaku tidak lahir dengan sendirinya atau sudah demikian adanya, melainkan dibentuk oleh kondisi kehidupan, lingkungan alam dan sosial budaya. Kondisi yang sudah melingkupi kehidupan manusia pada akhirnya membentuk pandangan hidup tentang dunia dan lingkungan sosialnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut strategi *coping* menunjuk pada berbagai upaya, baik mental maupun perilaku, untuk menguasai, mentoleransi, mengurangi, atau meminimalisasikan suatu situasi atau kejadian yang penuh tekanan. Dengan perkataan lain strategi *coping* merupakan suatu proses dimana individu berusaha untuk menangani dan menguasai situasi stres yang menekan akibat dari masalah yang sedang dihadapinya dengan cara melakukan perubahan kognitif maupun perilaku guna memperoleh rasa aman dalam dirinya. Strategi *food coping* dalam pemenuhan pangan merupakan suatu upaya yang dilakukan seseorang dalam mengatasi keadaan yang tidak menguntungkan. Tujuannya adalah mempertahankan tujuan keluarga baik itu dalam pemenuhan konsumsi

pangan, maupun mata pencaharian. Upaya coping terdiri dari 3 taraf yaitu taraf 1, meningkatkan pendapatan (mencari pekerjaan sampingan), perubahan konsumsi pangan, penyegeraan akses terhadap pangan. Taraf 2, penyegeraan akses terhadap pembelian tunai, perubahan distribusi dan frekuensi makan, serta melewati hari-hari tanpa makan. Taraf 3, langkah drastis (Usfar 2002).

Taraf 1. Meningkatkan pendapatan (mencari pekerjaan sampingan), perubahan konsumsi pangan, penyegeraan akses terhadap pangan. Dari hasil penelitian ini, tindakan yang dilakukan oleh responden adalah meningkatkan pendapatan (mencari pekerjaan sampingan). Bagi keluarga yang mempunyai anggota keluarga, yang termasuk dalam usia produktif, maka akan ikut berpartisipasi bekerja untuk mencari tambahan pendapatan. Bagi kepala keluarga atau ibu yang masih kuat, maka mereka akan bekerja lebih keras lagi agar pendapatannya bertambah. Upaya pertama yang dilakukan oleh keluarga dalam meningkatkan pendapatan adalah mencari pekerjaan sampingan perubahan konsumsi pangan, penyegeraan akses terhadap pangan. Sebaran keluarga menurut peningkatan pendapatan, perubahan konsumsi pangan dapat dilihat pada Tabel 24.

Pada Tabel 24, terlihat bahwa hampir setiap minggu keluarga kelaparan sering mencari pekerjaan sampingan sebesar 44.0 persen, sedangkan keluarga tidak kelaparan tidak pernah mencari pekerjaan sampingan sebesar 44.2 persen, namun demikian ada juga yang sering mencari pekerjaan sampingan sebesar 22.1 persen. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Usfar (2002) bahwa strategi *food coping* yang dilakukan selama berada dalam kesulitan pangan adalah dengan mencari tambahan pekerjaan. Adanya keterbatasan pendapatan keluarga menyebabkan penurunan akses pangan yang akan berakibat pada perubahan konsumsi. Pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan ada beberapa tindakan yang dilakukan dalam perubahan konsumsi pangan yaitu hampir setiap hari selalu membeli makanan yang lebih murah harganya masing-masing 92.0 persen dan 44.2 persen. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian

Mardiharini (2002) yang mengatakan hampir setiap hari keluarga miskin perdesaan dan perkotaan membeli makanan yang lebih murah harganya. Hasil penelitian Usfar (2002) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa strategi *food coping* yang dilakukan keluarga selama berada dalam masa kesulitan pangan dengan cara membeli makanan yang lebih murah harganya.

Mengurangi jenis pangan yang dikonsumsi (misalnya dari 3 menjadi 2 jenis) setiap hari dilakukan keluarga kelaparan dan keluarga tidak kelaparan masing-masing sebanyak 92.0 persen dan 33.7 persen. Pada keluarga kelaparan setiap hari mengubah prioritas pembelian pangan 88.0 persen, sedangkan pada keluarga tidak kelaparan sebanyak 44.2 persen tidak pernah. Meskipun terjadi kekurangan pangan 68.0 persen keluarga kelaparan dan 100 persen keluarga tidak kelaparan tidak pernah membeli makanan yang nilainya lebih rendah (tadinya nasi menjadi singkong) (Tabel 24).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Tanziha (2006) bahwa strategi *food coping* yang dilakukan saat terjadi kekurangan pangan dalam keluarga adalah dengan mengurangi jenis pangan yang dikonsumsi, mengubah prioritas pembelian pangan dan membeli makanan yang nilainya lebih rendah (tadinya nasi menjadi singkong).

Tabel 24. Sebaran keluarga menurut peningkatan pendapatan, perubahan konsumsi pangan

Perilaku	Jawaban	Tidak					
		Kelaparan		Kelaparan		Total	
		n	%	n	%	n	%
Meningkatkan pendapatan (mencari pekerjaan sampingan)	Tidak Pernah	0	0.0	42	44.2	42	35.0
	Jarang	2	8.0	6	6.3	8	6.7
	kadang-kadang	9	36.0	6	6.3	15	12.5
	Sering	11	44.0	21	22.1	32	26.7
	Selalu	3	12.0	20	21.1	23	19.2
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Membeli makanan yang	Tidak Pernah	0	0.0	29	30.5	29	24.2
	Jarang	0	0.0	4	4.2	4	3.3



Perilaku	Jawaban	Tidak				Total	
		Kelaparan		Kelaparan		n	%
		n	%	n	%		
Meningkatkan pendapatan (mencari pekerjaan sampingan)	Tidak Pernah	0	0.0	42	44.2	42	35.0
	Jarang	2	8.0	6	6.3	8	6.7
	kadang-kadang	9	36.0	6	6.3	15	12.5
	Sering	11	44.0	21	22.1	32	26.7
	Selalu	3	12.0	20	21.1	23	19.2
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
lebih murah harganya	kadang-kadang	0	0.0	11	11.6	11	9.2
	Sering	2	8.0	9	9.5	11	9.2
	Selalu	23	92.0	42	44.2	65	54.2
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Mengurangi jenis pangan yang dikonsumsi (misalnya dari 3 menjadi 2 jenis)	Tidak Pernah	0	0.0	25	26.3	25	20.8
	Jarang	0	0.0	5	5.3	5	4.2
	kadang-kadang	0	0.0	12	12.6	12	10.0
	Sering	2	8.0	21	22.1	23	19.2
	Selalu	23	92.0	32	33.7	55	45.8
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Mengubah prioritas pembelian pangan	Tidak Pernah	0	0.0	42	44.2	42	35.0
	Jarang	0	0.0	5	5.3	5	4.2
	kadang-kadang	0	0.0	7	7.4	7	5.8
	Sering	3	12.0	12	12.6	15	12.5
	Selalu	22	88.0	29	30.5	51	42.5
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Membeli makanan yang nilainya lebih rendah (tadinya nasi, menjadi singkong)	Tidak Pernah	17	68.0	95	100.0	112	93.3
	Jarang	8	32.0	0	0	8	6.7
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Mengurangi porsi makan	Tidak Pernah	0	0.0	69	72.6	69	57.5
	Jarang	0	0.0	10	10.5	10	8.3
	kadang-kadang	1	4.0	6	6.3	7	5.8
	Sering	6	24.0	5	5.3	11	9.2

Perilaku	Jawaban	Kelaparan		Tidak Kelaparan		Total	
		n	%	n	%	n	%
		Meningkatkan pendapatan (mencari pekerjaan sampingan)	Tidak Pernah	0	0.0	42	44.2
	Jarang	2	8.0	6	6.3	8	6.7
	kadang-kadang	9	36.0	6	6.3	15	12.5
	Sering	11	44.0	21	22.1	32	26.7
	Selalu	3	12.0	20	21.1	23	19.2
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
	Selalu	18	72.0	5	5.3	23	19.2
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0

Menurut hasil penelitian Mardiharini (2002) strategi penghematan merupakan usaha untuk melakukan perubahan pola pengeluaran dengan mengurangi pengeluaran untuk mengatasi masa-masa sulit yaitu dengan mengurangi pembelian pangan. Menurut Puspitawati (1998) cara yang dapat ditempuh antara lain dengan berhemat atau mengganti kebutuhan tersebut dengan alternatif lain yang setara namun lebih terjangkau. Menurut maxwell (1999) merubah konsumsi pangan adalah yang lazim dilakukan suatu keluarga saat menghadapi kekurangan pangan. Pada keluarga kelaparan setiap hari selalu mengurangi porsi makan sebesar 72.0 persen, sedangkan pada keluarga tidak kelaparan tidak pernah sebesar 72.6 persen (Tabel 21). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Mardiharini (2002) dan Usfar (2002) bahwa strategi *food coping* yang dilakukan saat terjadi kekurangan pangan dalam keluarga adalah dengan mengurangi porsi makan.

Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh keluarga adalah penyegeraan akses terhadap pangan. Dalam penelitian ini sebagian keluarga memperoleh pangan dari membeli. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kesulitan pangan keluarga, sebagian besar keluarga dengan pendapatan yang terbatas memberi konsekuensi melemahnya daya beli terhadap pangan. Segala bentuk strategi *food coping* yang telah dilakukan sendiri oleh keluarga, tidak menutup kemungkinan banyak bantuan dari berbagai pihak terkait untuk mengatasi masalah kesulitan pangan

keluarga mereka. Tindakan yang dilakukan keluarga untuk menambah akses segera pada pangan adalah menerima bantuan pangan dari pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), menerima bantuan dari saudara, atau menerima kupon raskin. Sebaran keluarga menurut penyegeraan akses terhadap pangan dapat dilihat pada Tabel 25.

Pada Tabel 25 terlihat dukungan dari keluarga (saudara), kerabat, masyarakat dan pemerintah ditunjukkan dengan adanya partisipasi mereka dalam memberikan bantuan kepada keluarga yang sedang mengalami kesulitan pangan. Bantuan dari pemerintah untuk mengatasi kekurangan pangan sangatlah penting. Hal ini terlihat pada keluarga kelaparan hampir setiap bulan menerima bantuan pangan dari pemerintah (BLT) sebesar 54.3 persen sedangkan pada keluarga tidak kelaparan tidak pernah 60.0 persen. Data ini sesuai dengan daftar nama-nama penerima bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah. Namun demikian belum sepenuhnya keluarga kelaparan mendapat bantuan pangan dari pemerintah (BLT). Keadaan ini sesuai dengan Suhartiningsih (2005) yang mengungkapkan bahwa subsidi selama ini tidak dinikmati oleh keluarga miskin.

Tabel 25. Sebaran keluarga menurut penyegeraan akses terhadap pangan

Perilaku	Jawaban	Tidak				Total	
		Kelaparan		Kekekaparan-an		n	%
		n	%	n	%		
Menerima bantuan pangan dari pemerintah (BLT)	Tidak Pernah	15	60.0	67	70.5	82	68.3
	Kadang-kadang	10	40.0	28	29.5	38	31.7
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Menerima makanan dari saudara	Tidak Pernah	0	0.0	25	26.3	25	20.8
	Jarang	2	8.0	15	15.8	17	14.2
	Kadang-kadang	10	40.0	44	46.3	54	45.0
	Sering	11	44.0	10	10.5	21	17.5
	Selalu	2	8.0	1	1.1	3	2.5
Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0	
Menerima kupon untuk raskin	Tidak Pernah	9	36.0	61	64.2	70	58.3
	Jarang	4	16.0	7	7.4	11	9.2
	Kadang-kadang	12	48.0	27	28.4	39	32.5
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0

Pada keluarga kelaparan dalam sering menerima bantuan pangan dari saudaranya sebesar 44.0 persen, sedangkan pada keluarga tidak kelaparan kadang-kadang menerima bantuan pangan dari saudaranya sebesar 46.3 persen. Pada keluarga kelaparan, setiap bulan sebanyak 48.0 persen menerima kupon raskin, sedangkan pada keluarga tidak kelaparan sebagian besar 64.2 persen tidak pernah (Tabel 22). Hal ini sejalan dengan penelitian Tanziha (2006) upaya coping yang dilakukan keluarga miskin saat terjadi kekurangan pangan adalah menerima bantuan pangan dari saudaranya dan menerima bantuan beras miskin. Hasil penelitian yang sama Mardiharini (2002) keluarga miskin menunjukkan bahwa bentuk bantuan berupa pangan yang lebih sering diterima oleh keluarga sampel dan selebihnya berupa uang. Hal ini menggambarkan pangan adalah bentuk pemberian yang paling cepat dan efektif untuk mengatasi kesulitan pangan keluarga yang bersifat sementara, sedangkan cara pemberian bantuan yang paling banyak adalah dengan harga murah, yaitu dengan memberikan subsidi pangan (raskin dan susu peduli) bagi keluarga sampel.

Baik keluarga kelaparan dan tidak kelaparan yang melakukan strategi *food coping* pada taraf 1 masing-masing 100 persen dan 54.1 persen, namun ada keluarga tidak kelaparan 45.9 persen yang tidak melakukan strategi *food coping* pada taraf 1. Berdasarkan hasil uji beda t terdapat perbedaan yang sangat nyata ( $p < 0.01$ ) dalam melakukan strategi *food coping* pada taraf 1 (meningkatkan pendapatan, perubahan konsumsi pangan, penyegeraan akses terhadap pangan) antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan.

Taraf 2. Penyegeraan akses terhadap pembelian tunai, perubahan distribusi dan frekuensi makan serta melewati hari-hari tanpa makan. Strategi *food coping* yang akan dilakukan oleh keluarga dalam menghadapi kesulitan ekonomi, bila beberapa usaha yang dilakukan keluarga belum juga dapat mencukupi kebutuhan pangan, adalah penyegeraan akses terhadap pembelian tunai seperti menjual aset yang produktif (hewan peliharaan, sepeda, tanah), menjual aset yang tidak

produktif (piring, gelas, lemari), dimana hal ini sangat tepat dilakukan untuk pemenuhan konsumsi pangan keluarga. Meminjam uang dan membeli pangan dengan berhutang merupakan upaya yang lebih baik dilakukan oleh keluarga daripada meminta-minta, disamping itu berhutang ke warung merupakan langkah yang lebih praktis dan mudah, dan akan dibayar pada saat mereka mendapat upah mingguan atau bulanan.

Pada Tabel 26 terlihat, baik keluarga kelaparan maupun tidak kelaparan masing-masing 72.0 persen dan 89.5 persen tidak pernah melakukan tindakan menggadaikan aset untuk membeli kebutuhan pangan, namun demikian ada juga yang setiap bulan menggadaikan aset untuk membeli kebutuhan pangan masing-masing 20.0 persen dan 4.2 persen. Hal ini disebabkan mereka tidak memiliki aset yang dapat digadaikan untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Pada keluarga kelaparan, tindakan menjual barang yang tidak produktif (piring, gelas, lemari, pakaian) hampir setiap minggu dilakukan oleh 76.0 persen keluarga, sedangkan pada keluarga tidak kelaparan sebanyak 61 persen menyatakan tidak pernah (Tabel 26). Hal ini sejalan dengan penelitian Jayaputra (2001) bahwa petani miskin di Nusa Tenggara Barat memanfaatkan aset yang dimiliki dengan cara menjual, untuk mengatasi kesulitan pangan. Jenis aset rumahtangga yang dimanfaatkan meliputi alat-alat elektronika, pakaian, alat masak, perhiasan, dan perabotan rumahtangga. Hasil penelitian Mardiharini (2002) strategi *food coping* yang dilakukan keluarga miskin saat kekurangan pangan adalah menjual aset dan menggadaikan barang.

Baik keluarga kelaparan maupun keluarga tidak kelaparan sebagian besar tidak pernah menjual aset yang produktif masing-masing 96.0 persen dan 91.6 persen, namun ada juga yang jarang menjual aset yang produktif sebesar 4.0 persen dan 8.4 persen (Tabel 26). Menurut Corbett (1998) dalam Anonymous (2003a) jika situasi kesulitan pangan yang dihadapi terus berlanjut maka rumahtangga miskin akan menjual tanah, peralatan, hewan ternak dan aset-aset produktif mereka. Hal ini

sesuai dengan Maxwell (1999) strategi *food coping* yang dilakukan keluarga pada saat kekurangan pangan yaitu menjual aset yang produktif dan tidak produktif.

Meminjam uang merupakan tindakan yang dilakukan oleh responden manakala mengalami kesulitan pangan. Pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan tindakan meminjam uang hampir setiap bulan dilakukan masing-masing sebanyak 60.0 persen dan 32.6 persen keluarga, (Tabel 26). Kecenderungan meminjam uang dilakukan responden pada saudara dekat maupun saudara jauh seperti tetangga ataupun orang lain. Hal ini dilakukan karena adanya hubungan pertalian darah, adanya kepercayaan dari saudara jauh, sehingga merasa tidak segan dan malu untuk meminjam manakala membutuhkannya.

Tabel 26. Sebaran keluarga menurut penyegeraan akses terhadap pembelian tunai, perubahan distribusi dan frekuensi makan serta melewati hari-hari tanpa makan.

Perilaku	Jawaban	Tidak					
		Kelaparan		Kelaparan		Total	
		n	%	n	%	n	%
Menggadaikan aset untuk membeli kebutuhan pangan	Tidak pernah	18	72.0	85	89.5	103	85.8
	Jarang	2	8.0	6	6.3	8	6.7
	Kadang-kadang	5	20.0	4	4.2	9	7.5
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Menjual aset yang tidak produktif (piring, gelas, lemari dll)	Tidak pernah	0	0.0	61	64.2	61	50.8
	Jarang	3	12.0	10	10.5	13	10.8
	Kadang-kadang	3	12.0	6	6.3	9	7.5
	Sering	19	76.0	18	18.9	37	30.8
Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0	
Menjual aset yang produktif (hewan peliharaan, tanah, sepeda, dll)	Tidak pernah	42	96.0	87	91.6	111	92.5
	Jarang	1	4.0	8	8.4	9	7.5
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Meminjam uang	Tidak pernah	0	0.0	27	28.4	27	22.5

Perilaku	Jawaban	Tidak					
		Kelaparan		Kelaparan		Total	
		n	%	n	%	n	%
	Jarang	1	4.0	19	20.0	20	16.7
	Kadang-kadang	15	60.0	31	32.6	46	38.3
	Sering	9	36.0	18	18.9	27	22.5
	<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>100.0</b>	<b>95</b>	<b>100.0</b>	<b>120</b>	<b>100.0</b>
Membeli pangan dengan hutang	Tidak pernah	0	0.0	46	48.4	46	38.3
	Kadang-kadang	0	0.0	18	18.9	18	15.0
	Sering	13	52.0	21	22.1	34	28.3
	Selalu	12	48.0	10	10.5	22	18.3
	<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>100.0</b>	<b>95</b>	<b>100.0</b>	<b>120</b>	<b>100.0</b>
Perubahan distribusi makan (prioritas ibu untuk anak-anak)	Tidak Pernah	0	0.0	57	60.0	57	47.5
	kadang-kadang	2	8.0	3	3.2	5	4.2
	Sering	2	8.0	3	3.2	5	4.2
	Selalu	21	84.0	32	33.6	53	44.1
	<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>100.0</b>	<b>95</b>	<b>100.0</b>	<b>120</b>	<b>100.0</b>
Mengurangi frekuensi makan per hari	Tidak Pernah	0	0.0	19	20.0	19	15.8
	Jarang	0	0.0	6	6.3	6	5.0
	kadang-kadang	0	0.0	9	9.5	9	7.5
	Sering	0	0.0	7	7.4	7	5.6
	Selalu	25	100.0	54	56.8	79	65.8
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>100.0</b>	<b>95</b>	<b>100.0</b>	<b>120</b>	<b>100.0</b>	
Melewati hari-hari tanpa makan	Tidak Pernah	13	52.0	95	100.0	108	90.0
	kadang-kadang	2	8.0	0	0	2	1.7
	Sering	10	40.0	0	0	10	8.3
	<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>100.0</b>	<b>85</b>	<b>100.0</b>	<b>120</b>	<b>100.0</b>

Pada keluarga kelaparan hampir setiap minggu membeli pangan dengan cara berhutang sebanyak 52.0 persen, sedangkan pada keluarga tidak kelaparan sebagian besar 48.4 persen menyatakan tidak pernah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Tanziha (2005), Mardiharini (2002), Usfar (2002) dan Masithah (2002) bahwa keluarga miskin juga melakukan *food coping* dengan cara berhutang bahan pangan ke warung dan meminjam sejumlah uang kepada saudara maupun orang lain. Mereka menilai tindakan ini lebih cepat dan praktis untuk mengatasi masalah kesulitan pangan sementara waktu (Tabel 26).

Bila dilihat dari perubahan distribusi makan (prioritas ibu untuk anak-anak) pada keluarga kelaparan sebagian besar setiap hari selalu melakukannya sebesar 84.0 persen, sedangkan pada keluarga tidak kelaparan tidak pernah sebanyak 60.0 persen, namun ada yang setiap hari selalu melakukan perubahan distribusi makan (prioritas ibu untuk anak-anak) yaitu sebesar persen 33.6 persen. Gambaran ini menjelaskan adanya tindakan untuk mendahulukan anak-anak dalam hal memenuhi kebutuhan makan. Hal ini dapat dilihat dari cara ibu mengupayakan agar tidak terjadi penurunan frekuensi makan hingga satu kali sehari atau bahkan tidak makan dalam sehari pada anak-anak mereka. Beberapa penelitian lain yang menilai strategi *coping* keluarga terhadap kondisi kekurangan pangan, menunjukkan hasil yang konsisiten. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Masithah (2002), dan Usfar (2002) hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota rumahtangga yang diprioritaskan dalam pemberian kebutuhan pangannya ketika menghadapi kekurangan pangan adalah anak.

Upaya mengurangi frekuensi makan per hari selalu dilakukan oleh keluarga kelaparan dan tidak kelaparan masing-masing sebesar 100.0 persen dan 56.8 persen. Hal ini sesuai dengan penelitian Ariani dan Sawit (2000) dimana semenjak krisis ekonomi melanda negeri ini, kejadian penurunan frekuensi pangan pokok juga dialami di ketiga provinsi di Indonesia (Jawa Tengah, NTB dan Bengkulu). Pada umumnya keluarga miskin pada ketiga provinsi tersebut menurunkan frekuensi konsumsi pangannya dari tiga kali menjadi dua kali sehari. Hasil penelitian Jayaputra (2001) pada petani miskin di di Nusa Tenggara Barat menurunkan frekuensi makannya dari tiga kali menjadi dua kali/hari, dan hal ini terjadi pada anggota keluarga dewasa (Tabel 26).

Pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan tidak pernah melewati hari-hari tanpa makan masing-masing 52.0 persen dan 100.0, namun demikian ada juga pada keluarga kelaparan yang melewati hari-hari tanpa makan sebesar 40.0 persen. Kekurangan pangan yang dialami oleh keluarga kelaparan membawa konsekuensi bagi keluarga untuk



berhemat dan menahan kelaparan. Kondisi inilah yang menuntut mereka untuk melewati kegiatan makan pada waktu-waktu makan dalam sehari. Hal ini sesuai dengan penelitian Tazhiha (2006) dan Usfar (2002) strategi *food coping* yang dilakukan keluarga pada saat kekurangan pangan bila berbagai upaya dilakukan tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan yaitu melewati hari-hari tanpa makan (Tabel 26).

Baik keluarga kelaparan dan tidak kelaparan yang melakukan strategi *food coping* pada taraf 2 masing-masing 100 persen dan 55.3 persen, namun ada keluarga tidak kelaparan sebesar 44.7 persen yang tidak melakukan strategi *food coping* pada taraf 2. Berdasarkan hasil uji beda t terdapat perbedaan yang sangat nyata ( $p < 0.01$ ) dalam melakukan strategi *food coping* pada taraf 2 (penambahan akses segera untuk membeli pangan, perubahan distribusi dan frekuensi makan, melewati hari-hari tanpa makan) antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan.

Taraf 3. Langkah Drastis. Dari hasil penelitian ini, tidak ditemukan responden yang melakukan tindakan pada taraf ke 3 yaitu langkah drastis seperti melakukan migrasi, memberikan anak pada saudara, keluarga berpisah atau bercerai. Tindakan yang dilakukan baru sampai taraf 2.

### 6.2.1 Pelaku Strategi *Food Coping* Keluarga

Pelaku strategi *food coping* meliputi kepala keluarga (KK), istri, anak, KK dan istri, KK dan anak, istri dan anak, serta semua anggota keluarga (KK, istri, dan anak). Secara umum pelaku utama strategi *food coping* dalam keluarga adalah istri. Pada Tabel 27 terlihat bahwa yang sering melakukan *food coping* saat kekurangan pangan baik pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan adalah istri. Hampir pada semua jenis  *coping* dilakukan oleh istri seperti mencari pekerjaan sampingan, mengurangi jenis pangan yang dikonsumsi (misalnya dari 3 menjadi 2 jenis), mengubah prioritas pembelian pangan, membeli makanan yang nilainya lebih rendah (tadinya nasi, menjadi singkong), mengurangi porsi makan, menggadaikan aset untuk membeli kebutuhan pangan, menjual aset yang tidak produktif (piring, gelas, lemari), meminjam uang, membeli

pangan dengan hutang, menerima makanan dari saudara, perubahan distribusi makan (prioritas ibu untuk anak-anak), mengurangi frekuensi makan per hari melewati hari-hari tanpa makan. Berdasarkan hasil uji beda t terdapat perbedaan yang sangat nyata ( $p < 0.01$ ) untuk semua jenis *coping* yang dilakukan istri antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan. Hal ini sesuai dengan penelitian Tanziha (2005) bahwa pelaku food coping dalam keluarga proporsi terbesar adalah ibu.

Suami sebagai pelaku *food coping* hanya pada jenis *coping* tertentu seperti mencari pekerjaan sampingan, membeli makanan yang lebih murah harganya, mengurangi jenis pangan yang dikonsumsi, mengurangi porsi makan, menerima kupon raskin, menerima bantuan pangan dari pemerintah dan saudara, mengurangi frekuensi makan per hari dan melewati hari-hari tanpa makan. Berdasarkan hasil uji beda t terdapat perbedaan yang sangat nyata ( $p < 0.01$ ) untuk semua jenis *coping* yang dilakukan oleh kepala keluarga antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan.

Berdasarkan hasil penelitian ini keterlibatan suami dalam melakukan *food coping* masih rendah dan tingginya peran istri. Tingginya peran istri dikarenakan ibu secara budaya mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kecukupan pangan dari semua anggota keluarga.

Temuan menarik pada usaha *food coping* adalah upaya melakukan mengurangi porsi makan, melewati hari-hari tanpa makan, menerima makanan dari saudara melibatkan semua anggota keluarga. Hal ini dimungkinkan karena apabila usaha sudah mencapai penurunan porsi atau frekuensi makan dan melewati hari-hari tanpa makan dapat diartikan bahwa di keluarga tersebut memang sudah terjadi kekurangan pangan yang relatif lebih lama. Berdasarkan hasil uji beda t terdapat perbedaan yang sangat nyata ( $p < 0.01$ ) pelaku *food coping* untuk pemenuhan pangan antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan.

Tabel 27. Sebaran keluarga menurut pelaku *food coping*

Tindakan <i>Food Coping</i>	Pelaku	Kelaparan		Tidak Kelaparan		Total	
		n	%	n	%	n	%
Mencari Pekerjaan sampingan	Tidak Pernah	0	0.0	62	65.3	62	51.7
	Istri	20	80.0	25	26.3	45	37.5
	KRT+Istri	5	20.0	8	8.4	13	10.8
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Membeli makanan yang lebih murah harganya	Tidak Pernah	0	0.0	49	51.6	49	40.8
	Istri	20	80.0	46	48.4	66	55.0
	KRT+ Istri	5	20.0	0	0.0	5	4.2
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Mengurangi jenis pangan yang dikonsumsi (misalnya dari 3 menjadi 2 jenis)	Tidak Pernah	0	0	45	47.4	45	37.5
	Istri	20	80.0	31	43.2	61	50.8
	KRT+Istri	5	20.0	9	9.5	14	11.7
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Mengurangi porsi makan	Tidak Pernah	0	0.0	77	81.1	77	64.2
	Istri	16	64.0	11	11.6	27	22.5
	KRT + Istri + Anak	9	36.0	7	7.4	16	13.3
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Membeli makanan yang nilainya lebih rendah (tadinya nasi, menjadi singkong)	Tidak Pernah	20	80.0	72	75.8	92	76.7
	Istri	5	20.0	23	24.2	28	23.3
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0

Tindakan <i>Food Coping</i>	Pelaku	Kelaparan		Tidak Kelaparan		Total	
		n	%	n	%	n	%
Mengubah prioritas pembelian pangan	Tidak Pernah	0	0.0	55	57.9	55	45.8
	Istri	25	100.0	40	42.1	65	54.2
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Menerima bantuan pangan dari pemerintah(BLT)	Tidak Pernah	12	48.0	60	63.2	72	60.0
	KRT	13	52.0	35	36.8	48	40.0
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Menerima makanan dari saudara	Istri	0	0.0	77	81.1	77	64.2
	KRT+Istri	10	40.0	11	11.6	21	17.5
	KRT+Istri+Anak	15	60.0	7	7.4	22	18.3
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Menerima kupon untuk Raskin	Tidak Pernah	12	48.0	66	69.5	78	65.0
	KRT	13	52.0	29	30.5	42	35.0
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Menggadaikan aset untuk membeli kebutuhanpangan	Tidak Pernah	20	80.0	55	57.9	75	62.5
	Istri	5	20.0	40	42.1	45	37.5
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Menjual aset yang tidak produktif (piring, gelas, lemari dll)	Tidak Pernah	0	0.0	70	73.7	70	58.3
	Istri	25	100.0	25	26.3	50	41.7
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Menjual aset yang produktif (hewan peliharaan, tanah, sepeda, dll)	Tidak Pernah	0	0.0	60	63.2	60	50.0
	Istri	25	100.0	35	36.8	60	50.0
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0

Tindakan <i>Food Coping</i>	Pelaku	Kelaparan		Tidak Kelaparan		Total	
		n	%	n	%	n	%
Meminjam uang	Tidak Pernah	0	0.0	57	60.0	57	47.5
	KRT	5	20.0	5	5.3	10	8.3
	Istri	20	80.0	33	34.7	53	44.2
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Membeli pangan dengan hutang	Tidak Pernah	0	0.0	75	78.9	75	62.5
	Istri	25	100.0	20	21.1	45	37.5
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Perubahan distribusi makan (prioritas ibu untuk anak-anak)	Tidak Pernah	0	0.0	75	78.9	75	62.5
	Istri	25	100.0	20	21.1	45	37.5
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Mengurangi frekuensi makan per hari	Tidak Pernah	0	0.0	77	81.1	77	64.2
	Istri	22	88.0	18	18.9	40	33.3
	KRT+Istri	3	12.0	0	0.0	3	2.5
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0
Melewati hari-hari tanpa makan	Tidak Pernah	0	0.0	95	100.0	95	79.2
	Istri	19	76.0	0	0.0	19	15.8
	KRT+Istri+Anak	6	24.0	0	0.0	6	5.0
	Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0

## 6.2.2 Skor Strategi *Food Coping*

Strategi *food coping* yang dilakukan oleh keluarga terdiri dari 3 taraf yaitu taraf 1, meningkatkan pendapatan (mencari pekerjaan sampingan), perubahan konsumsi pangan, penyegeraan akses terhadap pangan. Taraf 2, penyegeraan akses terhadap pembelian tunai, perubahan distribusi dan frekuensi makan, serta melewati hari-hari tanpa makan. Taraf 3, langkah drastis. Tiap taraf yang dilakukan diberi skor, dengan menjumlahkan hasil kali tiap taraf dengan bobot yang berbeda pada tiap tarafnya (Usfar 2002). Apabila strategi *food coping* yang dilakukan oleh keluarga dilihat dari taraf yang dilakukan oleh keluarga, maka terdapat delapan kategori strategi *food coping* yaitu : 1) tidak pernah; 2) taraf 1; 3) taraf 2; 4) taraf 3; 5) taraf 1 dan 2; 6) taraf 1 dan 3; 7) taraf 2 dan 3; 8) taraf 1, 2 dan 3.

Berdasarkan skor strategi *food coping* tersebut, rata-rata skor strategi *food coping* keluarga kelaparan  $67.54 \pm 8.66$  dengan skor minimum 52 dan skor maksimum 80, sedang keluarga tidak kelaparan  $19.15 \pm 13.81$  dengan skor minimum 0 dan skor maksimum 80. Berdasarkan hasil pengkategorian dari taraf strategi *food coping* yang dilakukan oleh keluarga (Tabel 28),

Tabel 28. Sebaran taraf strategi *food coping* keluarga

Taraf strategi <i>food coping</i> yang dilakukan	Kelaparan		Tidak kelaparan		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tidak pernah	0	0	36	37.8	36	30.0
Taraf 1	0	0	4	4.2	4	3.3
Taraf 2	0	0	4	4.2	4	3.3
Taraf 1 dan 2	25	100.0	51	53.8	76	63.4
Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0

Tabel 28 menunjukkan bahwa baik keluarga kelaparan maupun tidak kelaparan melakukan strategi *food coping* baru sampai taraf 1, 2, masing-masing 100.0 persen dan 53.8 persen, namun demikian pada

keluarga tidak kelaparan ada juga yang tidak melakukan strategi *food coping* sebesar 37.8 persen karena mereka tidak kekurangan pangan.

Hasil uji korelasi *Spearman* menunjukkan terdapat hubungan nyata antara skor strategi *food coping* dengan pengeluaran per kapita ( $r=-0.592$ ;  $p<0.01$ ), pendidikan kepala keluarga ( $r=-0.354$ ;  $p<0.01$ ), pendidikan ibu ( $r=-0.332$ ;  $p<0.01$ ), jumlah anggota keluarga ( $r=0.296$ ;  $p<0.01$ ), umur KK ( $r=0.236$ ;  $p<0.01$ ), dan umur ibu ( $r=0.258$ ;  $p<0.01$ ). Hal ini berarti semakin rendah pengeluaran per kapita, pendidikan kepala keluarga, pendidikan ibu dan semakin besar jumlah anggota keluarga, umur KK, umur ibu, maka banyak tindakan dan kedalaman strategi *food coping* yang mereka lakukan.

## 6.3 Konsumsi Pangan

### 6.3.1 Frekuensi Konsumsi pangan

Konsumsi pangan keluarga diukur dengan menggunakan metode *food frequency*. Pangan dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pangan, yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan dan hasil olahannya, sayuran, dan buah-buahan serta lainnya (makanan jajanan). Dari data tersebut dapat dianalisis frekuensi dan berat pangan yang dikonsumsi dalam seminggu. Rataan frekuensi konsumsi pangan pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan disajikan dalam Tabel 29.

Berdasarkan Tabel 29 terlihat bahwa ada kecenderungan rata-rata frekuensi konsumsi beras pada keluarga kelaparan lebih rendah yaitu 13 kali dalam seminggu atau 1-2 kali dalam sehari, dibanding keluarga tidak kelaparan yaitu 15 kali dalam seminggu atau sekitar 2-3 kali dalam sehari. Terdapat perbedaan yang sangat nyata ( $p<0.01$ ) rata-rata frekuensi konsumsi beras antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan. Rataan konsumsi mie pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan tidak berbeda, masing-masing 4 kali dan 5 kali dalam seminggu. Baik pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan terlihat jarang mengonsumsi umbi-umbian. Rataan frekuensi konsumsi padi-padian dan umbi-umbian seperti singkong dan ubi, tidak terdapat perbedaan diantara dua

kelompok tersebut kecuali frekuensi konsumsi kentang. Pada keluarga kelaparan, setiap minggunya kentang dikonsumsi hanya 1 kali, sedangkan pada keluarga tidak kelaparan 2 kali seminggu. Terdapat perbedaan rata-rata frekuensi konsumsi kentang antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan.

Pada kelompok pangan hewani hampir semua sumber pangan hewani kecuali ikan asin frekuensi konsumsinya berbeda nyata yaitu frekuensi konsumsi daging ayam, telur, daging sapi dan ikan segar. Pada keluarga kelaparan frekuensi konsumsi daging ayam, telur, daging sapi dan ikan segar masing-masing 0.79 kali, 2.97 kali, 0.13 kali dan 1.29 kali lebih kecil dibanding pada keluarga tidak kelaparan yaitu masing-masing 2.69 kali, 7.57 kali, 0.47 kali dan 2.62 kali (Tabel 29). Menurut Sajogyo, Geonardi, Roesli, Hardjadi dan Khumaidi (1986) dalam Pudjirahayu (1999) bahwa rumah tangga dengan pendapatan rendah cukup sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan hewani yang harganya masih relatif mahal.

Tabel 29 Sebaran keluarga menurut rata-rata dan standar deviasi frekuensi konsumsi pangan (kali/minggu).

Kelompok pangan	Kelaparan		Tidak Kelaparan		Total		Peluang
	Rataan	Sd	Rataan	Sd	Rataan	Sd	
<b>Padi-padian</b>							
Beras	13.97	0.09	15.90	3.21	15.34	2.83	0.000**
Mie	4.40	4.94	5.46	5.99	5.15	5.71	0.319
<b>Umbi-umbian</b>							
Singkong	0.21	0.32	0.85	2.30	0.53	1.31	0.365
Ubi jalar	0.49	0.28	2.89	3.77	1.69	2.02	0.086
Kentang	1.13	3.79	2.09	6.34	1.61	5.07	0.010*
<b>Pangan hewani</b>							
Daging ayam	0.79	1.07	2.69	4.07	1.74	2.57	0.000**
Telur	2.97	2.08	7.57	8.57	5.27	5.33	0.001**
Daging sapi	0.13	0.39	0.47	1.19	0.30	0.79	0.009*
Ikan asin	9.58	6.25	9.80	8.89	9.69	7.57	0.393
Ikan segar	1.29	2.86	2.62	3.33	1.95	3.10	0.001**
<b>Kacang-kacangan</b>							



Kelompok pangan	Kelaparan		Tidak Kelaparan		Total		Peluang
	Rataan	Sd	Rataan	Sd	Rataan	Sd	
Oncom	2.56	3.93	2.63	2.56	2.60	3.24	0.370
Tahu	4.89	5.43	7.03	6.84	5.96	6.14	0.083
Tempe	6.23	5.28	8.48	7.11	7.35	6.20	0.163
<b>Buah-buahan</b>							
Jeruk	0.48	0.51	1.93	2.37	1.20	1.44	0.013*
Semangka	0.37	0.55	1.18	2.43	0.78	1.49	0.516
Pepaya	0.69	1.47	0.73	1.65	0.71	1.56	0.919
Pisang	0.41	1.08	0.57	1.22	0.49	1.15	0.173
Nangka	0.94	2.74	0.75	1.32	0.84	2.03	0.512
Mangga	1.32	1.91	3.80	3.52	2.56	2.72	0.053*
Melon	0.32	0.53	1.37	2.70	0.85	1.62	0.187
<b>Sayuran</b>							
Kacang panjang	1.78	2.47	3.01	3.51	2.39	2.99	0.035*
Kangkung	2.48	1.94	3.81	3.40	3.14	2.67	0.120
Bayam	3.49	2.91	4.15	4.14	3.82	3.52	0.889
Sawi	1.16	1.30	2.39	2.71	1.78	2.01	0.102
Sayur asam	2.23	1.76	2.95	3.25	2.59	2.50	0.275
Sop	2.04	1.59	3.44	3.35	2.74	2.47	0.016*
Toge	2.73	4.36	2.75	3.87	2.74	4.11	0.611
Wortel	0.99	1.67	1.90	3.88	1.44	2.77	0.311
<b>Lain-lain</b>							
Kudapan/jajanan	3.01	2.97	6.39	4.88	4.70	3.93	0.001**
Minyak kelapa	9.46	4.73	15.09	9.19	12.28	6.96	0.001**

Keterangan : \*\* = Sangat nyata pada taraf 0.01

\* = nyata pada taraf 0.05

Pada kelompok kacang-kacangan, oncom merupakan jenis pangan yang paling jarang dikonsumsi oleh kedua kelompok keluarga tersebut. Hal ini terlihat dari rendahnya rata-rata frekuensi konsumsi oncom masing-masing adalah 2.56 kali dan 2.63 kali dalam seminggu. Rata-rata konsumsi tahu dan tempe pada keluarga kelaparan masing-masing 4.89 kali dan 6.23 kali dalam seminggu, sedangkan rata-rata konsumsi tempe dan tahu pada keluarga tidak kelaparan sekitar 7.03 kali dan 8.48 kali dalam satu minggu. Berdasarkan uji t tidak terdapat perbedaan rata-rata frekuensi

konsumsi oncom, tempe dan tahu antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan (Tabel 29).

Berdasarkan Tabel 29, pada kelompok buah-buahan, terlihat bahwa pada keluarga kelaparan mangga adalah buah yang paling sering dikonsumsi daripada buah lainnya seperti jeruk, pisang, pepaya, semangka, melon dan nangka yaitu dalam satu minggu mereka mengkonsumsi mangga meskipun hanya satu kali. Hal ini dimungkinkan karena harga mangga relatif lebih murah dibandingkan buah lainnya. Pada keluarga tidak kelaparan, tidak hanya mangga yang sering dikonsumsi tapi jeruk, pisang, pepaya, semangka, melon dan nangka juga merupakan buah yang menjadi pilihan mereka untuk dikonsumsi dalam setiap minggunya dengan frekuensi rata-rata masing-masing 1.93, 1.18, 0.73, 0.57, 0.75 dan 1.37 kali. Berdasarkan uji t terdapat perbedaan rata-rata frekuensi konsumsi jeruk dan mangga antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan.

Rataan frekuensi konsumsi sayur-sayuran, pada keluarga kelaparan maupun yang tidak kelaparan sudah cukup tinggi. Hal ini terlihat dari variasi sayuran yang dikonsumsi oleh keluarga per minggu. Pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan, sayur bayam adalah yang paling sering dikonsumsi masing-masing 3 dan 4 kali dalam seminggu daripada sayur lainnya seperti kacang panjang, kangkung, sawi, sayur asam, sayur sop dan toge wortel. Berdasarkan uji t terdapat perbedaan rata-rata frekuensi konsumsi sayuran kacang panjang dan sop antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan (Tabel 29).

Pangan lainnya yang relatif sering dikonsumsi adalah kudapan/jajanan dan minyak kelapa. Pada keluarga kelaparan mengkonsumsi jajanan 3.01 kali dalam seminggu, sedangkan keluarga tidak kelaparan 6.39 kali dalam seminggu. Pada keluarga kelaparan rata-rata frekuensi konsumsi minyak kelapa 9.46 kali per minggu, sedangkan pada keluarga tidak kelaparan 15.09 kali dalam seminggu. Berdasarkan uji t terdapat perbedaan yang nyata ( $p < 0.01$ ) frekuensi konsumsi jajanan dan minyak kelapa antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan (Tabel 29).

### 6.3.2 Berat Pangan yang Dikonsumsi

Kuantitas konsumsi pangan mempengaruhi kelaparan secara langsung, terutama kuantitas konsumsi pangan pokok dan pangan nabati. Pada Tabel 30 terlihat bahwa rata-ran konsumsi kelompok padi-padian per hari terutama beras pada keluarga kelaparan 193.48 gram lebih kecil dibandingkan pada keluarga yang tidak kelaparan 260.74 gram. Rata-ran konsumsi mie per hari pada keluarga kelaparan 2.96 gram, sedangkan pada keluarga tidak kelaparan 11.23 gram. Berdasarkan analisis uji beda t terdapat perbedaan yang sangat nyata ( $p > 0.01$ ) rata-ran konsumsi beras dan mie antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan.

Pada Tabel 30 baik keluarga kelaparan dan tidak kelaparan rata-ran berat pangan per hari yang dikonsumsi pada kelompok umbi-umbian seperti singkong, ubi jalar dan kentang masing-masing 5.95 gram dan 1.73 gram, 0.01 gram dan 0.03 gram, 1.60 gram dan 3.49 gram. Berdasarkan analisis uji beda t tidak terdapat perbedaan yang nyata ( $p < 0.05$ ) rata-ran konsumsi singkong, ubi jalar dan kentang per hari antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan.

Tabel 30. Rataan dan Sd berat pangan (gram) per hari yang dikonsumsi pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan

Kelompok pangan	Kelaparan		Tidak Kelaparan		Total		Peluang
	Rataan	Sd	Rataan	Sd	Rataan	Sd	
<b>Padi-padian</b>							
Beras	193.48	106.8	260.7	115.9	241.1	117.0	0.003**
Mie	2.96	5.99	11.23	11.11	8.82	10.56	0.000**
<b>Umbi-umbian</b>							
Singkong	5.95	9.20	1.73	7.21	3.84	8.20	0.386
Ubi jalar	0.01	0.01	0.03	0.06	0.02	0.03	0.646
Kentang	1.60	4.35	3.49	15.36	2.54	9.86	0.051
<b>Pangan hewani</b>							
Daging ayam	4.66	4.56	18.01	29.36	2.07	14.12	0.000**
Telur	14.92	23.94	30.79	38.52	26.16	35.55	0.008**
Daging sapi	0.68	0.96	2.65	5.33	2.07	4.59	0.001**
Ikan asin	8.89	6.95	15.13	23.02	13.31	19.89	0.026*
Ikan segar	3.06	5.60	17.60	30.01	13.31	19.89	0.000**

Kelompok pangan	Kelaparan		Tidak Kelaparan		Total		Peluang
	Rataan	Sd	Rataan	Sd	Rataan	Sd	
<b>Kacang-kacangan</b>							
Oncom	2.46	4.58	2.64	7.04	2.55	5.81	0.703
Tahu	9.95	21.12	17.10	32.38	13.52	26.75	0.209
Tempe	20.40	21.12	32.00	31.57	28.62	29.30	0.021*
<b>Sayuran</b>							
Kacang panjang	2.56	4.67	2.64	4.24	2.60	4.45	0.280
Kangkung	2.71	4.50	6.46	12.50	4.59	8.50	0.113
Bayam	8.11	13.38	17.63	17.63	14.85	25.85	0.015*
Sawi	1.80	4.05	3.68	12.63	2.74	8.34	0.658
Sayur asam	8.92	19.55	5.68	8.67	7.30	14.11	0.800
Sop	5.08	7.12	7.15	11.99	6.11	9.55	0.225
Toge	1.31	2.38	2.75	6.22	2.03	4.30	0.389
Wortel	2.50	8.55	5.26	20.73	3.88	14.64	0.230
<b>Buah-buahan</b>							
Jeruk	4.76	5.61	21.21	31.05	12.98	18.33	0.149
Semangka	0.64	2.05	1.45	11.17	1.04	6.61	0.287
Pepaya	0.08	0.20	1.39	5.93	0.73	3.07	0.668
Pisang	0.74	3.56	2.85	9.63	1.80	6.60	0.203
Nangka	0.28	0.99	1.31	5.28	0.80	3.13	0.268
Mangga	4.43	13.01	9.24	16.08	6.83	14.55	0.216
Melon	0.03	0.11	2.17	15.86	1.10	7.98	0.092

Keterangan : \*\* = Sangat nyata pada taraf 0.01

\* = nyata pada taraf 0.05

Hampir semua jenis pangan hewani dikonsumsi oleh keluarga kelaparan dan tidak kelaparan. Pada kelompok pangan hewani, telur dan ikan asin (14.29 gram dan 8.89 gram) merupakan pangan yang paling banyak dikonsumsi oleh keluarga kelaparan dibanding pangan hewani lainnya, sedangkan konsumsi daging sapi, daging ayam, dan ikan segar berturut-turut hanya 0.68 gram, 4.66 gram dan 3.06 gram. Pada keluarga tidak kelaparan daging ayam, ikan segar, ikan asin dan telur merupakan pangan yang paling banyak dikonsumsi yaitu 18.01 gram, 17.60 gram, 15.13 gram dan 30.79 gram dibanding pangan hewani daging sapi sangat rendah yaitu 2.65 gram. Berdasarkan analisis uji beda t terdapat perbedaan yang nyata ( $p > 0.01$ ) rata-rata berat konsumsi daging ayam, telur,

daging sapi, ikan asin, ikan segar per hari antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan.

Bila dibandingkan konsumsi pangan hewani per kapita per hari nasional BPS (2006) yaitu rata-rata konsumsi daging sapi (4.75 gram) ayam (9 gram), telur (12.57 gram), ikan segar (69.0 gram) dan ikan asin (61.57 gram), maka rata-rata konsumsi pangan hewani daging sapi, ayam, ikan asin, dan ikan segar, pada keluarga kelaparan berada di bawah rata-rata konsumsi nasional, sedangkan rata-rata konsumsi telur berada di atas rata-rata konsumsi nasional. Pada keluarga tidak kelaparan, rata-rata konsumsi ayam dan telur berada di atas rata-rata konsumsi nasional, sedangkan rata-rata konsumsi daging sapi, ikan asin dan ikan segar berada di bawah rata-rata nasional (Tabel 30).

Pada kelompok kacang-kacangan dan hasil olahannya baik pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan masing-masing 20.40 gram dan 32.00 gram tempe merupakan pangan yang paling banyak dikonsumsi. Konsumsi tempe berbeda nyata pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan. Pada kelompok sayuran menunjukkan konsumsi yang tidak berbeda antara rata-rata berat yang dikonsumsi oleh keluarga kelaparan dan tidak kelaparan, kecuali konsumsi bayam berbeda nyata antara rata-rata berat yang dikonsumsi oleh keluarga kelaparan dan tidak kelaparan, masing-masing 8.11 gram dan 17.63 gram. (Tabel 30).

Rata-rata konsumsi buah-buahan per hari baik pada keluarga kelaparan dan tidak kelaparan masih relatif rendah. Pada keluarga kelaparan konsumsi buah-buahan 4.76 gram jeruk, 4.43 gram mangga, 0.74 gram pisang, 0.64 gram semangka, 0.28 gram nangka, 0.08 gram pepaya dan 0.03 gram melon. Pada keluarga tidak kelaparan konsumsi buah-buahan 21.21 gram jeruk, 9.24 gram mangga, 2.85 gram pisang, 1.45 gram semangka, 1.31 gram nangka, 1.39 gram pepaya dan 2.17 gram melon. Berdasarkan analisis uji beda t tidak terdapat perbedaan yang nyata ( $p > 0.05$ ) rata-rata berat konsumsi buah-buahan per hari antara keluarga kelaparan dan tidak kelaparan. (Tabel 30).

## 6.4 Peran Modal Sosial Dalam Pencegahan Kejadian Kelaparan

Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai keseluruhan sumberdaya baik yang aktual maupun potensial yang dimiliki seseorang berkat adanya jaringan hubungan secara kelembagaan yang terpelihara dengan baik, yang mana setiap anggota dalam kelembagaan tersebut memperoleh keuntungan dari modal yang dimiliki secara kolektif (Syahra et al. 2000, Winter 2000, [http://www.viet-studies.org/Bourdieu\\_capital.htm](http://www.viet-studies.org/Bourdieu_capital.htm)). Coleman menyebutkan bahwa fungsi yang dapat diidentifikasi dari modal sosial adalah nilai dari aspek-aspek struktur sosial untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya. Dalam penelitian ini modal sosial dilihat dari keterlibatan dalam kelompok, kerjasama diantara warga dan norma sosial cultural. Sebaran Contoh menurut jumlah organisasi yang diikuti dapat dilihat pada Tabel 31.

Tabel 31. Sebaran contoh menurut jumlah organisasi yang diikuti berdasarkan desa dan kota

Jumlah Organisasi yang diikuti	Kecamatan				Total		Sig T-test
	Desa		Kota		n	%	
	n	%	n	%			
Tidak ada Mengikuti:	23	38.3	19	31.7	42	35.0	
1	30	50.0	34	56.7	64	53.3	0.126
2	7	11.7	7	11.7	14	11.7	
Total	60	100.0	60	100.0	120	100.0	

Sebaran contoh berdasarkan jumlah organisasi yang diikuti adalah lebih dari setengah jumlah contoh (53.3) mengikuti organisasi sebanyak satu organisasi, 35 persen tidak mengikuti organisasi apa pun, dan sisanya (11.7%) mengikuti dua organisasi sekaligus (Tabel31). Di desa setengah contoh (50%) contoh mengikuti satu organisasi, kemudian sebanyak 38.3 persen tidak mengikuti organisasi apa pun, dan sisanya (11.7%) contoh mengikuti dua organisasi sekaligus. Di kota lebih dari setengah (56.7%) mengikuti satu organisasi, kemudian sebanyak 31.7 persen tidak

mengikuti organisasi, dan sisanya (11.7%) mengikuti dua organisasi. Hasil uji beda T-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata ( $p>0.05$ ) jumlah organisasi yang diikuti oleh contoh di desa dengan contoh di kota.

Sebaran contoh menurut jumlah organisasi yang diikuti berdasarkan status ketahanan pangan disajikan pada tabel 32. Pada rumahtangga kecaparan, lebih dari setengah rumahtangga kecaparan (52%) mengikuti hanya satu organisasi, kemudian sebanyak 40 persen tidak mengikuti organisasi apa pun, dan sebanyak 8 persen mengikuti dua organisasi sekaligus. Pada rumahtangga tidak kecaparan, lebih dari setengah contoh (53.7%) hanya mengikuti satu jenis organisasi, sebanyak 35 persen tidak mengikuti organisasi apa pun, dan sisanya (12.6%) mengikuti dua organisasi.

Tabel 32. Sebaran contoh menurut jumlah organisasi yang diikuti berdasarkan status ketahanan pangan

Jumlah Organisasi yang diikuti	Tingkat ketahanan pangan				Total		Sig. T-test
	Kelaparan		Tidak Kelaparan				
	n	%	n	%	n	%	
Tidak ada	10	40	32	33.7	42	35	
Mengikuti:							
1	13	52	51	53.7	64	53.3	0.880
2	2	8	12	12.6	14	11.7	
Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0	

Uji beda T-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata ( $p>0.05$ ) jumlah organisasi yang diikuti oleh rumahtangga yang mengalami kelaparan dengan yang diikuti rumahtangga tidak kecaparan. Kurangnya keikutsertaan mereka diorganisasi karena masih kurangnya peran pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat akan keterlibatannya baik dalam organisasi maupun dalam kegiatan pemberdayaan lainnya.

Tabel 33. Sebaran contoh menurut peran dalam organisasi berdasarkan desa dan kota

Peran dalam organisasi	Kecamatan				Total		Sig. T-test
	Desa		Kota		n	%	
	n	%	n	%			
Tidak berorganisasi	23	38.3	19	31.7	42	35.0	0.576
Ketua	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
Pengurus	7	11.7	2	3.3	9	7.5	
anggota	30	50	39	65	69	57.5	
Total	60	100.0	60	100.0	120	100.0	

Secara keseluruhan, lebih dari setengah (57.5%) contoh berperan sebagai anggota dalam organisasi, 7.5 persen sebagai berperan sebagai pengurus, dan tidak ada contoh yang berperan sebagai ketua dalam organisasi (Tabel 33).

Tabel 34. Sebaran contoh menurut peran dalam organisasi yang diikuti berdasarkan status ketahanan pangan

Jumlah Organisasi yang diikuti	Tingkat ketahanan pangan				Total		Sig. T-test
	Kelaparan		Tidak Kelaparan		n	%	
	n	%	n	%			
Tidak berorganisasi	10	40.0	32	33.7	42	35.0	0.263
Ketua	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
Pengurus	1	4.0	8	8.4	9	7.5	
anggota	14	56.0	55	57.9	69	57.5	
Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0	



Di desa, sebaran terbanyak rumahtangga (50%) berperan sebagai anggota dan hanya 11.7 persen yang berperan sebagai pengurus dalam organisasi. Di kota, sebagian besar contoh (65%) berperan sebagai anggota dan sisanya (3.3%) berperan sebagai pengurus. Hasil uji beda t test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata ( $p>0.05$ ) peran contoh dalam organisasi di desa dengan di kota.

Sebaran contoh menurut peran dalam organisasi yang diikuti berdasarkan status ketahanan pangan disajikan pada tabel 34. Lebih dari setengah (56%) contoh rumahtangga kecaparan hanya berperan sebagai anggota dan 4 persen lainnya berperan sebagai pengurus dalam organisasi.

Tabel 35. Sebaran contoh menurut bentuk perubahan keterlibatan dalam organisasi berdasarkan desa dan kota

Perubahan Keterlibatan	Kecamatan				Total		Sig. t-test
	Desa		Kota		n	%	
	n	%	n	%			
Bertambah	3	5.0	2	3.3	5	4.2	0.126
Sama	9	15.0	9	15.0	18	15.0	
Berkurang	25	41.7	30	50.0	55	45.8	
Tidak menjawab	23	38.3	19	31.7	42	35.0	
Total	60	100.0	60	100.0	120	100.0	

Pada rumahtangga tidak kecaparan, sebanyak 57.9 persen contoh berperan sebagai anggota dan sebanyak 8.4 persen berperan sebagai pengurus. Hasil uji beda T-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata ( $p>0.05$ ) peran contoh dalam organisasi pada rumahtangga kecaparan dan rumahtangga tidak kecaparan.

Sebaran contoh menurut perubahan keterlibatan dalam organisasi adalah sebanyak 15 persen tetap atau sama dengan kondisi sebelumnya, 45.8 persen berkurang, dan hanya 4.2 persen yang bertambah (Tabel 35). Secara rinci di desa, hampir setengah (41.7%) contoh berkurang keterlibatannya dalam organisasi, 15 persennya sama atau tetap, dan sisanya (5%) menyatakan keterlibatannya dalam berorganisasi bertambah. Di kota keadaannya tidak jauh berbeda, setengah (50%)

contoh keterlibatan dalam organisasinya berkurang, 15 persen menyatakan keterlibatannya sama, dan sisanya (3.3%) bertambah keterlibatannya dalam organisasi. Hasil uji beda T-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata ( $p>0.05$ ) keterlibatan dalam organisasi di desa dan di kota.

Tabel 36. Sebaran contoh menurut bentuk perubahan keterlibatan dalam organisasi berdasarkan status ketahanan pangan

Perubahan Keterlibatan	Tingkat ketahanan pangan				Total		Sig. T-test
	Kekaparan		Tidak kecaparan		n	%	
	n	%	n	%			
Bertambah	1	4.0	4	4.2	5	4.2	0.318
Sama	4	16.0	14	14.7	18	15.0	
Berkurang	10	40.0	45	47.4	55	45.8	
Tidak menjawab	10	40.0	32	33.7	42	35.0	
Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0	

Sebaran contoh pada rumahtangga kecaparan, terdapat sebanyak 40 persen contoh yang menyatakan keterlibatannya dalam organisasi berkurang, 16 persen lainnya sama, dan sisanya (4%) bertambah. Pada rumahtangga tidak kecaparan, sebanyak 47.4 persen contoh menyatakan keterlibatannya dalam organisasi berkurang, 14.7 persen sama, dan sisanya (4.2%) menyatakan bertambah (Tabel 36). Hasil uji beda T-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata ( $p>0.05$ ) keterlibatan organisasi pada rumahtangga kecaparan dan tidak kecaparan.

Tabel 37. Sebaran contoh menurut keaktifan memberi bantuan kepada masyarakat berdasarkan desa dan kota

Bentuk dukungan	Kecamatan				Total		Sig. T-test
	Desa		Kota		n	%	
	n	%	n	%			
Ya	34	56.7	44	73.3	78	65.0	0.001
Tidak	26	43.3	16	26.7	42	35.0	
Total	60	100.0	60	100.0	120	100.0	

Keaktifan contoh dalam memberikan bantuan kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel 37. Lebih dari setengah (65%) contoh aktif dalam memberikan bantuan dan sisanya (35%) tidak aktif. Kondisi ini terjadi di desa dan di kota, keaktifan contoh dalam memberi bantuan kepada masyarakat cukup baik (56.7% dan 73.3%), dan yang tidak aktif sebanyak 43.3 persen dan 26.7 persen. Hasil uji beda T-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata ( $p < 0.05$ ) keaktifan memberikan bantuan kepada masyarakat di desa dan di kota.

Tabel 38. Sebaran contoh menurut keaktifan memberi bantuan kepada masyarakat berdasarkan status ketahanan pangan

Bentuk dukungan	Tingkat ketahanan pangan				Total		Sig. T-test
	Kekaparan		Tidak kecaparan				
	n	%	n	%	n	%	
Ya	14	56.0	64	67.4	78	65.0	0.115
Tidak	11	44.0	31	32.6	42	35.0	
Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0	

Pada rumahtangga kecaparan, lebih dari setengah (56%) contoh aktif memberikan bantuan dan sisanya (44%) tidak aktif. Pada rumahtangga tidak kecaparan, sebagian besar contoh (67.4%) aktif memberikan bantuan dan sisanya (32.6%) tidak aktif (Tabel 38). Hasil uji beda menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata ( $p > 0.05$ ) keaktifan memberikan bantuan kepada masyarakat pada rumahtangga kecaparan dan tidak kecaparan.

Tabel 39. Sebaran contoh menurut curahan waktu untuk membantu masyarakat berdasarkan desa dan kota

Curahan waktu	Kecamatan				Total		Sig. T-test
	Desa		Kota				
	n	%	n	%	n	%	
Tidak	29	48.3	23	38.3	52	43.3	0.359
< 10 jam/bln	29	48.3	35	58.3	64	53.3	
> 10 jam/bln	2	3.3	2	3.3	4	3.3	
Total	60	100.0	60	100.0	120	100.0	

Berdasarkan tabel 39, diketahui sebaran contoh menurut curahan waktu yang digunakan untuk membantu masyarakat, sebanyak 53.3 persen contoh mencurahkan waktunya sebanyak kurang dari 10 jam per bulan, 3.3 persen lainnya mencurahkan waktunya sebanyak lebih dari 10 jam per bulan.

Tabel 40. Sebaran contoh menurut curahan waktu untuk membantu masyarakat berdasarkan status ketahanan pangan

Curahan waktu	Tingkat ketahanan pangan				Total		Sig. T-test
	Kelaparan		Tidak kelaparan		n	%	
	n	%	n	%			
Tidak < 10 jam/bln	11	44.0	41	43.2	52	43.3	0.204
> 10 jam/bln	2	8.0	2	2.1	4	3.3	
Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0	

Di desa, contoh yang mencurahkan waktu kurang dari 10 jam per bulan lebih banyak (48.3%) dibandingkan dengan contoh yang mencurahkan waktunya lebih dari 10 jam per bulan (3.3%). Begitu pula di kota, contoh yang mencurahkan waktu kurang dari 10 jam per bulan lebih banyak (58.3%) dibandingkan dengan yang mencurahkan waktu lebih dari 10 jam (3.3%). Hasil uji beda menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata ( $p > 0.05$ ) di desa dan di kota.

Dari Tabel 40 terlihat bahwa pada rumahtangga kecaparan, contoh yang mencurahkan waktu kurang dari 10 jam per bulan lebih banyak (48%) dibandingkan dengan contoh yang mencurahkan waktunya lebih dari 10 jam per bulan (8%). Begitu pula pada rumahtangga tidak kecaparan, contoh yang mencurahkan waktu kurang dari 10 jam per bulan lebih banyak (54.7%) dibandingkan dengan yang mencurahkan waktu lebih dari 10 jam (2.1%). Hasil uji beda menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata ( $p > 0.05$ ) pada rumahtangga kecaparan dan tidak kecaparan.

Sebaran contoh berdasarkan tempat meminta bantuan disajikan pada tabel 41. Sebagian besar contoh (79.2%) meminta bantuan kepada

tetangga, kemudian meminta bantuan kepada saudara (16.7%), dan sisanya (4.2%) kepada tengkulak.

Tabel 41. Sebaran contoh menurut tempat meminta bantuan berdasarkan desa dan kota

Tempat meminta bantuan ekonomi	Kecamatan				Total		Sig. T-test
	Desa		Kota		n	%	
	n	%	n	%			
Keluarga	12	20.0	8	13.3	20	16.7	0.211
Tetangga	45	75.0	50	83.3	95	79.2	
Tengkulak	3	5.0	2	3.3	5	4.2	
Total	60	100.0	60	100.0	120	100.0	

Di desa, contoh lebih memilih meminta bantuan kepada tetangga (75%), kemudian bila tidak mendapat bantuan dari tetangga maka meminta bantuan kepada keluarga (20%) dan sisanya (5%) meminta bantuan kepada tengkulak. Di kota juga demikian, sebagian besar (83.3%) contoh meminta bantuan kepada tetangga, kemudian meminta bantuan kepada keluarga (13.3%) dan sisanya (3.3%) meminta bantuan kepada tengkulak. Hasil uji beda menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata ( $p > 0.05$ ) rata-rata di desa dan di kota.

Tabel 42. Sebaran contoh menurut tempat meminta bantuan berdasarkan status ketahanan pangan

Tempat meminta bantuan ekonomi	Tingkat ketahanan pangan				Total		Sig. T-test
	Kekaparan		Kekaparan		n	%	
	n	%	n	%			
Keluarga	6	24.0	14	14.7	20	16.7	0.245
Tetangga	18	72.0	77	81.1	95	79.2	
Tengkulak	1	4.0	4	4.2	5	4.2	
Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0	

Di rumahtangga kecaparan, contoh lebih memilih meminta bantuan kepada tetangga (72%), kemudian bila tidak mendapat bantuan dari tetangga maka meminta bantuan kepada keluarga (24%) dan sisanya (4%) meminta bantuan kepada tengkulak (Tabel 42). Di kota juga demikian, sebagian besar (81.1%) contoh meminta bantuan kepada

tetangga, kemudian meminta bantuan kepada keluarga (14.7%) dan sisanya (4.2%) meminta bantuan kepada tengkulak. Hasil uji beda menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata ( $p>0.05$ ) rata-rata pada rumah tangga kecaparan dan tidak kecaparan.

### 6.4.1 Partisipasi, Aksi Kolektif dan Kerjasama Warga

Keaktifan seseorang dalam suatu kelompok masyarakat, bisa dilihat dari keikutsertaan / partisipasi dan kerjasama antar warga dalam setiap kegiatan kemasyarakatan baik yang berhubungan dengan pemerintahan desa maupun sosial kemasyarakatan. Sebaran contoh menurut partisipasi dalam program pemerintahan dapat dilihat pada Tabel 43.

Tabel 43. Sebaran contoh menurut partisipasi dalam membuat APBdes berdasarkan desa dan kota

Partisipasi	Kecamatan				Total		Sig. T-test
	Desa		Kota		n	%	
	n	%	n	%			
Tidak pernah	57	95.0	58	96.7	115	95.8	0.365
Pernah :							
1. sekali	3	5.0	2	3.3	5	4.2	
2. beberapa kali	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
3. sering	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
Tidak menjawab	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0	

Partisipasi contoh dalam membuat APBdes sangat rendah, secara keseluruhan yang pernah ikut berpartisipasi hanya sebanyak 4.2 persen, itupun hanya sekali saja (Tabel 43). Di desa partisipasi contoh dalam membuat APBdes lebih besar daripada di kota. Di desa, contoh yang ikut berpartisipasi walaupun hanya satu kali adalah sebanyak 5 persen, sedangkan di kota hanya sebanyak 3.3 persen. Hasil uji beda menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata ( $p>0.05$ ) partisipasi contoh di desa dan di kota.

Pada rumahtangga kelaparan, contoh yang ikut berpartisipasi walaupun hanya satu kali adalah sebanyak 8 persen, sedangkan di kota sebanyak 3.2 persen (Tabel 44). Hasil uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata ( $p < 0.05$ ) partisipasi contoh pada rumahtangga kelaparan dan tidak kelaparan.

Tabel 44. Sebaran contoh menurut partisipasi dalam membuat APBdes berdasarkan status ketahanan pangan

Partisipasi	Tingkat ketahanan pangan				Total		Sig. T-test
	Kelaparan		Tidak kelaparan		n	%	
	n	%	n	%			
Tidak pernah	23	92	92	96.8	115	95.8	0.036
Pernah :							
1. sekali	2	8.0	3	3.2	5	4.2	
2. beberapa kali	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
3. sering	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
Tidak menjawab	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0	

Masalah warga belum menjadi pembicaraan utama dalam pengembangan desa atau kota, terlihat dari Tabel 45 bahwa hanya 4.2% dari contoh yang sering membicarakan masalah warga, sedangkan sisanya hanya membicarakannya sesekali atau bahkan 25% contoh tidak memberikan jawaban.

Tabel 45. Sebaran contoh menurut partisipasi dalam membicarakan masalah warga berdasarkan kota dan desa

Partisipasi	Kecamatan				Total		Sig. T-test
	Desa		Kota		n	%	
	n	%	n	%			
Tidak pernah	25	41.7	27	45.0	52	43.3	0.027
Pernah :							
1. sekali	8	13.3	8	13.3	16	13.3	
2. beberapa kali	6	10.0	11	18.3	17	14.2	
3. sering	3	5.0	2	3.3	5	4.2	
Tidak menjawab	18	30.0	12	20.0	30	25.0	
Total	60	100.0	60	100.0	120	100.0	

Partisipasi contoh dalam membicarakan masalah warga secara keseluruhan masih rendah, dari sejumlah contoh yang berpartisipasi sebanyak 14.2 persen menyatakan ikut berpartisipasi dalam beberapa kesempatan, 4.2 persen lainnya sering, dan 13.3 persen sisanya hanya ikut satu kali (Tabel 46).

Tabel 46. Sebaran contoh menurut partisipasi dalam membicarakan masalah warga berdasarkan status ketahanan pangan

Partisipasi	Tingkat ketahanan pangan				Total		Sig. T-test
	Kelaparan		Tidak Kelaparan				
	n	%	n	%	n	%	
Tidak pernah	8	32.0	44	46.3	52	43.3	0.081
Pernah :							
1. sekali	3	12.0	13	13.7	16	13.3	
2. beberapa kali	3	12.0	14	14.7	17	14.2	
3. sering	2	8.0	3	3.2	5	4.2	
Tidak menjawab	9	36.0	21	22.1	30	25	
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>100.0</b>	<b>95</b>	<b>100.0</b>	<b>120</b>	<b>100.0</b>	

Di desa, sebanyak 6 persen contoh berpartisipasi sebanyak beberapa kali dalam membicarakan masalah warga, 13.3 persen hanya sekali dan 3 persen lainnya menyatakan sering. Di kota terdapat sebanyak 18.3 persen contoh yang beberapa kali berpartisipasi dalam membicarakan masalah warga, sebanyak 13.3 persen menyatakan sekali, dan sisanya (3.3%) menyatakan sering. Hasil uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata ( $p < 0.05$ ) partisipasi dalam membicarakan masalah warga di desa dan di kota.

Pada rumahtangga kecaparan, sebanyak 12 persen contoh berpartisipasi sebanyak beberapa kali dalam membicarakan masalah warga, 12 persen hanya sekali dan 8 persen lainnya menyatakan sering (Tabel 46). Pada rumahtangga tidak kecaparan terdapat sebanyak 14.7 persen contoh yang beberapa kali berpartisipasi dalam membicarakan masalah warga, sebanyak 13.7 persen menyatakan sekali, dan sisanya (3.2%) menyatakan sering. Hasil uji beda menunjukkan bahwa tidak



terdapat perbedaan yang nyata ( $p>0.05$ ) partisipasi dalam membicarakan masalah warga pada rumahtangga kecaparan dan tidak kecaparan.

Partisipasi contoh dalam bergotong royong sudah cukup baik, yaitu sekitar 58.3 persen beberapa kali menyatakan ikut bergotong royong, 6 persen menyatakan sering, dan 3.3 persen lainnya hanya pernah satu kali ikut bergotong royong (Tabel 47).

Tabel 47. Sebaran contoh menurut partisipasi dalam gotong royong berdasarkan kota dan desa

Partisipasi	Kecamatan				Total		Sig. T-test
	Desa		Kota		n	%	
	n	%	n	%			
Tidak pernah	9	10.0	6	10.0	15	12.5	
Pernah :							
1. sekali	2	3.3	3	5.0	5	4.2	
2. beberapa kali	31	51.7	39	65.0	70	58.3	0.087
3. sering	6	10.0	4	6.7	10	0.3	
Tidak menjawab	12	20.0	8	13.3	20	16.7	
Total	60	100.0	60	100.0	120	100.0	

Berdasarkan Tabel 47 terlihat bahwa di desa, sebanyak 65 persen contoh pernah beberapa kali ikut bergotong royong, 10 persen sering ikut, dan sisanya (2%) hanya pernah ikut satu kali. Di kota, partisipasi dalam bergotong royong lebih baik daripada di desa yaitu sebagian besar (65%) contoh pernah beberapa kali ikut berpartisipasi dalam gotong royong, 6.7 persen menyatakan sering, dan 5 persen lainnya menyatakan pernah ikut satu kali. Uji beda menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata ( $p>0.05$ ) rata-rata di desa dan di kota.

Pada rumahtangga kecaparan, sebanyak 48 persen contoh pernah beberapa kali ikut bergotong royong, 12 persen sering ikut, dan sisanya (4%) hanya pernah ikut satu kali (Tabel 48). Pada rumahtangga tidak kelaparan, partisipasi dalam bergotong royong lebih baik daripada rumahtangga kelaparan yaitu sebagian besar (61.1%) contoh pernah beberapa kali ikut berpartisipasi dalam gotong royong, 7.4 persen

menyatakan sering, dan 4.2 persen lainnya menyatakan pernah ikut satu kali.

Tabel 48. Sebaran contoh menurut partisipasi dalam gotong royong berdasarkan status ketahanan pangan

Partisipasi	Tingkat ketahanan pangan				Total		Sig. T-test
	Kelaparan		Tidak Kelaparan				
	n	%	n	%	n	%	
Tidak pernah	2	8.0	13	13.7	15	12.5	
Pernah :							
1. sekali	1	4.0	4	4.2	5	4.2	
2. beberapa kali	12	48.0	58	61.1	70	5.3	0.015
3. sering	3	12.0	7	7.4	10	8.3	
Tidak menjawab	7	28.0	13	13.7	20	16.7	
Total	25	100.0	95	100.0	120	100.0	

Uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata ( $p < 0.05$ ) antara rata-rata tingkat partisipasi dalam gotong royong pada rumahtangga kecaparan dan rumahtangga tidak kecaparan.

#### 6.4.2 Norma Sosio-Kultural

Norma sosio-kultural suatu masyarakat akan menentukan kemampuan modal sosial masyarakat tersebut. Keterbukaan anggota masyarakat dan saling percaya akan membangun modal sosial yang menguntungkan warga masyarakat tersebut. Sebaran contoh berdasarkan keterbukaan terhadap tetangga yang diinginkan dapat dilihat pada Tabel 49.

Secara keseluruhan untuk tipe tetangga berbeda suku, sebagian besar contoh (63.3%) menyatakan tidak keberatan bertetangga dengan suku yang berbeda. Di desa dan kota persentase contoh yang tidak keberatan bertetangga dengan tetangga yang berbeda suku sebanyak 66.7 persen dan 60 persen.

Untuk tipe tetangga yang berbeda agama, secara keseluruhan sebanyak 70.8 persen contoh keberatan. Di desa dan kota persentase

contoh yang keberatan bertetangga yang berbeda agama adalah masing-masing 65 persen dan 85 persen. Kondisi ini diduga karena rasa kurang nyaman contoh bila bertetangga dengan tetangga yang berbeda agama.

Tabel 49. Sebaran contoh menurut tipe tetangga yang diinginkan berdasarkan desa dan kota

Tipe tetangga	Kecamatan				Total		Sig. T-test
	Desa		Kota		n	%	
	n	%	n	%			
<i>Beda suku</i>							
Tidak diinginkan	7	11.7	10	16.7	17	14.2	0.617
Diinginkan	40	66.7	36	60	76	63.3	
Tidak menjawab	13	21.7	14	23.3	27	22.5	
<i>Beda agama</i>							
Tidak diinginkan	39	65	46	76.7	85	70.8	0.031
Diinginkan	6	10	4	6.7	10	8.3	
Tidak menjawab	15	25	10	16.7	25	20.8	
<i>Rumahtangga Manula</i>							
Tidak diinginkan	3	5	2	3.3	5	4.2	0.003
Diinginkan	33	55	42	70	75	62.5	
Tidak menjawab	24	40	16	26.7	40	33.3	
<i>Penyakit menular</i>							
Tidak diinginkan	42	70	48	80	90	75	0.12
Diinginkan	0	0	0	0	0	0	
Tidak menjawab	18	30	12	20	30	25	
<i>Rumahtangga miskin</i>							
Tidak diinginkan	3	5	2	3.3	5	4.2	0.044
Diinginkan	27	45	30	50	57	47.5	
Tidak menjawab	30	50	28	46.7	58	48.3	

Tipe tetangga rumahtangga manula secara keseluruhan contoh menyatakan tidak keberatan (62.5%). Di desa dan kota sebagian besar contoh (55% dan 70%) menyatakan tidak keberatan memiliki tetangga rumahtangga manula. Untuk tipe tetangga yang menderita penyakit menular, sebagian besar contoh (75%) menyatakan keberatan bertetangga dengan tipe tetangga ini. Secara rinci di desa dan kota pun sama saja, sebagian besar contoh (70% dan 80%) menyatakan keberatan memiliki tetangga seperti itu. Untuk tipe tetangga rumahtangga miskin, secara keseluruhan sebagian besar contoh menyatakan tidak keberatan memiliki tipe tetangga ini. Hasil uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata ( $p < 0.05$ ) tipe tetangga yang diinginkan oleh contoh di desa dan di kota yaitu tipe tetangga beda agama, rumahtangga manula, penyakit menular, dan rumahtangga miskin.

Pada rumahtangga kecaparan dan tidak kecaparan persentase contoh yang tidak keberatan bertetangga dengan tetangga yang berbeda suku sebanyak 72 persen dan 61.1 persen (Tabel 50) . Untuk tipe tetangga yang berbeda agama, Pada rumahtangga kecaparan dan tidak kecaparan persentase contoh yang keberatan bertetangga yang berbeda agama adalah masing-masing 64 persen dan 72.6 persen. Kondisi ini diduga karena rasa kurang nyaman contoh bila bertetangga dengan tetangga yang berbeda agama.

Pada rumahtangga kecaparan dan tidak kecaparan, sebagian besar contoh (56% dan 64.2%) menyatakan tidak keberatan memiliki tetangga rumahtangga manula. Untuk tipe tetangga yang menderita penyakit menular, pada rumahtangga kecaparan dan tidak kecaparan sebagian besar contoh (64% dan 77.9%) menyatakan keberatan memiliki tetangga seperti itu. Untuk tipe tetangga rumahtangga miskin, secara keseluruhan sebagian besar contoh menyatakan tidak keberatan memiliki tipe tetangga ini. Hasil uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata ( $p < 0.05$ ) tipe tetangga yang diinginkan oleh rumahtangga kecaparan dan tidak kecaparan yaitu tipe tetangga beda suku, rumahtangga manula, dan penyakit menular.

Tabel 50. Sebaran contoh menurut tipe tetangga yang diinginkan berdasarkan status ketahanan pangan

Tipe tetangga	Tingkat ketahanan pangan				Total		Sig. T-test
	Kekaparan		Kekaparan		n	%	
	n	%	n	%			
<i>Beda suku</i>							
Tidak diinginkan	3	12	14	14.7	17	14.2	0.059
Diinginkan	18	72	58	61.1	76	63.3	
Tidak menjawab	4	16	23	24.2	27	22.5	
<i>Beda agama</i>							
Tidak diinginkan	16	64	69	72.6	85	70.8	0.750
Diinginkan	4	16	6	6.3	10	8.3	
Tidak menjawab	5	20	20	21.1	25	20.8	
<i>Rumahtangga Manula</i>							
Tidak diinginkan	0	0	5	5.3	5	4.2	0.091
Diinginkan	14	56	61	64.2	75	62.5	
Tidak menjawab	11	44	29	30.5	40	33.3	
<i>Penyakit menular</i>							
Tidak diinginkan	16	64	74	77.9	90	75	0.018
Diinginkan	0	0	0	0	0	0	
Tidak menjawab	9	36	21	22.1	30	25	
<i>Rumahtangga miskin</i>							
Tidak diinginkan	0	0	5	5.3	5	4.2	0.467
Diinginkan	9	36	48	50.5	57	47.5	
Tidak menjawab	16	64	42	44.2	58	48.3	

### 6.4.3 Bantuan kepada Warga

Bantuan kepada warga merupakan bentuk kekuatan modal sosial. Modal sosial akan kuat salah satunya adalah banyaknya jaringan atau kuatnya jaringan antar stackholder baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Dari Tabel 51 terlihat bahwa sebagian besar contoh (60%) menyatakan bahwa tidak ada organisasi atau perusahaan yang membantu di wilayah tempat tinggal mereka. Sebaran contoh di desa, sebanyak 50 persen contoh menyatakan tidak ada perusahaan atau organisasi yang membantu, 33.3 persen menyatakan ada, dan hanya 16.7 persen yang menyatakan tidak tahu.

Tabel 51. Sebaran contoh menurut ada tidaknya organisasi/perusahaan yang membantu berdasarkan desa dan kota

Perusahaan yang membantu	Kecamatan				Total		Sig. T-test
	Desa		Kota		n	%	
	n	%	n	%			
Ada	20	33.3	12	20.0	32	26.7	0.027
Tidak	30	50.0	42	70.0	72	60.0	
Tidak tahu	10	16.7	6	10.0	16	13.3	
Total	60	100.0	60	100.0	120	100	

Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di kota, sebanyak 70 persen contoh menyatakan tidak ada organisasi/perusahaan yang membantu, 10 persen menyatakan tidak tahu, dan sebanyak 20% menyatakan ada organisasi atau perusahaan yang membantu di tempatnya. Hasil uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata ( $p < 0.05$ ) rata-rata di desa dan di kota.

Tabel 52. Sebaran contoh menurut ada tidaknya organisasi/perusahaan yang membantu berdasarkan status ketahanan pangan

Perusahaan yang membantu	Tingkat ketahanan pangan				Total		Sig. T-test
	Kekaparan		Tidak kecaparan		n	%	
	n	%	n	%			
Ada	9	36.0	23	24.2	32	26.7	0.034
Tidak	11	44.0	61	64.2	72	60.0	
Tidak tahu	5	20.0	11	11.6	16	13.3	
Total	25	100.0	95	100.0	120	100	

Sebaran contoh pada rumah tangga kecaparan, sebanyak 44 persen contoh menyatakan tidak ada, 36 persen menyatakan ada, dan hanya 20 persen yang menyatakan tidak tahu (Tabel 52). Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada rumah tangga tidak kecaparan, sebanyak 60 persen contoh menyatakan tidak ada, 13.3 persen menyatakan tidak tahu, dan sebanyak 26.7 persen menyatakan ada organisasi atau perusahaan yang membantu di desa ini.

Tabel 53. Sebaran contoh menurut partisipasi dalam kegiatan bantuan perusahaan berdasarkan desa dan kota

Partisipasi	Kecamatan				Total	
	Desa		Kota		n	%
	n	%	n	%		
Memberi informasi kepada masyarakat (misalnya tentang perbaikan gizi balita, penanggulangan penyakit, penyuluhan pertanian, bantuan modal dan kredit/pinjaman dan sebagainya)						
Berpartisipasi	1	1.7	3	5	4	3.3
Membantu menyelesaikan masalah bersama-sama (misal usaha mengatasi bencana kelaparan, gizi buruk, kemiskinan, kerusakan lingkungan/hutan dan sebagainya)						
Berpartisipasi	0	0	0	0	0	0
Menangani masalah tertentu secara langsung (misalnya, membangun pipa air bersih, membangun sumur, memberantas sarang nyamuk, dan sebagainya)						
Berpartisipasi	0	0	0	0	0	0
Membantu anggota masyarakat meningkatkan penghasilannya (penyediaan pasar untuk komoditas)						
Berpartisipasi	0	0	30	50	30	25
Secara khusus membantu orang miskin untuk memperbaiki hidup mereka (bantuan uang, pekerjaan, modal usaha, dan sebagainya)						
Berpartisipasi	18	30	12	20	30	25
Secara khusus membantu perempuan dan anak untuk memperbaiki kehidupan mereka						
Berpartisipasi	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel 53 dapat dilihat partisipasi contoh dalam kegiatan bantuan perusahaan secara umum sangat rendah. Pada kegiatan memberi informasi kepada masyarakat hanya 3.3 persen yang berpartisipasi. Hasil uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata ( $p < 0.05$ ) rata-rata pada rumahtangg kecaparan dan tidak kecaparan.

Partisipasi yang cukup besar adalah pada kegiatan peningkatan penghasilan (25%) dan bantuan kepada orang miskin (25%). Di desa yang berpartisipasi dalam memberikan informasi kepada msyarakat 1.7 persen dan 5 persen di kota. Partisipasi dalam kegiatan meningkatkan penghasilan hanya diikuti oleh contoh di kota (50%). Pada kegiatan bantuan kepada orang miskin, partisipasi di desa (30%) dan di kota (20%).

Tabel 54. Sebaran contoh menurut partisipasi dalam kegiatan bantuan perusahaan berdasarkan status ketahanan pangan

Partisipasi	Tingkat ketahanan pangan				Total	
	Kekaparan		Tidak Kekaparan			
	n	%	n	%	n	%
Memberi informasi kepada masyarakat (misalnya tentang perbaikan gizi balita, penanggulangan penyakit, penyuluhan pertanian, bantuan modal dan kredit/pinjaman dan sebagainya)						
Berpartisipasi	1	4	3	3.2	4	3.3
Membantu menyelesaikan masalah bersama-sama (misal usaha mengatasi bencana kelaparan, gizi buruk, kemiskinan, kerusakan lingkungan/hutan dan sebagainya)						
Berpartisipasi	0	0	0	0	0	0
Menangani masalah tertentu secara langsung (misalnya, membangun pipa air bersih, membangun sumur, memberantas sarang nyamuk, dan sebagainya)						
Berpartisipasi	0	0	0	0	0	0
Membantu anggota masyarakat meningkatkan penghasilannya (penyediaan pasar untuk komoditas)						
Berpartisipasi	8	32	22	23.2	30	25
Secara khusus membantu orang miskin untuk memperbaiki hidup mereka (bantuan uang, pekerjaan, modal usaha, dan sebagainya)						
Berpartisipasi	13	52	17	17.9	30	25
Secara khusus membantu perempuan dan anak untuk memperbaiki kehidupan mereka						
Berpartisipasi	0	0	0	0	0	0
Lain-lain [sebutkan]:						
Berpartisipasi	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel 54, rumahtangga kekaparan yang berpartisipasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat 4 persen dan 3.2 persen adalah rumahtangga tidak kekaparan. Partisipasi dalam kegiatan meningkatkan penghasilan diikuti oleh contoh pada rumahtangga kekaparan (32%) dan rumahtangga tidak kekaparan (30%). Pada kegiatan bantuan kepada orang miskin, partisipasi oleh rumahtangga kekaparan (52%) dan rumahtangga tidak kekaparan (30%).

Tabel 55. Sebaran contoh menurut organisasi pemberi pelayanan yang lebih baik berdasarkan desa dan kota

Organisasi	Kecamatan				Total		Sig. T-test
	Desa		Kota				
	n	%	n	%	n	%	
LSM	5	8.3	5	8.3	10	8.3	0.107
Perusahaan	4	6.7	6	10.0	10	8.3	
Instansi pemerintah	35	58.3	34	56.7	69	57.5	
Tidak tahu	16	26.7	15	25.0	31	25.8	
Total	60	100.0	60	100.0	120	100.0	



Secara keseluruhan, sebanyak 57.5 persen contoh menyatakan bahwa pemerintah memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan organisasi atau perusahaan lain (Tabel 55). Sebaran di desa dan kota yang menyatakan hal yang sama adalah masing-masing sebesar 58.3 persen dan 56.7 persen. Hasil uji beda menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata ( $p>0.05$ ) rata-rata jawaban di desa dan di kota.

Bila dilihat dari anggapan yang lebih mampu dalam membantu masyarakat (Tabel 56), dari total contoh sebanyak 48.3 persen menyatakan bahwa pemerintah lebih mampu memberikan bantuan kepada masyarakat dibandingkan dengan organisasi atau perusahaan lain. Namun bila dilihat dari lokasi desa kota, maka contoh di daerah kota lebih banyak yang menyatakan bahwa pemerintah lebih mampu membantu dibanding organisasi lainnya, sedangkan di desa hanya 45 persen yang menganggap pemerintah lebih mampu. Namun demikian hasil uji beda menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata ( $p>0.05$ ) rata-rata jawaban di desa dan di kota.

Tabel 56. Sebaran contoh menurut organisasi yang dianggap lebih mampu membantu berdasarkan desa dan kota

Organisasi	Kecamatan				Total		Sig. T-test
	Desa		Kota		n	%	
	n	%	n	%			
LSM	2	3.3	3	5.0	5	4.2	0.247
Perusahaan	2	3.3	3	5.0	5	4.2	
Instansi pemerintah	27	45.0	31	51.7	58	48.3	
Tidak tahu	29	48.3	23	38.3	52	43.3	
Total	60	100.0	60	100.0	120	100.0	

## 6.5 Determinan Kelaparan

Regresi logistik digunakan dalam analisa untuk menemukan determinan kelaparan dan odd rasio atau peluang terjadinya kelaparan disuatu keluarga. Peubah tergantung dibuat dikotomi yaitu kelaparan = 0 dan tidak kelaparan =1. Demikian juga peubah bebas dikategorikan pada dua, tiga dan empat kategori agar dapat membandingkan risiko suatu keluarga pada kejadian kelaparan pada kategori sosial ekonomi.

Pengkategorian didasarkan pada kategori yang sudah umum dilakukan seperti tingkat pendidikan dikategorikan rendah (tidak sekolah dan SD), sedang (SMP dan SMA) dan tinggi (perguruan tinggi). Jumlah anggota keluarga dikategorikan berdasarkan kategori BKKBN yaitu kecil ( $\leq 4$  orang), sedang (5-6 orang) dan besar ( $\geq 7$  orang). Pendapat dikategorikan bawah garis kemiskinan dan diatas garis kemiskinan (Rose 1999).

Peubah sosial ekonomi yang akan dimasukkan pada model adalah peubah sosial ekonomi yang mempunyai hubungan signifikan dengan kejadian kelaparan atau ada perbedaan nilai tengah keluarga kelaparan dan tidak kelaparan berdasarkan uji nilai tengah yaitu jumlah anggota keluarga, pendidikan KK dan ibu, pengeluaran perkapita, Sedangkan pengambilan keputusan tidak dimasukkan dalam model, karena tidak berbeda nyata antara pengambilan keputusan di keluarga kelaparan dan tidak kelaparan. Hasil analisa regresi logistik disajikan pada lampiran 2. Hasil analisis menunjukkan hanya pengeluaran perkapita dengan kategori dibawah dan diatas garis kemiskinan yang berpengaruh terhadap kejadian kelaparan yaitu dengan odd ratio = 3.572 artinya keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan mempunyai resiko kelaparan sebesar 3.572 kali dibanding keluarga yang pendapatannya diatas garis kemiskinan. Adapun model logistiknya adalah:

$$\text{Log} \frac{F}{1-F} = -3.029 + 1.273 \text{ PKP}$$

Keterangan :

PKP = Pendapatan perkapita

## BAB VII

# MODEL OPTIMALISASI GIZI BALITA UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KELAPARAN

**O**ptimalisasi gizi balita dibuat dengan maksud untuk membuat rencana konsumsi bagi balita khususnya pada rumahtangga miskin, agar tingkat kecukupan gizinya dapat terpenuhi sesuai dengan daya beli, dan kebiasaan makan balita itu sendiri. Dalam optimalisasi gizi ada 3 hal yang harus dipertimbangkan yaitu angka kecukupan gizinya, daya beli keluarga khususnya untuk pangan balita, serta kebiasaan konsumsi.

### 7.1 Gambaran Umum Balita

**Umur.** Umur balita sebagai contoh dalam penelitian ini tersebar pada setiap kelompok umur yaitu kelompok umur 0-6 bulan, 7-12 bulan, 13-24 bulan, 25-36 bulan, 37-48 bulan dan 49-60 bulan (Tabel 57).

Tabel 57. Sebaran balita menurut kelompok umur

Kelompok Umur (bulan)	n	%
0-6	5	8.47
7-12	5	8.47
13-24	9	15.25
25-36	22	37.29
37-48	12	20.34
49-60	6	10.17
Total	59	100.00

Dari Tabel 57 terlihat bahwa proporsi terbesar balita berada pada kelompok umur 25-36 bulan (37.29%), menyusul kelompok umur 37-48 bulan (20.34%), 13-24 bulan (15.25%), dan proporsi terkecil balita pada umur 0-6 bulan dan 7-12 bulan masing-masing 8.47%.

**Status Gizi.** Pertumbuhan dan perkembangan anak yang normal dapat diketahui dengan cara melihat pertambahan berat badan anak (Krisnatuti & Yenrina 2000). Keadaan gizi seseorang dapat digambarkan melalui status gizi orang tersebut. Berikut ditunjukkan sebaran anak balita menurut kelompok usia dan status gizi.

Jika dilihat berdasarkan status gizi, sebagian besar anak balita mempunyai status gizi yang baik. Hanya 40% anak balita pada kelompok usia 0-6 bulan, 22.2% anak balita pada kelompok usia 13-24 tahun dan 9.1 % anak balita pada kelompok usia 25-36 bulan yang mempunyai status gizi kurang.

Tabel 58 Status gizi balita berdasarkan kelompok umur (BB/U)

Status gizi	Kelompok usia (bulan)												Total	
	0-6		7-12		13-24		25-36		37-48		49-60			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Gizi lebih (>2 SD)	0	0	0	0	0	0.0	1	4.5	1	8.3	0	0	2	3.4
Gizi baik (≥ -2 SD s/d 2 SD)	2	40	4	80	5	55.6	19	86.4	11	91	6	100	47	79.7
Gizi kurang (< -2 SD s/d ≥ -3 SD)	2	40	0	0	2	22.2	2	9.1	0	0.0	0	0	6	10.2
Gizi buruk (< -3 SD)	1	20	1	20	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0	4	6.8
Total	5	100	5	100	9	100	22	100	12	100	6	100	59	100

Terdapat 4.5 % anak balita pada kelompok usia 25-36 bulan dan 8.3 % anak balita pada kelompok usia 37-48 bulan yang mempunyai status gizi lebih. Akan tetapi masih terdapat masing-masing 20% balita pada kelompok usia 0-6 bulan dan 7-12 bulan dan 22.2 % balita dari kelompok usia 13-24 bulan yang mempunyai status gizi buruk. Status gizi berhubungan dengan penyakit infeksi dan intake zat gizi yang selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan anak. Hal ini sejalan dengan Khomsan (2003) yang menyatakan bahwa selain dipengaruhi oleh faktor genetik, pertumbuhan seorang anak juga dipengaruhi oleh intake zat gizi yang dikonsumsi dalam bentuk makanan. Jika tubuh kekurangan atau kelebihan

zat gizi akan dimanifestasikan dalam bentuk pertumbuhan yang tidak normal atau menyimpang.

## 7.2 Pengeluaran Konsumsi

Rata-rata pengeluaran pangan keluarga anak balita adalah sebesar Rp 345 734.1 perkapita/bulan atau Rp 28 416.5 perkapita/hari. Jumlah inilah yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar alokasi biaya konsumsi pangan dalam penyusunan menu makanan anak balita dari keluarga miskin. Biaya yang dihasilkan dari rancangan menu makanan diharapkan masih di bawah Rp 28 416.5 perhari sehingga sesuai dengan daya beli anak balita terhadap konsumsi pangannya.

Alokasi pengeluaran pangan digunakan untuk pembelian beberapa jenis kelompok pangan seperti pangan pokok (beras, mie, umbi-umbian), pangan nabati (kacang-kacangan, tahu, dan tempe), pangan hewani (ikan, daging, dan telur), sayur, buah, MP-ASI dan kelompok pangan lainnya (bumbu, minyak goreng, jajanan dan sebagainya). Berikut disajikan alokasi pengeluaran pangan harian keluarga anak balita per jenis kelompok pangan.

Tabel 59. Alokasi pengeluaran pangan keluarga anak balita tiap jenis kelompok pangan

Keterangan	Pengeluaran pangan per jenis kelompok pangan (Rp/hari)						
	Pokok	Nabati	Hewani	Sayur	Buah	MP-ASI	Lain-lain
Rata-rata	9945.2	1 198.9	6 163.8	1 518.2	2 227.8	1 253.8	6 108.8
Minimum	1 627.4	0.0	1 084.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Maksimum	41 810.7	7 537.0	23 380.8	13 956.2	27 923.3	19 000.0	35 073.9
Standar deviasi	5 137.3	1 316.2	4 725.0	1 975.8	3 744.6	2 879.7	4 822.9

Rata-rata pengeluaran pangan keluarga terbesar digunakan untuk kelompok pangan pokok (beras, mie, umbi-umbian) yaitu sebesar Rp 9 945.2 per hari. Sedangkan rata-rata pengeluaran pangan keluarga terkecil digunakan untuk kelompok nabati (Rp 1 198.9 per hari). Hal ini menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran pangan keluarga untuk pangan pokok mempunyai proporsi terbesar atau lebih diutamakan bila dibandingkan dengan kelompok pangan lainnya.

### 7.3 Rancangan Menu Makanan Harian Selama Dua Hari

Menurut Hardinsyah (1996), makanan sehat adalah makanan yang aman dikonsumsi dan menyediakan semua zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk hidup sehat. Makanan pokok seperti sereal dan umbi-umbian kaya akan energi terutama dari karbohidrat. Karena itu makanan ini berperan utama sebagai sumber zat tenaga (energi). Kemudian sebagai sumber zat pembangun (protein) berasal dari misalnya kacang-kacangan, telur, ikan, dan daging. Sedangkan sayur dan buah berperan sebagai zat pengatur (vitamin dan mineral). Oleh karena itu, dalam susunan (menu) makanan yang dikonsumsi sehari-hari harus mengandung zat-zat penting tersebut agar kebutuhan tubuh akan zat gizi dapat terpenuhi.

Terpenuhinya kebutuhan seseorang akan zat gizi dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan yang beragam, bergizi dan seimbang. Hal ini dimaksudkan agar jenis dan jumlah pangan yang akan dikonsumsi sesuai dengan Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS) dimana jika seseorang mengonsumsi makanan yang beragam maka kekurangan zat gizi pada jenis makanan yang satu akan dilengkapi oleh makanan yang lain sehingga diperoleh asupan zat gizi yang seimbang. Secara alami, komposisi zat gizi setiap jenis dan kelompok pangan memiliki keunggulan dan kelemahan tertentu (Ray 1996).

Pola konsumsi pangan yang bermutu gizi seimbang dapat dilakukan dengan cara sederhana yang terdiri dari makanan pokok (sumber energi), lauk pauk, sayur, buah dan susu (Riyadi 1996). Berdasarkan hal tersebut, menu makanan harian (2 hari) yang telah dirancang terdiri atas pangan pokok, pangan nabati, pangan hewani, sayur, buah dan tambahan lain (selingan) yang ditujukan untuk anak balita usia 7-12 bulan (menu A), 13-24 bulan (menu B), 25-36 bulan (menu C), 37-48 bulan (menu D), 49-60 bulan (menu E). Berikut ditampilkan salah satu contoh rancangan menu makanan satu hari untuk anak balita pada masing-masing kelompok usia beserta biaya konsumsi pangan per hari.

Tabel 60 Contoh rancangan menu makanan satu hari untuk anak balita ketiga kelompok usia

Menu	Jenis Pangan	Jumlah pangan		Biaya (Rp)	Kandungan zat gizi menu makanan					
		URT	Gr		Energi (Kal)	Protein (g)	Ca (mg)	Besi (mg)	Vit A (RE)	Vit C (mg)
MENU A	Beras	¾ gls	110	770,0	196,0	2,4	5,6	0,6	0,0	0,0
	Teri	4,5 sdm	67,5	338,0	116,0	22,0	810,0	2,4	44,0	9,0
	Gambas	4 sdm	70	280,0	10,0	0,4	9,6	0,6	34,0	4,8
	Pisang Ambon	1 bh	100	600,0	74,0	1,0	6,0	0,4	15,8	2,2
	Buras	2 potong	100	700,0	126,0	3,3	0,0	11,3	0,0	0,0
	Tempe Goreng	2 ptg	50	250,0	164,0	9,2	0,0	5,2	0,0	0,0
	Sop	0,5 mgkok	50	200,0	8,0	0,3	6,3	0,3	80,0	7,3
	ASI	-	-	-	182,0	3,1	99,0	0,0	196,0	8,0
	<b>Total</b>				<b>3138,0</b>	<b>876</b>	<b>33,7</b>	<b>936,5</b>	<b>21,0</b>	<b>369,8</b>
<b>Rasio kandungan gizi (%)</b>					<b>134,0</b>	<b>210,0</b>	<b>234,0</b>	<b>300,0</b>	<b>92,4</b>	<b>62,6</b>
MENU B	Beras	1,5 gls	225	1350,0	402,0	4,8	11,4	1,2	0,0	0,0
	Sop	20 sdm	150	300,0	22,0	1,0	19,0	0,8	240,0	22,0
	Ayam	2 ptg sdg	60	600,0	106,0	6,4	4,8	0,6	27,2	18,0
	Tempe	2 ptg	50	125,0	164,0	9,2	0,0	5,2	0,0	0,0
	Tahu	2 ptg	60	360,0	77,0	3,4	0,0	0,3	0,0	0,0
	Pisang ambon	1 buah	75	450,0	56,0	0,7	4,5	0,3	11,8	1,7

Menu	Jenis Pangan	Jumlah pangan		Biaya	Kandungan zat gizi menu makanan					
		URT	Gr	(Rp)	Energi (Kal)	Protein (g)	Ca (mg)	Besi (mg)	Vit A (RE)	Vit C (mg)
	Bakwan	1 bh	30	300,0	82,0	1,3	0,0	2,2	0,0	0,0
	Mie Goreng	10 sdm	50	835,0	234,0	10,2	0,0	0,9	0,0	1,0
	Agar-agar	3 ptg	60	1619,7	0,0	0,0	239,2	3,0	0,0	0,0
	ASI	-	-	-	260,0	4,4	141,2	0,0	280,0	10,8
	<b>Total</b>			<b>5939,7</b>	<b>1403,0</b>	<b>41,4</b>	<b>420,0</b>	<b>14,5</b>	<b>569,0</b>	<b>44,8</b>
	<b>Rasio kandungan gizi (%)</b>				<b>140,0</b>	<b>106,0</b>	<b>84,0</b>	<b>181,3</b>	<b>126,4</b>	<b>100</b>
	<b>MENU C</b>	Beras	1 gls	150	900,0	268	3,2	7,6	0,8	0,0
Buras		2 ptg	200	1200,0	252	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0
Kangkung		30 sdm	180	599,4	93,0	2,2	47,8	2,4	540,0	15,6
Teri		9 sdm	135	675,0	231,0	45,0	1620,0	4,8	87,9	18,0
Tempe		2 bh	50	200,0	164,0	18,4	0,0	5,2	0,0	0,0
Agar-agar		3 ptg	120	240,0	0,0	0,0	340,0	2,6	0,0	0,0
Semangka		1 ptg	286	20,0	37,0	0,7	9,2	0,3	119,7	0,0
<b>Total</b>				<b>3834,4</b>	<b>1043,0</b>	<b>61,0</b>	<b>2048,0</b>	<b>29,0</b>	<b>747,0</b>	<b>32,0</b>
<b>Rasio kandungan gizi (%)</b>				<b>104,0</b>	<b>245,4</b>	<b>410,0</b>	<b>362,3</b>	<b>161,0</b>	<b>72,0</b>	
<b>MENU D</b>	Beras	3 piring	300	1950,0	632,0	7,4	10,0	1,7	0,0	0,0
	Telur ayam	¾ btr	40	360,0	100,0	6,5	24,8	1,0	16,4	0,0
	Sawi	3 sdm	45	54,0	9,0	0,9	86,1	1,1	379,4	54,0
	Tahu	2 bh	60	450,0	77,0	3,4	0,0	0,3	0,0	0,0
	Agar-agar	3 ptg	60	120,0	0,0	0,0	240,0	3,0	0,0	0,0



Menu	Jenis Pangan	Jumlah pangan		Biaya (Rp)	Kandungan zat gizi menu makanan					
		URT	Gr		Energi (Kal)	Protein (g)	Ca (mg)	Besi (mg)	Vit A (RE)	Vit C (mg)
	Ayam	1 ptg sdg	90	900,0	158,0	9,6	7,4	0,8	40,8	0,0
	Kecap	2 sdm	30	9,0	14,0	1,7	36,9	1,7	0,0	0,0
	Bayam	6 sdm	100	400,0	48,0	1,4	129,0	0,8	495,0	22,0
	Roti	2 bh	70	21,0	174,0	5,5	14,0	1,8	0,0	0,0
	Susu	4 sdm	60	300,0	200,0	1,2	5,0	0,7	0,0	0,0
	Martabak	3 ptg	60	12,0	159,0	2,8	0,0	1,1	22,2	0,0
	Semangka	1 bh	286	20,0	37,0	0,7	9,2	0,3	119,7	7,9
	<b>Total</b>			<b>4596,0</b>	<b>1607,0</b>	<b>41,0</b>	<b>1757,0</b>	<b>14,0</b>	<b>1073,0</b>	<b>70,0</b>
	<b>Rasio kandungan gizi (%)</b>				<b>104,0</b>	<b>105,0</b>	<b>351,4</b>	<b>158,0</b>	<b>238,5</b>	<b>155</b>
<b>MENU E</b>	Beras	1 gls	150	975,0	268,0	3,2	7,6	0,8	0,0	0,0
	Mie	1 prg	100	650,0	468,0	7,6	0,0	1,8	0,0	2,0
	Telur ayam	1 btr	60	540,0	151,0	9,8	37,2	1,5	24,6	0,0
	Sawi	3 sdm	45	54,0	10,0	1,0	95,7	1,3	421,5	44,4
	Tempe	2 bh	50	375,0	164,0	3,2	0,0	5,2	0,0	0,0
	Kue Apem	3 ptg	60	120,0	112,0	2,0	0,0	0,1	0,0	0,0
	Ayam	1 ptg	90	900,0	79,0	4,8	7,4	0,8	40,8	0,0
	Kecap	1 sdm	15	4,5	7,0	0,9	18,5	0,9	0,0	0,0
	Buncis	3 sdm	45	180,0	14,0	1,0	2,6	0,4	38,5	7,7
	Susu	4 sdm	60	300,0	200,0	1,2	1200,0	0,7	0,0	0,0

Menu	Jenis Pangan	Jumlah pangan		Biaya (Rp)	Kandungan zat gizi menu makanan					
		URT	Gr		Energi (Kal)	Protein (g)	Ca (mg)	Besi (mg)	Vit A (RE)	Vit C (mg)
	Bakwan	2 bh	60	12,0	163,0	2,5	0,0	4,3	0,0	0,0
	Mangga Arum Ma nis	1 bh	75	15,0	22,0	0,2	7,3	0,1	90,2	2,9
	<b>Total</b>			<b>4125,5</b>	<b>1736,0</b>	<b>48,0</b>	<b>1376,1</b>	<b>17,9</b>	<b>615,5</b>	<b>57,0</b>
	<b>Rasio kandungan gizi (%)</b>				<b>112,0</b>	<b>123,0</b>	<b>275,2</b>	<b>198,5</b>	<b>137,0</b>	<b>127</b>

Keterangan :

Menu A = Menu untuk anak kelompok usia 7-12 bulan

Menu B = Menu untuk anak kelompok usia 13-24 bulan

Menu C = Menu untuk anak kelompok usia 25-36 bulan

Menu D = Menu untuk anak kelompok usia 37-48 bulan

Menu E = Menu untuk anak kelompok usia 49-60 bulan

URT (Ukuran Rumah Tangga) :

Sdm = sendok makan      bh = buah      mgk = mangkok

Sdt = sendok the      bh = buah besar      bj bsr = biji besar

Gls = gelas      btr = butir      ptg sdg = potong sedang

Jenis pangan yang dimasukkan dalam masing-masing menu diambil dari kelompok pangan yang merupakan kebiasaan pangan keluarga yang diambil berdasarkan semi food frequency questioner (FFQ) dalam setahun terakhir. Jenis pangan yang frekuensinya sering dikonsumsi merupakan pilihan prioritas yang dimasukkan dalam analisis menu. Selain itu juga bahan pangan ini mudah diperoleh baik dari warung sekitar maupun dari kebun yang mereka punya.

Menu makanan harian yang dirancang terdiri atas pangan pokok (nasi) sebagai sumber karbohidrat, pangan nabati dan pangan hewani sebagai sumber protein, sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral, serta jenis pangan lainnya yang memberikan kontribusi zat gizi tertentu. Adapun menu makanan yang direkomendasikan pada saat uji daya terima disajikan dalam bentuk susunan olahan makanan setiap waktu makan (pagi, siang, malam dan selingan). Jenis olahan makanan yang ditampilkan tersebut hanya sebagai contoh olahan yang mungkin dapat diterapkan. Akan tetapi, sebaiknya jenis olahan yang akan disajikan perlu disesuaikan dengan preferensi anak sehingga dapat meningkatkan selera makan anak tersebut.

Susunan jenis pangan yang telah dirancang didasarkan pada prinsip makanan yang beragam, bergizi dan berimbang dimana dengan komposisi pangan seperti diatas diharapkan semua kebutuhan zat gizi anak batita dapat terpenuhi. Selain itu, menu makanan yang telah dirancang juga didasarkan oleh pola konsumsi pangan anak batita dari keluarga miskin. Jika terdapat jenis pangan yang tidak disukai dalam menu tersebut maka dapat diganti dengan jenis pangan yang mengandung zat gizi utama yang sama. Sebagai contoh, nasi dapat diganti dengan roti, ubi, atau lainnya.

Pangan sebagai sumber zat gizi merupakan kebutuhan pokok yang harus dikonsumsi setiap hari. Berbeda dengan kebutuhan lainnya, kebutuhan pangan hanya memerlukan jumlah secukupnya. Kekurangan maupun kelebihan konsumsi pangan dalam jangka waktu lama akan berdampak buruk bagi kesehatan (Muhilal *et al.* 1998). Oleh karena itu,

disamping memperhatikan biaya konsumsi pangan, dalam penyusunan menu makanan harus memperhatikan juga kontribusi kandungan zat gizi yang dihasilkan sehingga jumlah zat gizi yang dikonsumsi sesuai dengan yang dibutuhkan.

Kontribusi kandungan zat gizi dalam contoh rancangan menu makanan diatas sudah dibuat sedemikian rupa sehingga dihasilkan rasio yang sesuai dengan AKG anak balita untuk masing-masing kelompok usia. Kontribusi kandungan energi, protein, kalsium zat besi, vitamin A dan vitamin C pada rancangan menu diatas sudah tergolong kategori normal. Rasio yang dihasilkan cukup sesuai dengan *cut off point* normal menurut Depkes (1996) yaitu antara 90-119% untuk energi dan protein dengan standar deviasi 10-15%, sedangkan untuk vitamin dan mineral digunakan batasan normal Gibson (2005) yaitu di atas 77%. Persentase lebih dalam vitamin dan mineral tidak membahayakan. Persentase kandungan zat gizi belum sesuai dalam menu merupakan hal yang wajar karena idealnya cukup sulit merancang menu dengan jenis pangan yang sering dikonsumsi oleh balita sehari-harinya. Lebih lengkap, Tabel 60 menyajikan rata-rata biaya dan kontribusi zat gizi dari menu makanan harian yang telah dirancang selama dua hari.

Kontribusi zat gizi yang diperoleh dari menu makanan yang telah dirancang tergolong dalam kategori baik. Kontribusi vitamin dan mineral dari rancangan menu makanan menggunakan batasan maksimum yang diperbolehkan (*Tolerable Upper Intake Level, UL*) sehingga batas atas kontribusi vitamin dan mineral dirancang jauh di bawah batas toksisitas. Persentase kontribusi zat gizi yang paling menonjol adalah vitamin A pada kelompok usia 37-48 bulan yaitu sebesar 238,5% (1802,5 RE). Menurut Muchtadi (2002), keracunan vitamin A akan terjadi bila anak pada usia tersebut mengkonsumsi 25.000-50.000 RE per hari selama 30 hari yang akan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan dalam tempurung kepala dan *hydrocephalus*. Berdasarkan hal itu maka kontribusi vitamin A tersebut masih dalam batas aman untuk dikonsumsi.

Tabel 61. Rata-rata biaya dan kontribusi kandungan zat gizi tiap menu makanan

Jenis menu	Rata-rata kontribusi kandungan zat gizi *) (%)						Rata-rata biaya (Rupiah/hari)
	Energi	Protein	Kalsium	Besi	Vit. A	Vit. C	
Menu A	136,0	165,0	7,9	232,0	33,1	43,5	4700,5
Menu B	119,0	146,0	25,0	145	41,0	190,0	4320,0
Menu C	108,0	196,0	229,0	260,8	161,0	134,3	4302,0
Menu D	101,0	101,0	280,0	166,4	140,8	88,6	4449,5
Menu E	104,2	112,3	266,9	151,2	89,4	91,8	4367,5
Min	101,0	101,0	7,9	145,0	33,1	43,50	4302,0
Maks	136,0	196,0	280,0	260,8	161,0	190,0	4700,5

\*) Kontribusi kandungan zat gizi dari menu terhadap AKG anak balita

Selain dilihat dari segi kontribusi zat gizi, menu makanan yang telah dirancang juga memperhatikan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Rata-rata biaya konsumsi pangan harian selama dua hari untuk seluruh kelompok usia masih dibawah rata-rata alokasi pengeluaran pangan yang dihasilkan dari analisis biaya (28.416,5 per kapita per hari). Biaya konsumsi pangan yang telah ada belum memperhitungkan biaya pengolahan atau penyajian. Oleh sebab itu, jika dalam menu tersebut menggunakan alternatif jenis olahan yang cukup kompleks (misalnya penggunaan banyak bumbu) maka dibutuhkan tambahan biaya sekitar 20% dari biaya konsumsi pangan. Akan tetapi, biasanya menu makanan anak balita terutama untuk kelompok usia 7-12 bulan (bayi) belum menggunakan olahan atau kombinasi bumbu yang kompleks baik dalam hal jenis maupun jumlahnya sehingga kemungkinan peningkatan biaya sangat kecil.

Menu yang dibuat dianalisis dengan menggunakan analisis goal programming, dan beberapa peneliti telah menghasilkan baik rancangan pengeluaran minimum keluarga maupun rancangan jumlah pangan yang harus disiapkan keluarga untuk memenuhi kecukupan gizi keluarga, seperti Sumarwan *et al.* (1997) melakukan penelitian untuk menemukan biaya pengeluaran minimum keluarga yang memenuhi kecukupan zat gizi dan kebiasaan pangan menggunakan linear programming stokastik.

Penelitian ini menghasilkan kuantitas pangan yang sebaiknya disiapkan setiap bulannya oleh keluarga yang tinggal di kota dan di desa dengan karakteristik yang serupa dengan kelurahan Tegalega dan desa Cibitung Kulon (Rusyana 2005).

Penelitian juga dilakukan Sukandar (1990) di kota San Pablo, Filipina untuk meminimumkan pengeluaran pangan keluarga menggunakan linear programming stokastik. Pada penelitian ini, kecukupan unsur gizi dan kebiasaan pangan penduduk harus terpenuhi. Selanjutnya, Akmal (2003) telah menggunakan model goal programming yang serupa dengan model linear programming untuk optimasi pemenuhan kecukupan gizi keluarga berdasarkan ketersediaan pangan sebelum dan sesudah krisis ekonomi di Lampung (Rusyana 2005).

## BAB VIII

# KESIMPULAN DAN SARAN

### 8.1

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan yaitu :

1. Berdasarkan ukuran kualitatif, maka prevalensi kelaparan di Sumatera Utara sebesar 20.8 persen.
2. Determinan utama kelaparan adalah pengeluaran rumahtangga per cápita. Risiko dengan pengeluaran perkapita dibawah garis kemiskinan mempunyai peluang 3.5 kali untuk mengalami kelaparan (OR= 3.5) dibandingkan rumahtangga dengan pengeluaran perkapita diatas garis kemiskinan.
3. Di desa dan di kota, baik pada rumahtangga kecaparan dan tidak kecaparan hanya satu organisasi yang diikuti yaitu 53.3%, berperan sebagai anggota dalam organisasi (57.5%). Keterlibatan masyarakat dalam organisasi semakin berkurang (45.8%), yang aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat (65%). (53.3%) mencurahkan waktunya kurang dari 10 jam per bulan. Sebagian besar (79.2%) meminta bantuan kepada tetangga. Keterlibatan masyarakat dalam membuat APBdes baik di desa maupun di kota sangat rendah, secara keseluruhan yang pernah ikut berpartisipasi hanya (4.2%). Partisipasi dalam membicarakan masalah warga masih rendah (14.2%). Masyarakat tidak keberatan bertetangga dengan tetangga yang berbeda suku, tidak keberatan memiliki tetangga rumahtangga manula. Baik di desa maupun di kota, rumahtangga kecaparan dan tidak kecaparan (60%) menyatakan bahwa tidak ada organisasi atau perusahaan yang membantu di wilayah tempat tinggal mereka. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan bantuan perusahaan secara umum sangat rendah. Secara keseluruhan (57.5%) menyatakan bahwa

pemerintah memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan organisasi atau perusahaan lain.

4. Solusi model goal programming menghasilkan sasaran didalam batas yang diperbolehkan, yaitu Energi dan protein antara 90-110% dan untuk vitamin dan mineral > 77% , dengan biaya sesuai daya beli yaitu Rp 4427.9,-.

## 8.2 Saran

1. Untuk mengurangi prevalensi kelaparan di Sumatera Utara sebaiknya pemerintah memberikan intervensi khusus kepada keluarga yang menderita kelaparan, baik dalam jangka pendek berupa bantuan pangan, dan dalam jangka menengah berupa pemberdayaan ekonomi dengan mempertimbangkan keberlanjutan matapencaharian mereka (peningkatan keterampilan, motivasi usaha dan modal).
2. Berdasarkan hasil penelitian program-program pemerintah umumnya dinilai berhasil oleh pejabat dan tokoh masyarakat oleh karena itu sebaiknya pemerintah tetap melanjutkan program yang sudah dilaksanakan dan terus meningkatkan kinerja untuk hasil yang lebih baik lagi. Namun demikian pemerintah tidak dapat melakukan semuanya sendiri, tetapi harus ada partisipasi dari masyarakat yang sinergis dengan program penanggulangankerawanan pangan dan kelaparan.
3. Solusi model optimalisasi gizi yang dihasilkan sudah mempertimbangkan daya beli khususnya daya beli dari keluarga miskin serta kebiasaan makan dan kecukupan gizi balita pada masyarakat Sumatera Utara, oleh karenanya model ini dapat di terapkan dalam kehidupan masyarakat terutama untuk anak balita dari keluarga miskin, untu pencegahan dan pencegahan kelaparan serta perbaikan status gizi balita.
4. Diharapkan masyarakat setempat dapat meningkatkan dukungan sosial terhadap keluarga yang miskin dan kelaparan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aneshensel CS. 2004. *Measurement: Validity, Reliability and Associations*. Los Angeles: University of California Press.
- Berhman JR. 1995. *Household Behaviour, Preschool Child Health and Nutrition, and the Role of Information*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2008. *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2008. Buku 1 Provinsi*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Carlson S.J, Andrews MS. and Bickel GW. 1999. *Measuring food Insecurity and Hunger in the United States: Development of a National Benchmark Measure and Prevalence Estimates*. *Journal of Nutrition* 129:510-516
- Cook JT, Deborah AF, Berkowitz C, Black MM, Casey PB, Cutts DB, Meyers AF, Zaldivar N, Skalicky A, Levenson S, Heeren T and Nord M. 2004. *Food Insecurity Is Associated with Adverse Health Outcomes among Human Infants and Toddlers*. *J. Nutr.* 134:1432-1438.
- Dharmawan AH. 2002. *Kemiskinan Kepercayaan (Trust , Stok Modal Sosial dan Disintegrasi Sosial*. *Perluasan dari makalah atas topik yang sama yang diajukan dalam Seminar dan Kongres Nasional IV Ikatan Sosiologi Indonesia*. Bogor. 27-29 Agustus 2002.
- [FAO] Food and Agriculture Organisation. 2003. *Proceedings, Measurement and Assessment of Food Devrivation and Undernutrition*. Internastional Scientific Symposium. Rome, 26-28 Juni 2002
- [FAO] Food and Agriculture Organisation. 2005. *Indonesia Progress Reduction Hunger*. Food and Agricultural Organisation. [www.fao.org](http://www.fao.org).
- Farrington J *et al.* 1999. *Sustainable Livelihoods in Practice : Early Applications of Concepts in Rural Areas*. ODI Natural Resources Perspectives. Number 42. June 1999. Overseas Development Institute. London.
- Fedderke J *et al.* 1999. *Economic Growth and Social Capital : A critical Reflection*. Kluwer Academic Publishers. Netherlands.

- Fukuyama F. 2001. *Social Capital, Civil Society, and Development*. Third Word Quarterly.
- Gass. 1969. *Linear Programming*. Tokyo: Mc Graw-Hill Kogakusha, LTD.
- Hardinsyah dan Martianto D. 1989. Menaksir Kecukupan Energi dan Protein serta Penilaian Mutu Gizi Konsumsi Pangan. Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga. Institut Pertanian Bogor.
- Hikmat H. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora Utama. Bandung.
- Kennedy E. 2003. Qualitative Measures of Food Insecurity and Hunger. Dalam Proceeding, Measurement and Assessment of Food Devrivation and Undernutrition. International Scientific Symposium. Rome, 26-28 Juni 2002.
- Luft R. 2004. *Measurement, Validity, and Reliability*. <http://www.iserp.columbia.edu>
- Mason, Jhon B. 2003. *Measuring Hunger and Malnutrition*. Dalam Proceeding, Measurement and Assessment of Food Devrivation and Undernutrition. International Scientific Symposium. Rome, 26-28 Juni 2002.
- Moser CON, McIlwaine C. 1997. *Household Response to Poverty and Vulnerability : Confronting Crisis in Commonwealth, Metro Manila, Philippines*. Series : Urban Management Program (Series). World Bank. Washington DC.
- Mutiara E, HSyarief H, Tanziha I, dan Sukandar D. 2008. Analisis Coping Strategy sebagai Indikator Kelaparan. Disertasi. Program Studi Gizi Masyarakat, Program Pascasarjana-IPB. Bogor.
- Rimbawan. 1999. Teknik Pengukuran Mutu Pangan dalam Penelitian Pangan dan Gizi Masyarakat. Makalah disajikan dalam Training Peningkatan Kemampuan Penelitian bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional.
- Rusyana A. 2005. Model Goal Programming Untuk Menentukan Kombinasi Kuantitas Pangan: Kasus Asrama Mahasiswa TPB IPB. Disertasi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

- [SCN] Sub-Committee on Nutrition. 2004. *5th Report on The World Nutrition Situation. Nutrition for Improved Development Outcomes*. Switzerland. United Nations System, SCN
- Smith LC. 2003. *The Use of Household Expenditure Surveys for The Assessment of Food Insecurity*. Proceedings Measurement and Assessment of Food Deprivation and Undernutrition. International Scientific Symposium, Rome 26-28 June 2002.
- Sukandar D. 1990. *Stochastic Linear Programming Models for Minimizing Household Food Expenditur* [Thesis]. Los Banos: Faculty of Graduate School, University of the Philippines Los Banos.
- Suhardjo. 1990. *Petunjuk Laboratorium Penelitian Keadaan Gizi Masyarakat*. PAU Pangan dan Gizi. IPB. Bogor.
- Sumarti T. 2007. *Pemberdayaan Masyarakat Petani menuju Masyarakat Mandiri dan Sejahtera*. Kerjasama Institut Pertanian Bogor dan Badan Litbang Pertanian, Deptan.
- Sumarwan U, Khomsan A, Sukandar D, Effendi YH. 1997. *Studi Model Perencanaan Konsumsi Pangan bagi Keluarga Berpenghasilan Rendah di Desa dan Kota: Laporan akhir hibah bersaing V/1 perguruan tinggi*. Bogor: Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, IPB.
- Syahra R, Hanim MS, Kusumawardhani DTP, Manan MA. 2000. *Anomie dan Modal Sosial : Memahami Krisis Multi Dimensional*. Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI. Jakarta.
- Tanziha I, Syarief H, Kusharto CM, Hardinsyah, Sukandar D. 2007. *Analisis Peubah Konsumsi dan Sosio Ekonomi Rumah Tangga untuk Menentukan Indikator Kelaparan*. Media Gizi dan Keluarga FEMA IPB. Vol. 31 No. 1. ISSN. 0216-9363. Juli 2007. Bogor-Indonesia. Hal. 20-29.
- Tanziha I, Kustiyah L. 2006. *Peningkatan Validitas Ukuran Kelaparan dalam Mengantisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB)*. Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia. IPB. Bogor.
- Tanziha I, Heryatno Y. 2007. *Analisis Determinan Kelaparan Pada Masyarakat Nelayan serta Alternatif Model Penanggulangannya*. Departemen Gizi Masyarakat. FEMA-IPB. Bogor.

- Tonny, F. Nasdian. 2006. "Kemitraan dalam Tata Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Komunitas Perdesaaan dalam Perspektif Kelembagaan" dalam Pembaharuan Tata Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan. PSP3-IPB dan Partnership of Governance Reform in Indonesia – UNDP.
- Winter I. 2000. *Towards a theorised understanding of family life and social capital*. Working paper No. 21, April 2000. Australian Institute of Family Studies.
- Wituro. 2003. Memperkuat Kembali Sistem Pangan Lokal. Makalah dalam lokakarya Forum Pendamping Petani di Bogor. [www.ELSPAT.or.id](http://www.ELSPAT.or.id).



**UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**  
**2009**